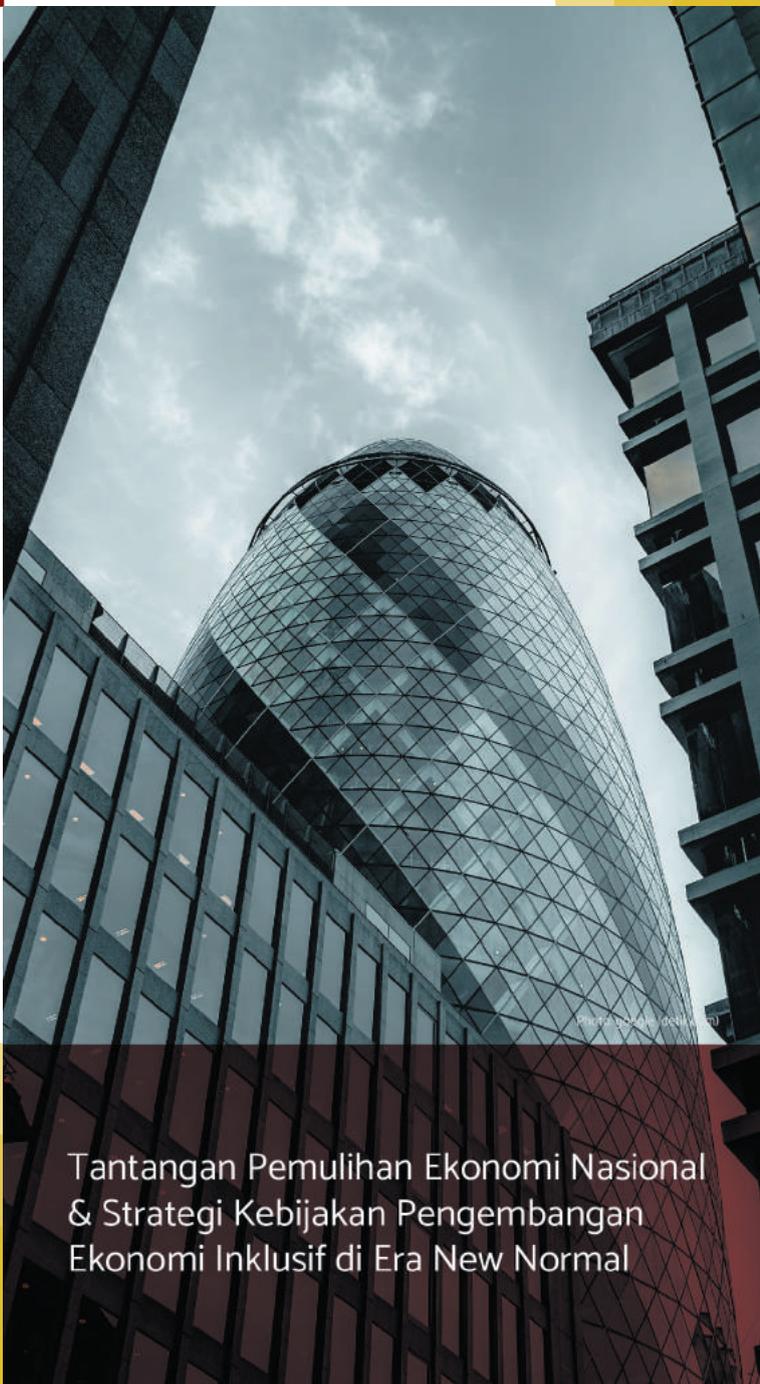




# KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

**2.0**

Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional  
& Strategi Kebijakan Pengembangan  
Ekonomi Inklusif di Era New Normal





---

**TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL**

---



**PENERBIT  
PENGURUS PUSAT IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA**

# TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL

KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK 2.0

---

- PELINDUNG** : Ketua Umum PP ISEI, Perry Warjiyo  
**PEMIMPIN REDAKSI** : Ketua Bidang II, Dody Budi Waluyo  
**DEWAN EDITORIAL** : Iskandar Simorangkir, Gatot Trihargo,  
Riswinandi, Yugi Prayanto, Tirta Segara, Solikin  
M. Juhro, Bustanul Arifin, Bayu Krisnamurthi,  
Nimmi Zulbainarni, M. Rudy Salahuddin, Yunita  
Resmi Sari, Ninasapti Triaswati, M. Anwar  
Bashori
- EDITOR PELAKSANA** : Solikin M. Juhro, Masagus M. Ridhwan,  
Tri Yanuarti, Arief B. Laksono

Kajian Kebijakan Publik adalah kajian yang dipublikasikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang merangkum berbagai perspektif pemikiran, analisis, dan rekomendasi kebijakan ekonomi publik, mencakup analisa tantangan pemulihan ekonomi nasional dan strategi kebijakan yang perlu ditempuh untuk pengembangan ekonomi yang inklusif dalam era new normal.

## **PENERBIT**

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

## **REDAKSI**

Jl. Daksa IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp: +62-21-7222463, Fax. +62-21-7201812

Email: [isei.pusat@gmail.com](mailto:isei.pusat@gmail.com)

Website: [www.isei.or.id](http://www.isei.or.id)

ISBN 978-602-14722-9-3

Edisi Kedua, Januari 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulisan ini dalam bentuk apapun

## KATA PENGANTAR

Ketidakpastian pada perekonomian telah mereda dan proses perbaikan kini tengah berlanjut di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dengan dukungan antisipasi dan kesiapan kebijakan yang terus diperkuat, sehingga ketahanan ekonomi domestik masih lebih baik dan diperkirakan akan tumbuh positif di tahun 2021 mendatang. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang erat antar otoritas di sektor ekonomi dan keuangan yang mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan juga tetap menjaga terkendalinya risiko di sektor sosial dan kesehatan. Dalam hal ini, kesiapan kebijakan tersebut berkaitan erat tidak hanya dengan ketajaman strategi dan rekomendasi, tetapi juga kehandalan dalam mengeksekusi kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itulah, diperlukan suatu langkah yang konkrit serta didukung dengan strategi yang tepat agar proses pemulihan yang tengah berlangsung dapat berjalan dengan aman dan membawa Indonesia keluar dari tantangan resesi perekonomian. Berangkat dari pemikiran tersebut, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) melihat ini sebagai suatu diskursus yang berharga untuk terlibat dalam memberi sumbangsih pemikiran di dalamnya. Melalui keanggotaan yang terdiri dari berbagai latar belakang, ISEI dapat berperan aktif dalam menyampaikan pandangan dari berbagai aspek di sektor ekonomi dan keuangan secara konstruktif dan sejalan dengan agenda pembangunan, sebagaimana buku Kajian Kebijakan Publik edisi yang kedua ini.

Dalam konteks perumusan kebijakan di era *new normal*, ISEI berkeyakinan bahwa tantangan yang tengah dihadapi memerlukan penanganan yang kolektif secara lintas sektor dan juga disertai pemenuhan prasyarat utama seperti vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan agar pembukaan aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara bertahap diikuti dengan tingkat permintaan yang lebih resilien. Begitu juga dengan akseptansi ekonomi dan keuangan digital dalam menunjang kelancaran transaksi pembayaran tanpa menimbulkan risiko penularan secara fisik, serta elemen kebijakan lainnya yang dapat kembali mendorong pembiayaan di sektor riil. Beberapa pelajaran berharga dari masa lalu juga diuraikan lebih lanjut sebagai penyeimbang informasi atas risiko dan strategi yang efektif dilakukan di masa – masa yang *extraordinary*.

Sebagai penutup, kami berharap buku ini bisa menjadi referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain. Kami juga mencermati bahwa sinergi yang kuat akan membawa pemulihan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

**Dr. Perry Warjiyo**  
Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI

## PENGANTAR EDITORIAL

Merumuskan strategi pengembangan ekonomi yang inklusif dalam era new normal serta tantangan pemulihan yang harus dihadapi melalui berbagai respons kebijakan yang dianggap perlu ditempuh oleh para pemangku kepentingan, adalah perspektif utama yang coba dihadirkan dalam buku Kajian Kebijakan Publik ISEI seri kedua di hadapan para pembaca sekalian. Menyadari bahwa ketahanan ekonomi Indonesia kini tengah diuji dengan fenomena pandemi Covid-19, maka implikasi yang luas terhadap berbagai sektor ekonomi tersebut pada beberapa bab selanjutnya disajikan dengan analisa yang lebih kasuistis, dan menitikberatkan pada konteks dinamika beradaptasi di era kebiasaan baru serta implikasinya terhadap pemulihan nasional.

Melalui buku ini, ISEI meyakini bahwa perspektif kebijakan dalam memperkuat modalitas perekonomian nasional yang merupakan rekomendasi utama pada buku edisi sebelumnya di bulan Maret tahun 2020, tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai perhatian terhadap beberapa *endowment factor* yang semakin memengaruhi kesiapsiagaan kebijakan pemerintah dalam beradaptasi atas segala perubahan. Olehkarena itu, perlu disusun suatu solusi yang mampu menangani tantangan *multi-constraints*, yakni tidak hanya berasal dari aspek ekonomi, namun juga dari aspek sosial dan kesehatan dengan pendekatan yang kognitif, bersumber dari telaah kebijakan oleh 16 Focus Group Kebijakan di Bidang II PP ISEI.

Berbagai analisa tersebut disusun kedalam 4 bagian utama yang menjelaskan secara runut proses kejadian pandemi di sekitar kita hingga solusi yang juga memerhatikan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian. Setiap pemikiran yang tertuang merupakan hasil dari pengkajian ilmiah baik melalui bacaan dari literatur terkait, pendalaman melalui survey dan *Focus Group Discussion*, serta prosiding hasil rekomendasi kebijakan ISEI di pusat maupun cabang.

Akhirnya, kami berharap buku Kajian Kebijakan Publik yang berjudul **“Tantangan Pemulihan ekonomi Nasional dan Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Inklusif di Era New Normal”** ini dapat memberi pandangan baru dan masukan yang bermanfaat bagi setiap pihak baik dari unsur akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk bersama menyukkseskan agenda pemulihan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan.

**Dody Budi Waluyo, S.E., MBA.**

Ketua Bidang II PP ISEI

Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 telah menyebabkan tekanan yang sangat besar terhadap perekonomian baik global maupun nasional, dengan penularan kepada lebih dari 40 juta orang di lebih dari 200 negara serta kematian pada lebih dari 1 juta orang. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) dalam publikasi mereka pada Oktober 2020 menyampaikan prakiraan terbaru bahwa perekonomian global akan mengalami resesi yang dalam dan memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan terkontraksi sekitar 5 persen. Sementara itu, kebijakan ekonomi yang masif termasuk pemberian stimulus ekonomi yang sangat besar oleh otoritas fiskal dan moneter ternyata belum cukup mampu menahan kejatuhan ekonomi di berbagai negara. Pada akhirnya, Covid-19 yang telah menyebar cepat secara global merupakan contoh jelas bagaimana perubahan suatu sistem terjadi dan bagaimana eksistensi faktor institusi dan budaya di suatu masyarakat akan mempengaruhi tindakan mereka dalam menghadapi pandemi.

Dalam merespons dampak pandemi Covid-19, yang merupakan *extraordinary circumstances*, otoritas di berbagai negara telah menempuh berbagai kebijakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*). Respons kebijakan Indonesia dalam mengatasi pandemi ini serupa dengan kebijakan banyak negara lain di dunia. Kebijakan ekspansi fiskal dan moneter dilakukan secara terukur guna menyelamatkan negeri dari krisis kesehatan maupun dari krisis ekonomi. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya; tidak hanya melalui kebijakan moneter tetapi juga melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan Pemerintah serta otoritas kebijakan lainnya, berperan aktif dalam upaya penyelamatan ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diprakirakan akan terkontraksi sekitar 1,5 hingga 2 persen, suatu keniscayaan kontraksi namun masih berada di bawah angka proyeksi kontraksi untuk perekonomian global. Pemerintah, Bank Indonesia, serta otoritas kebijakan terkait sangat proaktif dalam upaya mengawal pemulihan ekonomi nasional, baik melalui pelaksanaan bauran kebijakan ekonomi maupun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peran tersebut diejawantahkan dalam berbagai instrumen bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, di samping untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan berkoordinasi erat bersama Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, serta sekaligus mengarungi era kenormalan baru (*new normal*), penguatan koordinasi

kebijakan ekonomi di tingkat nasional sangat diperlukan dengan fokus strategi, yaitu (Warjiyo, 2020): (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) percepatan realisasi APBN dan APBD, (iii) pelaksanaan program restrukturisasi kredit dan dunia usaha, (iv) penguatan stimulus moneter dan makprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi keuangan, khususnya UMKM.

Setiap krisis adalah kesempatan yang baik untuk belajar. Banyak krisis ekonomi yang melahirkan teori atau pemikiran ekonomi baru, termasuk *next practices*. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa langkah-langkah kolektif untuk memperkuat tatanan kelembagaan, menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi makro, dan penguatan koordinasi kebijakan tingkat nasional (*national policy mix*) menjadi *sufficient condition* dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mengawal era *new normal*. Strategi kebijakan nasional juga difokuskan pada penciptaan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi berbasis pada *endowment* nasional dan melibatkan peran masyarakat luas, seperti pemberdayaan ekonomi UMKM dan ekonomi syariah serta ekonomi kreatif dan inovatif, terutama dalam bentuk inovasi *frugal*. Beberapa perspektif kebijakan yang disampaikan di atas, dalam *stage* ekonomi yang normal, adalah sejalan dengan pemikiran ISEI sebelumnya (ISEI, 2020) mengenai model pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menekankan pada upaya untuk faktor produksi seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbanyak peran infrastruktur, serta memperluas penguasaan teknologi digital dan inovasi. Model pertumbuhan tersebut juga didukung oleh penguatan kelembagaan serta peningkatan ketahanan pangan dan energi sebagai elemen pendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Adapun respons untuk memperkuat model pertumbuhan ekonomi juga didukung penajaman strategi kebijakan di lima area strategis, yaitu pengelolaan kebijakan makroekonomi yang disiplin dan sehat, pengembangan sektor unggulan, kebijakan memperkuat UMKM, kebijakan meningkatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, serta kebijakan lainnya untuk memperkuat sumber pembiayaan.

*This time is different*. Dengan adanya pandemi Covid-19, *extraordinary circumstances* pada akhirnya memerlukan *extraordinary measures*. Untuk itu pula, diperlukan paradigma atau pemikiran yang lebih komprehensif dan juga komplementatif daripada paradigma sebelumnya. Bahkan, untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, paradigma pembangunan ekonomi nasional juga perlu 'di-reset', atau lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi, yang tentunya berjalan paralel dengan upaya penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Paradigma dimaksud terutama menitikberatkan pada azas inklusivitas secara

*holistic* guna mengurangi disparitas dimaksud, yang secara khusus ditujukan melalui beberapa strategi kebijakan yaitu: (i) pengembangan infrastruktur dan perluasan pelayanan publik, (ii) pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat luas (kerakyatan), dalam hal ini melalui langkah penguatan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), termasuk yang berbasis syariah, (iii) percepatan digitalisasi dan penguatan inovasi/riset, (iv) pengembangan modal manusia (SDM) dengan memanfaatkan peluang bonus demografi, serta (v) penguatan faktor kelembagaan inklusif, termasuk revitalisasi kerjasama, yang kesemuanya berbasis pada potensi perkembangan ekonomi digital serta sejalan dengan prinsip *less-contact economy* di era kenormalan baru ke depan. Dengan memperhatikan berbagai perubahan lingkungan strategis dan modalitas perekonomian nasional, berikut ini adalah ilustrasi prioritas strategi kebijakan tersebut yang dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan *stakeholders* terkait, khususnya dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional di era pandemi dan *new normal*, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan inklusif.

### Lingkungan Strategis dan Strategi Kebijakan Ekonomi Inklusif



Pada akhirnya, *new normal* dapat pula diartikan sebagai *new forms of leadership* dengan kehandalan dalam mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, dalam tataran implementasi, terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan. Pertama, penguatan strategi dengan mencari solusi “*dynamic optimization*” dengan *multiple constraints*, tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga kesehatan dan sosial. Kedua, strategi dan *timing* respons kebijakan untuk mengatasi kombinasi *supply-demand shocks* secara paralel, dengan penekanan respons jangka pendek dan menengah-panjang. Ketiga, penguatan sinergi dan terobosan (*breakthrough*) untuk

mendukung langkah penyelamatan perekonomian secara menyeluruh. Keempat, membangun strategi untuk memperkuat ketahanan sistemik (*systemic resilience strategies*) yang mengintegrasikan wawasan dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk memetakan dan merespons permasalahan secara realistis dan integratif. Kelima adalah penguatan strategi komunikasi di masa krisis.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR EDITORIAL .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>Bab I Perspektif Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi .....</b>	<b>1</b>
1. Pendahuluan .....	1
2. Koordinasi Kebijakan Ekonomi Nasional .....	4
3. Beberapa Pelajaran dan Perspektif Kebijakan di Masa Krisis .....	8
4. Penutup .....	11
<b>Bab II STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL .....</b>	<b>13</b>
2.1. Pendahuluan .....	13
2.2. Strategi Kebijakan Jangka Pendek .....	16
2.3. Strategi Kebijakan Jangka Menengah-Panjang .....	18
2.4. Melanjutkan Agenda Reformasi Ekonomi .....	20
2.5. Penguatan Modalitas Pembangunan Ekonomi .....	23
<b>BAB III PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL: SUATU PEMIKIRAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Pendahuluan .....	27
3.2. Perubahan Lingkungan Strategis dan Tantangan di Era Pandemi .....	28
3.2.1. Perubahan Lingkungan Strategis .....	28
3.2.2. Beberapa Tantangan Utama di Era Pandemi .....	29
3.3. Tinjauan Modalitas Perekonomian Nasional .....	42
3.3.1. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) .....	42
3.3.2. Budaya Nusantara ( <i>Social Capital</i> ) .....	45
3.3.3. Populasi dan Bonus Demografi .....	47
3.3.4. Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah .....	49
3.4. Strategi Kebijakan Ekonomi Inklusif di Era <i>New Normal</i> .....	52
3.5. Strategi Implementasi .....	74
<b>BAB IV ANALISA SEKTORAL DAN STRATEGI PENGUATAN PEMULIHAN INKLUSIF .....</b>	<b>79</b>
4.1. Pendahuluan .....	79
4.2. Sektor Penopang Pemulihan Ekonomi .....	80
4.2.1. Perluasan Keuangan Inklusif .....	80
4.2.2. Pemulihan Iklim Ketenagakerjaan .....	83
4.2.3. Peningkatan Ketahanan Pangan .....	85

4.3.	Sektor Pendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi .....	90
4.3.1.	Pengembangan Sumber Daya Kemaritiman .....	90
4.3.2.	Penguatan Strategi Perdagangan Internasional Era Baru .....	93
4.3.3.	Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah ...	97
4.4.	Digitalisasi UMKM dalam Mendukung Pemulihan Sektoral yang Inklusif .....	101
4.4.1.	Penguatan Kolaborasi UMKM dan Industri Kreatif Nasional .....	102
4.4.2.	Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM .....	104
4.4.3.	Penguatan Daya Saing UMKM .....	105

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Two-Curve Problem: Penanganan Kesehatan dan Ekonomi .....	3
Grafik 2.	Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional tahun 2019 .....	81
Grafik 3.	Persentase Pekerja di Dunia Terdampak Pandemi Covid - 19 .....	83
Grafik 4.	Perilaku pengeluaran rumah tangga selama Pandemi Covid-19 .....	87
Grafik 5.	Dinamika Perubahan Harga Pangan Strategis Nasional .....	88
Grafik 6.	Shifting Ketenagakerjaan Selama Pandemi ke Sektor Informal .....	89
Grafik 7.	Andil PDB Sektor Perikanan Terhadap Nasional (Tw I 2014 – Tw III 2018) .....	91
Grafik 8.	Tingkat NTN dan NTPI Nasional Januari – Agustus 2020 .....	92
Grafik 9.	Proyeksi Perdagangan Jasa dan Barang Dunia (Agustus, 2020) .....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Efek Penularan Berganda Pandemi .....	2
Gambar 2.	Bauran Kebijakan BI dalam Koordinasi Kebijakan Ekonomi Nasional .....	6
Gambar 3.	Keterkaitan Kelembagaan Politik dan Ekonomi .....	40
Gambar 4.	Skema Bonus Demografi Indonesia .....	48
Gambar 5.	Lingkungan Strategis dan Strategi Kebijakan Ekonomi Inklusif .....	52
Gambar 6.	Peringkat Indonesia Sebagai Produsen Produk Halal Dunia .....	98
Gambar 7.	Mapping Sektor Eksyar yang Terdampak Pandemi Secara Global .....	99

# Bab I

## Perspektif Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi

### 1. Pendahuluan

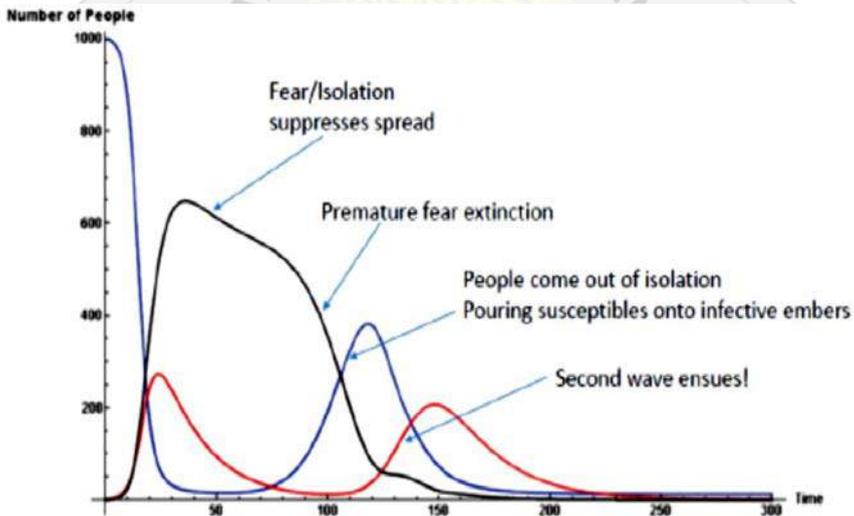
Untuk pertama kalinya sejak *Great Depression* tahun 1930-an, negara maju maupun negara-negara berkembang menghadapi krisis yang bersamaan, dengan respons kebijakan yang juga hampir sama. Dengan penularan kepada lebih dari 40 juta orang di lebih dari 200 negara serta kematian pada lebih dari 1 juta orang, pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan tekanan yang sangat besar terhadap perekonomian baik global maupun nasional.

Dunia tidak sekali mengalami guncangan ekonomi yang dahsyat. Pengalaman dari krisis keuangan sebelumnya di 2008 juga menunjukkan bahwa permasalahan yang hanya berawal dari masalah di pasar *mortgage* (perumahan) dapat tereskalasi menjadi krisis keuangan skala global. Demikian juga krisis keuangan Asia di 1997 dan krisis-krisis lain sebelumnya yang antara lain dipicu oleh permasalahan utang dan kerentanan sektor keuangan, pada akhirnya menyebabkan kejatuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Sementara itu, Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO (World Health Organization) pada 11 Maret 2020 telah menyebar cepat ke seluruh dunia, merupakan contoh jelas bagaimana perubahan suatu sistem terjadi, yang bermula dari virus pada hewan dan kemudian berkembang cepat menular ke manusia secara global. Parahnya, serangan virus ini terjadi pada saat sistem kesehatan dunia belum mempunyai sumber daya manusia dan/sumber daya pendukung yang diperlukan untuk mengatasi lonjakan jumlah pasien yang terjadi secara tiba-tiba, masif dan tak terduga.

Selain itu, Covid-19 telah menunjukkan bagaimana eksistensi faktor institusi dan budaya di suatu masyarakat akan mempengaruhi tindakan mereka dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, negara/daerah dengan faktor institusi yang kuat dan berbudaya tinggi, seharusnya juga memiliki faktor kepercayaan (*trust*) terhadap *leadership* pemerintah (otoritas) dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mengikuti/mematuhi arahan pemimpinnya (*followership*). Dengan demikian, faktor psikologis/sentimen (*human behaviour*) di suatu komunitas/bangsa dapat memengaruhi bagaimana dan seberapa besar dampak potensial dari suatu bencana yang mungkin terjadi. Menurut Epstein dkk. (2008), penyebaran pandemi secara global merupakan

interaksi antara dinamika infeksi (yang diciptakan oleh pandemi) dan dinamika sosial (diciptakan oleh rasa takut), atau dinamakan sebagai efek penularan berganda (*coupled contagion*) yang dapat menimbulkan dampak yang *volatile* (Gambar 1). Sebagai ilustrasi, di sistem keuangan, terjadinya *duo* penularan yaitu - virus dan ketakutan – yang mendorong perubahan perilaku individu. Pergerakan di pasar modal yang disebabkan oleh perubahan keputusan para pelaku pasar, yang awalnya tidak terpengaruh oleh virus atau ketakutan akan virus, kemudian nyatanya berlanjut memicu epidemi pergerakan pasar. Pelemahan kinerja pasar keuangan dan bahkan terjadinya kebangkrutan sejumlah korporasi global baru-baru ini dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya merupakan implikasi dari efek *contagion* yang bersifat fisik dan psikis dimaksud.<sup>1</sup> Khusus terkait psikis ini, sebuah hasil studi Universitas Oxford baru-baru ini juga melaporkan satu dari lima pasien Covid-19 mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi atau insomnia.<sup>2</sup>

**Gambar 1. Efek Penularan Berganda Pandemi**



Sumber: Epstein dkk. (2008)

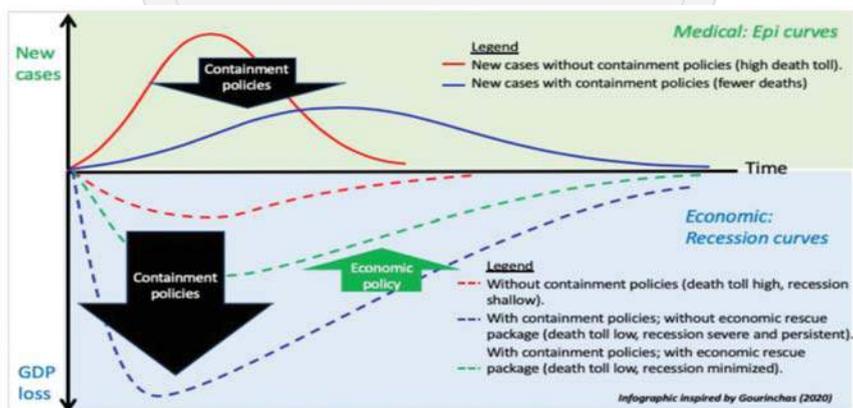
<sup>1</sup> Sebagai ilustrasi, dua orang individu mengidap ketakutan (penakut) mempunyai kontak dengan orang yang terinfeksi penyakit (pesakitan), yang terinfeksi rasa takut (yang ketakutan), dan mereka yang terinfeksi dengan rasa takut dan penyakit (yang sakit dan ketakutan). Individu yang ketakutan - baik sakit atau tidak - menarik diri dari peredaran dengan kemungkinan tertentu, yang mempengaruhi jalannya epidemi penyakit dengan tepat. Jika individu pulih dari rasa takut dan kembali ke sirkulasi, dinamika penyakit menjadi kaya, dan mencakup berbagai gelombang infeksi, seperti yang terjadi pada Pandemi Influenza 1918.

<sup>2</sup> Sumber: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mental-illness-idUSKBN27P34L>

Dengan memperhatikan fenomena di atas, secara konseptual dapat disimpulkan bahwa saat ini kita tidak lagi hidup dalam dunia yang linier ala *Newtonian*, di mana suatu tindakan menyebabkan reaksi yang dapat diprediksi. Faktanya, kita adalah bagian dari suatu sistem kompleks lingkungan, sosio-politik, dan sistem ekonomi yang terkonfigurasi secara terus-menerus dan berulang-ulang (*feedback loops*) serta terus mempengaruhi kita. Dalam kondisi dunia seperti ini, sebuah perubahan kecil saja dapat ditransmisikan akibat keterkaitan antar sistem (*interconnectedness*) yang selanjutnya dapat membawa konsekuensi yang sangat besar, jauh melampaui waktu, tempat, dan besarnya skala dari gangguan awal (*amplification mechanism*).

Permasalahan pandemi juga memberikan komplikasi dari kebijakan yang akan diambil, karena tidak hanya terkait dengan langkah penanganan kesehatan tetapi juga penanganan tekanan ekonomi. Dari berbagai pengamatan empiris (Baldwin, 2020), umumnya terdapat dilema antara langkah penanganan kesehatan dengan penanganan tekanan ekonomi. Dalam kaitan ini, jika penanganan kesehatan, misalnya dalam bentuk pembatasan fisik, dilakukan secara longgar, maka hal ini akan membantu mengurangi tekanan ekonomi. Namun demikian, pengorbanan di sisi kesehatan sangat fatal karena akan banyak korban jiwa. Sebaliknya, jika penanganan kesehatan dilakukan secara ketat dan menyebabkan sedikitnya korban jiwa, tekanan ekonomi yang terjadi lebih dalam. Untuk membantu mengatasi tekanan ekonomi maka diperlukan intervensi berupa stimulus kebijakan ekonomi yang signifikan.

**Grafik 1. Two-Curve Problem:  
Penanganan Kesehatan dan Ekonomi**



Richard Baldwin 26 March 2020  
Source : Author's elaboration based on Gourinchas (2020).

Dalam situasi yang dilematis tersebut, pembuat kebijakan ekonomi perlu bertindak cepat dan taktis. Otoritas kebijakan harus menerapkan kebijakan yang ‘meratakan kurva resesi’ sambil menghindari tekanan jangka panjang pada ekonomi (krisis). Diyakini bahwa lebih cepat dan desisif langkah kebijakan, semakin rendah potensi pemburukan kesehatan dan semakin kecil kerugian ekonomi yang muncul. Jika suatu perekonomian melewatkan reaksi kebijakan di masa-masa awal, maka penyesuaian langkah untuk pengendalian pandemi dan kerugian ekonomi akan semakin sulit. Dalam hal ini, diyakini pula bahwa kecepatan respons kebijakan lebih penting daripada intensitas/ magnitud kebijakan (Chen & Spence, 2020).

Dari paparan diatas, adalah suatu keniscayaan bahwa di era kenormalan baru (*new normal*) dan termasuk paska pandemi di masa mendatang, kehidupan manusia yang juga merupakan suatu sistem kompleks yang ber-interkoneksi satu sama lain akan menghadapi kondisi yang berbeda atau tidak sama lagi dengan sebelumnya. Dalam hal ini, World Economic Forum (WEF) menggunakan sebutan yang sangat menarik di tahun 2020 sebagai suatu “Great Reset”. Mengingat dampak pandemi di negara kita terutama memunculkan masalah melebarnya kesenjangan sosial ekonomi sebagai implikasi dari terjadinya peningkatan pengangguran dan kemiskinan, maka paradigma pembangunan ekonomi nasional juga perlu “di-reset”, atau lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi dimaksud, yang tentunya berjalan paralel dengan upaya penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

## **2. Koordinasi Kebijakan Ekonomi Nasional**

*We’ve done a lot of things.* Kebijakan ekonomi yang masif termasuk pemberian stimulus ekonomi yang sangat besar oleh otoritas fiskal dan moneter; namun itu belum mampu menahan kejatuhan ekonomi berbagai negara. Respons kebijakan Indonesia dalam mengatasi pandemi ini serupa dengan kebijakan banyak negara lain. Kebijakan ekspansi fiskal dan moneter dilakukan secara terukur guna menyelamatkan negeri dari krisis kesehatan maupun dari krisis ekonomi. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya; tidak hanya melalui kebijakan moneter tetapi juga melalui kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan Pemerintah serta otoritas kebijakan lainnya, berperan aktif dalam upaya penyelamatan ini.

IMF dalam publikasi mereka pada Oktober 2020 menyampaikan prakiraan terbaru bahwa perekonomian global akan mengalami resesi yang dalam dan memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan

terkontraksi sebesar 4,4 persen. Proyeksi ini masih lebih baik dibandingkan dengan proyeksi World Bank yang memprakirakan kontraksi sebesar 5,2 persen pada 2020. Sementara itu, Consensus Forecast Asia Pacific memprakirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Pasifik saja akan terkontraksi sebesar 1,6 persen dengan pertumbuhan positif hanya bersumber dari China, Taiwan, dan Vietnam. Dengan kasus positif yang lebih dari 400 ribu dan angka kematian yang telah melampaui 13 ribu jiwa<sup>3</sup>, pukulan pandemi terhadap ekonomi Indonesia tidak separah yang dialami banyak negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi pada triwulan II dan III 2020, sehingga secara keseluruhan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan menjadi negatif. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 1,5 persen, sementara World Bank memprakirakan kontraksi sebesar antara 2 hingga 1,6 persen. Semua proyeksi ini meski menunjukkan keniscayaan kontraksi namun masih berada di bawah angka proyeksi kontraksi untuk perekonomian global.

Krisis ekonomi kali ini memiliki penyebab yang berbeda karena dipicu dari krisis kesehatan sebagai akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, tiga pelajaran mendasar yang disebutkan di atas masih tetap relevan dalam merumuskan bauran kebijakan bank sentral di masa pandemi. Didorong oleh fajar baru dari era digital (*rising digitalization*), masih terdapat kebutuhan strategi yang sama dalam lingkungan yang di satu sisi membutuhkan *physical distancing*, namun di sisi lain juga telah menciptakan hubungan yang *hyper-connected*; yang membuka peluang sangat lebar bagi keduanya untuk percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Oleh karenanya, implementasi strategi bauran kebijakan bahkan perlu diperkuat melalui penguatan koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, khususnya kebijakan fiskal dan reformasi struktural untuk mengoptimalkan peluang dan keuntungan ekonomi di era digital. Dalam konteks itu pula, penguatan kelembagaan bank sentral menjadi esensial untuk mengawal kredibilitas kebijakan serta keterlibatan optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi di era digital. Gambar 1 menggambarkan posisi bauran kebijakan Bank Indonesia dalam koordinasi kebijakan nasional.

---

<sup>3</sup> Data per 31 Oktober 2020.

## Gambar 2 Bauran Kebijakan BI dalam Koordinasi Kebijakan Ekonomi Nasional



Dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, serta sekaligus mengarungi era kenormalan baru (*new normal*), penguatan koordinasi kebijakan ekonomi nasional sangat diperlukan dengan fokus strategi, yaitu (Warjiyo, 2020): (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) percepatan realisasi APBN dan APBD, (iii) pelaksanaan program restrukturisasi kredit dan dunia usaha, (iv) penguatan stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi keuangan, khususnya UMKM.

Sebagaimana diketahui, kontraksi yang luar biasa besar pada masa pandemi membutuhkan stimulus fiskal dan moneter yang besar guna memulihkan perekonomian. Besaran stimulus dari masing-masing negara berdampak sangat bervariasi. Secara total, nilai stimulus terutama dalam bentuk penjaminan, injeksi likuiditas, belanja pemerintah, pelonggaran kredit perbankan, dan relaksasi ketentuan tercatat telah mencapai lebih dari 10 triliun dolar AS, lebih dari 3 kali lipat nilai stimulus yang dikeluarkan dunia ketika menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 (Cassim et al., 2020). Berdasarkan *insight* McKinsey atas 54 negara yang mewakili 93 persen perekonomian dunia, diukur dari porsi terhadap PDB 2019, di antara negara anggota G-20, Mexico mengucurkan stimulus terkecil yaitu sekitar 1 persen PDB mereka, sementara Italia tercatat menyuntikkan stimulus terbesar yaitu sekitar 40 persen PDB mereka. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen atas stimulus fiskal sekitar 5 persen dari PDB 2019. Konsekuensi dari stimulus fiskal tersebut adalah peningkatan defisit hingga diperkirakan jauh melampaui batas awal 3 persen PDB yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kebutuhan pembiayaan fiskal.

Bank Indonesia juga sangat proaktif dalam upaya mengawal pemulihan ekonomi nasional, baik melalui pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia, maupun keterlibatan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peran tersebut diejawantahkan dalam berbagai instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, di samping untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dengan berkoordinasi erat bersama Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah utama bauran kebijakan Bank Indonesia, adalah (Warjiyo, 2020):

- (i) Penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 4 (empat) kali dalam 2020 sebesar 100 bps menjadi 4,00%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dengan mempertimbangkan rendahnya tekanan inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar Rupiah.
- (ii) Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar *spot*, *DNDF*, dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.
- (iii) Pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*) sebesar Rp667,6 triliun dengan injeksi likuiditas ke perbankan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
- (iv) Penyediaan pendanaan dan berbagi beban dalam pembiayaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana (SKB 16 April 2020) dan secara langsung (SKB 7 Juli 2020).
- (v) Penyediaan pendanaan bagi LPS untukantisipasi maupun penanganan bank bermasalah melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN (PP No. 33 Tahun 2020).
- (vi) Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, sejalan dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Hal penting yang patut dicatat adalah bahwa, menyadari pentingnya kecepatan respons dan besarnya *magnitude* tekanan ekonomi akibat pandemi, maka semenjak bulan April 2020 melalui PERPPU No. 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020, disahkan perluasan wewenang Bank Indonesia yaitu untuk dapat melakukan pembelian SBN di pasar perdana. Hal ini krusial untuk dilakukan dalam konteks pemulihan ekonomi nasional dan koridor legal formal peran Bank Indonesia dalam pembiayaan PEN. Sementara itu, dalam konteks pembiayaan dan *burden sharing* dalam pembiayaan PEN antara Bank Indonesia dengan Pemerintah telah didasarkan pada prinsip-prinsip yang *prudent* dan *govern*, serta mempertimbangkan sustainabilitas pengelolaan keuangan Bank Indonesia.

### 3. Beberapa Pelajaran dan Perspektif Kebijakan di Masa Krisis

Setiap krisis adalah kesempatan yang baik untuk belajar. Banyak krisis ekonomi yang melahirkan teori atau pemikiran ekonomi baru, termasuk *next practices*. Sebagai contoh, *Great Depression* yang melahirkan aliran pemikiran Keynesian. Krisis keuangan global tahun 2008/09 meningkatkan kompleksitas permasalahan ekonomi makro dan mendorong beberapa bank sentral terutama di *emerging markets* untuk melakukan refleksi dan *realignment* dalam penerapan *Inflation Targeting Framework* yang lebih fleksibel. Krisis ini juga melahirkan pemikiran mengenai pentingnya *risk management* dalam pengelolaan kebijakan makro dan sektor keuangan, yang dalam hal ini telah memosisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan utama untuk tujuan pengendalian stabilitas sektor keuangan.

Krisis kali ini berbeda. Setelah dideklarasikan sebagai pandemi global pada Maret 2020, sebagian negara yang terjangkit telah beranjak dari *first wave* dengan penurunan tingkat fatalitas. Sejumlah kecil negara seperti New Zealand, China, Vietnam, dan Korea Selatan, bahkan telah dianggap mampu mengendalikan Covid-19. Setelah *first wave*, dunia pun mulai belajar menghadapi dan hidup bersama Covid-19. Penanganan pandemi flu Spanyol pada tahun 1918 dan pengalaman dari negara yang disebutkan di atas membuktikan bahwa disiplin bersama masyarakat dan Pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan, *physical distancing*, menjadi kunci dari pengendalian yang efektif dari pandemi ini dan juga menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional. Disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan akan senantiasa menjadi faktor utama pendukung efektivitas kebijakan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, tidak terkecuali pada saat vaksin Covid-19 ditemukan nantinya.

Sementara itu, stimulus fiskal dan moneter yang luar biasa besar mulai menampakkan hasil. Beberapa indikator produksi dan kepercayaan konsumen di AS, China, dan Eropa mulai membaik. Volume perdagangan dunia dan harga komoditas pun meningkat, seiring peningkatan aktivitas perdagangan yang dipicu oleh pemulihan permintaan global terutama dari negara maju. Di sisi lain, ketidakpastian pada negara-negara berkembang masih tinggi, nampak dari peningkatan VIX (*Volatility Index*), EMBI (*Emerging Markets Bond Index*) *spread*, dan masih terbatasnya aliran modal masuk.

Di Indonesia, laju penyebaran Covid-19 saat ini masih cukup tinggi meski tingkat kematian sudah mulai melandai. Sejalan dengan itu, perbaikan ekonomi mulai terpantau dari berbagai indikator seperti indikator penjualan ritel dan *online*, dan indikator lowongan pekerjaan. Pemulihan ini ditengarai

digerakkan oleh peningkatan belanja Pemerintah terutama dalam bentuk bantuan tunai dalam rangka perlindungan sosial dan pemberian dukungan kepada UMKM. Terjadi juga peningkatan pada ekspor dan investasi. Ketiga komponen pembentuk PDB tersebut telah menopang perekonomian di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar PDB.

Ketahanan eksternal kita pun masih terjaga. Bank Indonesia memprakirakan neraca pembayaran maupun neraca perdagangan akan mencatatkan surplus untuk tahun 2020 sementara defisit transaksi berjalan lebih terkendali. Penguatan transaksi berjalan disebabkan oleh penguatan ekspor di tengah penurunan impor akibat permintaan domestik yang masih lemah. Posisi cadangan devisa kita pun cukup aman dengan nilai sekitar 135 miliar dolar AS pada akhir September 2020 atau setara dengan kecukupan 9 bulan impor, jauh di atas standar internasional sebesar 3 bulan impor. Arus modal dari luar negeri secara bertahap telah kembali masuk dengan potensi *inflow* yang masih terbuka. Hal ini didukung oleh *push factor* berupa membaiknya permintaan global terutama dari negara-negara maju dan *pull factor* yaitu fundamental ekonomi dalam negeri yang relatif masih lebih baik dibandingkan banyak negara *peers*, serta yang tak kalah penting adalah kredibilitas kebijakan ekonomi makro yang terjaga dengan baik, baik dari sisi fiskal dan moneter. Fundamental ekonomi ini terutama tercermin dari transaksi berjalan, posisi cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, serta *yield spread* SBN terhadap UST (US Treasury) yang lebih atraktif dibandingkan negara-negara *peers*.

Jalan ekonomi ke depan masih diliputi ketidakpastian yang cukup tinggi. Prospek ekonomi ke depan tentunya akan bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet 7 September 2020, *restart* ekonomi tergantung penanganan pandemi Covid-19. Belajar dari sejarah, untuk sektor keuangan, Anderson et al. (2020) yang meneliti tentang dampak dari *liquidity support* bank sentral pada masa pandemi flu Spanyol 1918 menunjukkan bahwa pandemi tersebut hanya menyebabkan disrupsi jangka pendek terhadap sektor keuangan, sehingga hal utama yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pengelolaan utang baik pada level global maupun nasional, serta pentingnya upaya menjaga kredibilitas kebijakan baik fiskal maupun moneter, karena peran kredibilitas krusial dalam menarik kembali kepercayaan arus modal luar negeri.

Pandemi Covid-19 juga telah memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga secara nasional dibutuhkan pula strategi kebijakan ekonomi yang

lebih inklusif untuk mengawal perkonomian memasuki era *new normal*. Beberapa perspektif kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut (Juhro, 2020). *Pertama*, mengupayakan *dynamic optimization with multiple constraints*. Penanganan krisis kesehatan dan ekonomi harus optimal berjalan beriringan dengan memerhatikan *speed*, keseimbangan, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas implementasi. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa fokus penanganan kesehatan dalam jangka pendek memegang peranan yang sangat vital. *Kedua*, memperkuat *timing* dalam mengatasi *supply-demand racing*. Dalam jangka pendek stimulus fiskal memegang peranan kunci dalam merespons tekanan sisi permintaan, dengan harapan akan diikuti perbaikan sisi penawaran. Selanjutnya, diharapkan stimulus moneter dan keuangan akan bekerja untuk mengakselerasi kegiatan sektor riil lebih lanjut. *Ketiga*, memperkuat sinergi dan terobosan (*breakthrough*). Langkah penyelamatan perekonomian perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengawal penerapan tatanan kehidupan baru untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. Oleh karenanya, dalam era *new normal* kita perlu merumuskan berbagai opsi strategi kebijakan yang tepat, sehingga sekaligus dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. *Keempat*, membangun strategi untuk memperkuat ketahanan sistemik. Ke depan kita hidup dalam kondisi ketidakpastian dan suatu sistem yang semakin dinamis, saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu, kita membutuhkan suatu wawasan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk membuat gambaran realistik tentang bagaimana suatu sistem (ekonomi) terbentuk. *Kelima*, memperkuat strategi komunikasi. Komunikasi secara efektif oleh para pemimpin amatlah penting untuk mengelola kredibilitas suatu kebijakan, tidak hanya sekedar meningkatkan transparansi. Walau tidak terdapat pendekatan yang baku mengenai bagaimana baiknya strategi komunikasi dilaksanakan, namun tetap diperlukan komunikasi yang bijaksana dan mampu mencerminkan perhatian dari pemimpin dalam mengikuti situasi dan menyesuaikan respons ketika mereka telah belajar lebih banyak.

Dengan memperhatikan perspektif kebijakan di atas, langkah-langkah kolektif untuk memperkuat tatanan kelembagaan, menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi makro, dan penguatan koordinasi kebijakan tingkat nasional (*national policy mix*) menjadi *sufficient condition* dalam mendukung pemulihan ekonomi dan mengawal era *new normal*. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga independensi bank sentral, yang oleh Gubernur BI disebutkan sebagai “independensi dalam interdependensi”. Strategi kebijakan nasional juga difokuskan pada penciptaan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi berbasis pada *endowment* nasional dan melibatkan peran masyarakat luas, seperti pemberdayaan ekonomi UMKM dan ekonomi syariah serta ekonomi kreatif dan inovatif, terutama dalam bentuk inovasi frugal.

#### 4. Penutup

Beberapa perspektif kebijakan yang disampaikan di atas adalah sejalan dengan pemikiran buku kajian sebelumnya (ISEI, 2020) mengenai model pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menekankan pada upaya untuk faktor produksi seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbanyak peran infrastruktur, serta memperluas penguasaan teknologi digital dan inovasi. Model pertumbuhan tersebut juga didukung oleh penguatan kelembagaan serta peningkatan ketahanan pangan dan energi sebagai elemen pendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Adapun respons untuk memperkuat model pertumbuhan ekonomi juga didukung penajaman strategi kebijakan di lima area strategis, yakni pengelolaan kebijakan makroekonomi yang disiplin dan sehat, pengembangan sektor unggulan, kebijakan memperkuat UMKM, kebijakan meningkatkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, serta kebijakan untuk memperkuat sumber pembiayaan.

Pemikiran yang lebih komprehensif dan juga komplementatif dengan pemikiran tersebut adalah bahwa untuk menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, paradigma pembangunan ekonomi nasional juga perlu “di-reset”, atau lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi, yang tentunya berjalan paralel dengan upaya penanganan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Paradigma dimaksud terutama menitikberatkan pada azas inklusivitas secara *holistic* guna mengurangi disparitas dimaksud, yang secara khusus ditujukan melalui pengembangan infrastruktur dan perluasan pelayanan publik, pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat luas (kerakyatan), dalam hal ini melalui langkah penguatan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), percepatan digitalisasi dan penguatan inovasi, pengembangan modal manusia (SDM), serta penguatan faktor kelembagaan inklusif, yang kesemuanya berbasis pada potensi perkembangan ekonomi digital serta sejalan dengan prinsip *less-contact economy* di era kenormalan baru ke depan.

*Last but not least, new normal* dapat pula diartikan sebagai *new forms of leadership*, dengan kehandalan dalam mengambil keputusan strategis, mengorkestrasi ilmu pengetahuan dan inovasi dari sumber daya manusia usia produktif dalam upaya untuk menavigasi era digital, serta melakukan komunikasi publik secara efektif di masa krisis. Pokok-pokok pemikiran tersebut di atas akan diuraikan secara lebih detail dan mendalam pada bab-bab berikutnya buku ini.



## Bab II

# STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

### 2.1. Pendahuluan

Tantangan perekonomian saat ini semakin berat dengan terjadinya pandemi Covid-19. Penanganan penyebaran pandemi melalui pembatasan mobilitas telah berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi. Pada awalnya, pandemi Covid-19 memengaruhi kinerja sektor pariwisata, seperti usaha perhotelan, restoran dan penerbangan. Selain itu, aktivitas perdagangan internasional baik ekspor maupun impor turut terganggu karena terputusnya mata rantai suplai global. Seiring penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin meluas, aktivitas produksi juga mulai terhambat, termasuk kegiatan UMKM dan sektor informal. Di samping itu, pandemi Covid-19 juga telah memengaruhi keyakinan pelaku ekonomi sehingga menekan kegiatan konsumsi dan investasi. Perkembangan tersebut menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan peningkatan tingkat pengangguran.

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah menekan perekonomian Indonesia. Pada triwulan I 2020, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif 2,97% (yoy), meskipun jauh di bawah rata-rata historis pertumbuhan di kisaran 5,00% (yoy). Seiring penyebaran pandemi Covid-19 yang semakin cepat dan meluas ke berbagai wilayah Indonesia serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah, aktivitas ekonomi di berbagai sektor mengalami pelemahan yang dalam, terutama pada bulan April-Mei 2020. Perkembangan ini kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontraksi -5,23% (yoy) pada triwulan II 2020.

Meski demikian, tanda-tanda perbaikan telah terlihat. Pertumbuhan ekonomi nasional telah membaik sejak triwulan ketiga tahun 2020, walau masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2021. Momentum pemulihan ekonomi ini perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi untuk membangun optimisme oleh seluruh pemangku kebijakan. Perbaikan juga terindikasi mulai terjadi secara substansial pada indikator makro ekonomi global, meskipun pada saat yang sama masih dihadapkan pada tantangan proses pemulihan yang belum merata (*uneven*), diliputi ketidakpastian (*uncertain*), dan terbatas pada sektor-sektor tertentu (*incomplete*). Oleh karena itu, diperlukan kerja keras

untuk memastikan agar sinyal positif ini terus terjaga dan dipelihara agar tidak menimbulkan risiko lebih lanjut bagi kesehatan dan ekonomi nasional. Kedepan, pembukaan sektor ekonomi yang memberi nilai tambah besar bagi pertumbuhan dan relatif aman dari pandemi Covid-19 secara bertahap menjadi langkah yang sangat penting. Penetapan prioritas dapat dimulai dengan peta risiko penularan Covid-19 di 52 sektor ekonomi yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana - BNPB, dengan prioritas tertinggi diberikan pada sektor-sektor dengan risiko penularan terendah, diikuti oleh sektor-sektor dengan risiko menengah atau tinggi yang memerlukan penerapan protokol Covid-19 sesuai tingkat risikonya. Sementara itu, prioritasasi berdasarkan dampak ekonomi dapat diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB dan/ atau ekspor.

Penyebaran pandemi Covid-19 yang masih terindikasi meningkat dan penerapan berbagai kebijakan yang terkait protokol kesehatan untuk penanganan pandemi baik selama maupun pasca relaksasi PSBB dapat semakin menurunkan kapasitas produksi di berbagai sektor ekonomi. Bila kondisi ini berlanjut, maka volume produksi barang dan jasa di berbagai sektor dapat semakin menurun dan akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, belum beredarnya vaksin secara nasional dan masif, juga dapat memengaruhi penurunan keyakinan pelaku ekonomi serta semakin menekan kegiatan konsumsi dan investasi. Pemulihan ekonomi yang tidak sesuai harapan kemudian dapat memengaruhi kinerja sektor keuangan dan stabilitas sistem keuangan serta juga stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Untuk menahan pelemahan ekonomi yang lebih dalam dan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian, kebijakan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada satu instrumen. Dalam kaitan ini, sinergi kebijakan makroekonomi, baik fiskal, moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam satu bauran kebijakan nasional yang terintegrasi sangat diperlukan agar resiliensi ekonomi tetap terjaga. Selain itu, sinergi kebijakan juga diperlukan untuk merespons berbagai perubahan struktural yang terjadi akibat pandemi Covid-19 dan berpotensi mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi yang pernah ditempuh sebelumnya. Terkait dengan hal ini, arah dan strategi kebijakan ekonomi perlu diperkuat dan dioptimalkan agar dapat secara cepat dan efektif merespons perubahan struktural sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan di jangka menengah panjang.

Dalam merespons dampak pandemi Covid-19, otoritas di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menempuh berbagai kebijakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary actions*). Hal ini dilakukan dengan memberikan stimulus kebijakan baik moneter maupun fiskal dalam skala yang besar untuk mengatasi masalah kesehatan akibat pandemi dan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan. Strategi kebijakan ini juga berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu di ambil, yang bahkan belum pernah ditempuh sebelumnya atau berada di luar mandat institusi. Namun demikian, berbagai kebijakan *extraordinary* yang ditempuh tersebut tetap perlu dilakukan dengan disiplin dan berhati-hati (*prudent*) serta secara terukur mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian baik di masa pandemi maupun setelahnya.

Untuk tetap menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan yang bersifat *extraordinary*, terutama yang merupakan perluasan dari mandat institusi, maka perlu adanya dukungan dengan landasan hukum yang kuat. Dalam konteks Indonesia, untuk memitigasi dampak Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. PERPPU tersebut bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perkembangannya, PERPPU tersebut telah disahkan menjadi UU No. 2/2020.

Penerbitan ketentuan tersebut merupakan langkah awal dan menjadi landasan hukum agar Pemerintah serta otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah *extraordinary* secara cepat namun tetap mengedepankan akuntabilitas untuk penanganan pandemi. Upaya yang komprehensif dan cepat sangat diperlukan mengingat penyebaran Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Di samping itu, terdapat ketidakpastian mengenai luasnya penyebaran serta panjangnya periode pandemi yang juga dapat berpengaruh negatif terhadap stabilitas perekonomian dan sistem keuangan.

Dalam perspektif implementatif, strategi kebijakan tersebut dapat dibagi dalam beberapa timeframe rekomendasi kebijakan, yaitu: (i) Strategi kebijakan jangka pendek, antara lain melalui penguatan pada kebijakan kesehatan dalam masa transisi, mendorong daya beli masyarakat,

akselerasi stimulus fiskal; (ii) Strategi jangka menengah-panjang, antara lain dengan mendorong keberhasilan implementasi PEN pada sektor-sektor potensial, relaksasi ketentuan untuk mendukung perbaikan ekspor serta mendorong digitalisasi dalam memudahkan transaksi keuangan; dan (iii) Melanjutkan reformasi struktural ekonomi, antara lain melalui pemulihan kegiatan investasi dan iklim usaha yang kondusif, penguatan stabilitas sistem keuangan, penguatan struktur fiskal, serta mendorong upaya penggalan sumber-sumber pertumbuhan baru ekonomi .

## **2.2. Strategi Kebijakan Jangka Pendek**

*Extraordinary circumstances* pada akhirnya memerlukan *extraordinary measures*. Pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu 1/2020 tersebut merupakan dasar hukum yang digunakan oleh otoritas untuk mengatasi kondisi yang genting bagi perekonomian dengan melakukan langkah-langkah antisipatif dan luar biasa.

Dalam jangka pendek, arah kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 secara umum perlu diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang ditempuh perlu diarahkan pada dua aspek, yakni pemulihan dan percepatan. Upaya pemulihan perlu segera dilakukan karena akan menjadi basis bagi keberlangsungan ekonomi. Dalam kaitan ini, pemulihan tidak hanya diarahkan kepada upaya pemulihan kesehatan, tetap juga pada upaya memperkuat kembali sendi-sendi perekonomian yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan untuk pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut perlu ditempuh oleh semua pemangku kebijakan, melalui sinergi kebijakan yang kuat antara kebijakan fiskal, kebijakan bank sentral kaitannya dengan kebijakan moneter-makroprudensial-sistem pembayaran, dan kebijakan struktural. Sejalan dengan itu, sinergi kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai dua pilar utama pendukung kesinambungan perekonomian, yakni pilar stabilitas perekonomian dan pilar pertumbuhan ekonomi. Terkait pilar stabilitas perekonomian, kondisi yang diharapkan ialah tidak hanya stabilitas internal dan eksternal, tetapi juga stabilitas sistem keuangan. Untuk pilar

pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan ditujukan tidak cukup hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan struktur pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan inklusif.

Guna meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus fiskal dengan nilai mencapai 33 triliun Rupiah. sebagai langkah awal memitigasi dampak Covid-19 pada perekonomian. Stimulus yang terdiri dari stimulus jilid I dan jilid II difokuskan pada insentif perpajakan, insentif nonfiskal, insentif belanja, bantuan sosial, serta jaminan ketersediaan bahan pangan. Stimulus jilid I yang ditempuh pada saat awal merebaknya Covid-19 ditujukan untuk memberikan insentif bagi dunia usaha yang terdampak Covid-19 dengan tetap mendukung konsumsi. Seiring meluasnya dampak Covid-19, Pemerintah mengumumkan stimulus jilid II melalui relaksasi perpajakan untuk mendorong belanja dan daya beli, relaksasi nonfiskal untuk mendorong lalu lintas perdagangan, serta kebijakan pangan untuk memastikan pasokan.

Melengkapi stimulus fiskal jilid I, dan II, Pemerintah juga mengeluarkan stimulus fiskal jilid III dengan total insentif diperkirakan sebesar 405,1 triliun Rupiah. Stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan bagi industri usaha yang terdampak, dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Terkait PEN, Pemerintah memberikan subsidi bunga bagi kelompok pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 dan telah melakukan restrukturisasi kreditnya pada perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta perusahaan pembiayaan. Di samping itu, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga/margin untuk kredit atau pembiayaan milik UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dan penjaminan pemerintah atas pemenuhan kewajiban finansial UMKM yang meliputi pokok dan bunga. Selain itu, Pemerintah juga menempatkan sejumlah dana pada Bank Peserta untuk dukungan likuiditas dalam restrukturisasi kredit/pembiayaan dan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada UMKM dan Koperasi.

Pada perkembangan berikutnya, memerhatikan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan adanya kebutuhan penanganan pandemi, serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 diperkirakan akan lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 yakni dari 5,07% PDB menjadi 6,34%. Kondisi ini disebabkan pendapatan negara diperkirakan akan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya akibat perlambatan ekonomi. Sementara itu, belanja negara diperkirakan akan lebih tinggi terkait dengan pemberian stimulus perekonomian termasuk tambahan kebutuhan untuk

program pemulihan ekonomi. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian APBN 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Penerbitan ketentuan baru tersebut ditujukan untuk mengakselerasi belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19 dan PEN melalui pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran.

Dari sisi bank sentral, bauran kebijakan Bank Indonesia terus dioptimalkan guna tetap menjaga stabilitas perekonomian dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan bank sentral juga diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai peluang di era peradaban baru dan sekaligus meminimalkan risiko yang dapat muncul. Bauran kebijakan Bank Indonesia meliputi kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan utama ini didukung oleh kebijakan lain seperti kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan internasional, serta kebijakan ekonomi keuangan syariah. Berbagai instrumen di tiap kebijakan dapat pula dioptimalkan sehingga diperoleh bauran kebijakan yang efektif untuk mencapai tujuan akhir.

### **2.3. Strategi Kebijakan Jangka Menengah-Panjang**

Dalam jangka menengah, arah kebijakan makroekonomi perlu terus diarahkan pada penyesuaian strategi kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan memitigasi risiko atas perubahan struktural. Dalam kaitan ini, strategi kebijakan ekonomi termasuk untuk beradaptasi dengan penetrasi digitalisasi yang cepat, yang mengubah perilaku perekonomian secara keseluruhan. Aspek penyesuaian ini perlu diarahkan pada upaya untuk kembali membawa ekonomi ke dalam lintasan jangka panjangnya menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan.

Kebijakan jangka menengah-panjang juga perlu diarahkan pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi melalui berbagai transformasi kebijakan ekonomi. Transformasi ekonomi tersebut termasuk dalam upaya meningkatkan nilai tambah perekonomian dengan melakukan diversifikasi pertumbuhan ekonomi dan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di berbagai sektor perekonomian, serta memanfaatkan tren digitalisasi di semua aspek kehidupan.

Upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian perlu ditopang oleh kebijakan makroekonomi yang disiplin

dan berhati-hati. Dalam kaitan ini, pengelolaan kebijakan makroekonomi yang sehat, baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta ditopang kebijakan makro-mikroprudensial, perlu terus dijaga dan diperkuat dengan sinergi antar pemangku kebijakan. Kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan defisit APBN dan tingkat utang tetap berada dalam koridor yang sehat. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan, melalui kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lain, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas. Berbagai kebijakan struktural juga tetap ditempuh oleh para pengambil kebijakan guna mempercepat peningkatan kapasitas perekonomian dalam jangka panjang dan mendukung transformasi perekonomian.

Kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah diarahkan untuk kembali memperkuat prospek kesinambungannya, dengan tetap memberikan stimulus pada perekonomian. Upaya memperkuat kesinambungan fiskal menjadi penting karena tidak hanya untuk meminimalkan risiko fiskal, tetapi dalam jangka menengah dapat kembali memperluas ruang fiskal dalam memberikan stimulus kepada ekonomi. Stimulus fiskal terutama ditujukan kepada sektor yang lebih produktif dan memberikan dampak pengganda yang besar dalam perekonomian seperti belanja untuk infrastruktur dan belanja pendidikan untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Belanja infrastruktur cukup penting untuk terus dilakukan karena sesuai studi empiris menunjukkan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas perekonomian, tetapi juga berkontribusi dapat menurunkan tekanan inflasi.

Dalam jangka menengah, arah kebijakan fiskal ditujukan untuk memobilisasi pendapatan dengan tetap mendukung penguatan iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan. Penerimaan negara dilakukan dengan lebih optimal guna mendukung belanja negara, dengan tetap memberikan insentif bagi dunia usaha. Kualitas belanja ditingkatkan dengan pengalihan belanja dari yang bersifat konsumtif ke belanja yang produktif. Sementara itu, pembiayaan defisit diarahkan agar tidak hanya tergantung pada instrumen tertentu, namun juga kepada skim pembiayaan lainnya, termasuk instrumen pembiayaan kreatif terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah perlu terus memfokuskan strategi pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya meningkatkan penerimaan pajak sangat penting karena merupakan sumber utama penerimaan negara dan juga dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong

peningkatan iklim investasi dan daya saing. Dalam kaitan ini, kebijakan perpajakan perlu diarahkan pada upaya penggalian sumber pendapatan negara dengan mendorong tingkat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui reformasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Selain itu, Pemerintah perlu terus melanjutkan implementasi reformasi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) untuk optimalisasi penerimaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta penggunaan teknologi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak.

Dari sisi belanja negara, strategi perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif mendukung program prioritas. Langkah peningkatan kualitas belanja ditempuh melalui optimalisasi anggaran pada belanja produktif, penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, sinergi belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Belanja negara yang produktif diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial. Strategi belanja negara perlu ditopang pula oleh penguatan efisiensi belanja. Penguatan efisiensi belanja berlanjut dengan mempertimbangkan nilai uang (*value of money*), yaitu nilai guna yang didapatkan dari setiap uang yang dibelanjakan.

Dari sisi bank sentral, strategi Bank Indonesia perlu tetap diarahkan kepada upaya stabilisasi nilai Rupiah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga menjadi syarat bagi upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Upaya ini perlu diperkuat dengan peran kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang menjadi tambahan syarat perlu yang juga patut diperkuat Bank Indonesia guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.4. Melanjutkan Agenda Reformasi Ekonomi**

Dalam kondisi yang mulai membaik, kebijakan struktural perlu kembali ditempuh guna mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penguatan struktur ekonomi melalui peningkatan faktor input, yakni produktivitas, sumber daya manusia, dan kapital. Produktivitas atau yang lazim diukur dengan *total factor productivity* (TFP) perlu ditingkatkan agar berada di atas rata-rata produktivitas yang telah dicapai selama ini. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain, perbaikan infrastruktur, reformasi struktural, dan penguatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi, serta penguatan institusi.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat di atas rata-rata juga perlu didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan baik formal maupun melalui pelatihan (vokasi) sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. Kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja memegang peranan penting dalam peningkatan daya saing. Mengingat besarnya kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang-bidang tertentu, upaya untuk pemenuhannya dalam waktu cepat perlu segera dilakukan. Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kualitas SDM. Hal ini diperlukan mengingat kemajuan industri nasional, yang antara lain ditandai dengan penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi, otomasi dan produktivitas yang tinggi, serta penggunaan teknologi maju, hanya bisa dilakukan oleh SDM yang memiliki ketrampilan tinggi.

Dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah perlu membangun sistem pendidikan dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara luas. Hal ini diperlukan untuk mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) yang dapat menopang inovasi produk maupun perbaikan proses produksi. Pemerintah juga perlu terus mendorong *link and match*, yakni menghubungkan dan mencocokkan kebutuhan SDM dunia usaha dengan SDM yang dihasilkan oleh sekolah dan perguruan tinggi, antara lain melalui sekolah vokasi yang sejalan dengan kebutuhan industri.

Dari sisi kapital, upaya penguatan diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peningkatan pertumbuhan stok kapital yang tinggi dapat dicapai melalui investasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta. Dalam kaitan ini, berbagai kebijakan untuk menarik dan mempermudah investasi perlu dilakukan untuk mendorong investasi swasta. Peningkatan akumulasi kapital antara lain ditopang oleh investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Dalam kaitan ini, Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan daya dukung infrastruktur, terutama konektivitas dan penyediaan energi.

Peningkatan kapasitas infrastruktur konektivitas juga perlu diarahkan untuk mendukung penguatan sistem transportasi dan logistik nasional agar menjadi lebih efisien yang pada gilirannya akan meningkatkan TFP. Hal tersebut akan meningkatkan daya saing sehingga berdampak positif dalam pengembangan industri nasional. Peningkatan konektivitas juga untuk mendorong keterhubungan antardaerah dan mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata. Pembangunan infrastruktur ini perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas, misalnya dengan mengaitkannya dengan pembangunan kawasan industri atau pun kawasan ekonomi khusus,

sehingga infrastruktur akan dapat langsung dimanfaatkan oleh industri. Sementara itu, peningkatan infrastruktur energi akan menambah kapasitas penyediaan energi sehingga mendorong biaya energi menjadi lebih murah dan berdampak positif bagi daya saing industri.

Dalam strategi implementasinya, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan impor karena akan memengaruhi defisit transaksi berjalan. Penggunaan konten impor selain dapat memperburuk defisit transaksi berjalan, juga tidak mendorong berkembangnya industri lokal akibat *demand* yang kurang. Dalam konteks ini, maka penggunaan konten lokal perlu menjadi prioritas, namun dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan. Pembangunan infrastruktur yang besar sebisa mungkin menumbuhkan *value chain* bagi produk lokal agar menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia.

Pada masa pandemi, akselerasi pemanfaatan digital meningkat secara pesat, terutama pada pasar PSBB di mana aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada *platform digital*. Dalam jangka menengah, peran teknologi digital, baik berupa industri 4.0 maupun ekonomi keuangan digital, perlu terus diperkuat. Industri 4.0, yang ditandai dengan otomasi dan digitalisasi proses produksi, diperkirakan akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian secara signifikan. Sementara itu, kebijakan untuk penguatan peran ekonomi dan keuangan digital perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (i) perlu *interlink* yang kuat antara keuangan digital dan ekonomi digital agar tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan perekonomian secara keseluruhan, (ii) perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara *end-to-end*, (iii) kolaborasi antara bank dan fintek perlu diperkuat dan diperluas, (iv) perlu penguatan regulasi, *entry-policy*, pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital, (v) keterbukaan ekonomi perlu memperhatikan prinsip *national interest*, dan (vi) perluasan akseptasi digital perlu terus didorong.

Selain itu, kebijakan untuk penajaman inovasi juga perlu ditempuh agar peringkat inovasi Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini diperlukan karena inovasi berperan penting dalam meningkatkan *technological progress* atau TFP sehingga menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan produk yang berkualitas. Upaya mendorong inovasi dapat dilakukan dengan menggalakkan penelitian dan pengembangan, serta perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) sebagai insentif untuk menjaga inovasi berkelanjutan. Selain pemerintah, peran swasta dalam peningkatan produktivitas juga sangat diperlukan untuk melengkapi upaya pengembangan

sumber daya manusia secara luas. Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak untuk perusahaan yang melakukan pengembangan pegawai dan *research* juga dapat mendorong peningkatan *training and research budget* perusahaan.

Kebijakan struktural juga perlu didukung konsistensi Pemerintah dalam menyederhanakan regulasi. Penyederhanaan regulasi juga ditempuh oleh Pemerintah melalui rancangan *omnibus law*. Penyederhanaan regulasi akan difokuskan pada penerbitan UU Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Upaya simplifikasi tersebut penting untuk dilakukan, guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang dapat menghambat upaya percepatan transformasi ekonomi.

## **2.5. Penguatan Modalitas Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi akan selalu diarahkan untuk meningkatkan ketahanan domestik yang ditunjukkan dengan kemampuan pengelolaan sumberdaya barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Produktivitas akan mendukung stabilitas ekonomi dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Hasilnya, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan begitu juga penyehatan transaksi berjalan. Pembangunan ekonomi setidaknya meliputi aspek *supply* dan *demand* yang berperan dalam membentuk pasar. Interaksi diantara keduanya akan berjalan baik dengan lingkungan yang mendukung, baik itu tercermin dari aspek kebijakan yang ramah terhadap iklim usaha maupun kebijakan pengembangan sektor potensial yang terarah, khususnya di Indonesia yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pengelolaan sumberdaya ekonomi tersebut memegang peranan penting antara lain untuk memasok bahan baku industri maupun menghasilkan produk turunan yang memiliki potensi ekspor. Statistik menunjukkan, pada periode 2015 – 2019 pengelolaan pangan menunjukkan capaian produksi yang meningkat sebesar 4.7% (yoy) untuk Padi, 15.2% (yoy) untuk jagung, dan 15% (yoy) untuk daging. Produksi perikanan tangkap, termasuk di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga meningkat mencapai 6.9 juta ton (yoy) pada tahun 2017. Produksi perikanan budidaya juga meningkat menjadi 16.1 juta ton (yoy) dan 10.4 juta ton (yoy) untuk rumput laut.

Kualitas kehidupan masyarakat juga meningkat dengan akses ke sumber energi yang lebih baik. Hal ini terlihat dari rasio elektronifikasi yang telah mencapai 98,3 % pada kuartal III taun 2018. Capaian ini didukung perluasan

jaringan distribusi listrik, serta pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk melalui pembangunan EBT skala kecil, penerapan smart grid, dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Potensi Indonesia dalam subsektor Energi Baru Terbarukan (EBT) cukup besar, Indonesia memiliki potensi panas bumi 11 Giga Watt (GW), angin 60.6 GW, bioenergi 32.6 GW, air dan mikrohidro 94.3 GW, surya 207.8 GW dan laut 17.9 GW. Secara total ada sekitar 442 GW potensi EBT yang kita miliki dan hanya baru diutilisasi sebesar 2.1 % atau 9 GW.

Kemudian potensi yang tidak kalah menjanjikan adalah subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini ada sekitar 3.8 miliar barel. Belum termasuk sisa cekungan yang belum dieksplorasi sebanyak 74 cekungan yang diperkirakan menyimpan potensi minyak 7.5 miliar barel. Selain minyak, Indonesia tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135.55 triliun standard cubic feet (TSCF). Cadangan gas tersebut tersebar di beberapa lokasi dengan pembagian P1 atau yang terbukti sebesar 99.06 TSCF, P2 atau cadangan potensi sebesar 21.26 TSCF dan P3 yang disebut cadangan harapan sebanyak 18.23 TSCF.

Pada subsektor minerba, cadangan batu bara terbukti kini meyentuh 39.89 miliar ton. Sementara cadangan komoditas tembaga sebesar 2.76 miliar ton. Jumlah tersebut diperkirakan sama dengan cadangan produksi bijih selama 39 tahun. Sedangkan untuk cadangan komoditas nikel sebanyak 3.57 miliar ton dengan produksi tambang per tahun sebesar 17 juta ton bijih. Umur cadangan produksi bijih bahkan diperkirakan bisa sampai dengan 184 tahun. Mencermati hal ini kebijakan struktural dapat pula difokuskan kepada upaya meningkatkan nilai tambah perekonomian melalui pengembangan sektor manufaktur yang kuat. Arah kebijakan ini diperlukan karena akan menjadi kunci upaya percepatan transformasi ekonomi nasional. Percepatan transformasi ekonomi untuk menjadi negara industri yang bernilai tambah dan terintegrasi dilakukan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah sektor manufaktur. Pengalaman sejumlah negara *peers* menunjukkan peran ekspor manufaktur yang tinggi akan menghasilkan kontribusi pada surplus neraca barang yang besar dan mempercepat proses menuju negara maju. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia saat ini, maka peluang untuk bersaing dengan negara *peers* masih terbuka luas dan transformasi perlu dimulai sejak saat ini.

Penguatan manufaktur juga perlu diarahkan untuk mendukung integrasi antarwilayah (*end-to-end*). Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah inisiatif telah banyak dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kapabilitas industri dan kapasitas produksi, terutama di luar Jawa. Akselerasi pengembangan

nilai tambah industri melalui hilirisasi produk SDA diarahkan untuk mendorong penguatan integrasi ekonomi antardaerah, terutama antara Jawa dengan wilayah lainnya, sehingga akan mengurangi ketergantungan impor untuk mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan.

Transformasi manufaktur juga diharapkan dapat mendukung pembangunan yang inklusif, termasuk melalui pengembangan UMKM. Transformasi sektor manufaktur ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan memperbesar ukuran ekonomi serta mendorong pemerataan dan peningkatan peluang kerja secara inklusif. Dengan surplus tenaga kerja yang besar, pembangunan selain diarahkan pada pemerataan kesempatan kerja juga untuk mendorong penguatan kapabilitas dan inovasi yang tepat. Dalam kaitan ini, peningkatan peran manufaktur perlu didukung optimalisasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, melalui upaya memaksimalkan manfaat inovasi digital dan sekaligus meminimalkan dampak risikonya. Karakter ini bila dibangun dengan kuat maka akan dapat menciptakan nilai tambah yang besar dengan dampak lanjutan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Peran UMKM semakin relevan saat ini dalam menghadapi tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Banyak negara saat ini mengandalkan sumber pertumbuhan ekonomi domestik, termasuk UMKM. Selain itu, UMKM juga menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang cepat di berbagai wilayah dan sektor ekonomi daerah serta mendorong penguatan peran wanita dalam perekonomian. Untuk itu, pengembangan UMKM di Indonesia perlu terus didorong mengingat saat ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti tingginya inefisiensi, keterbatasan kemampuan kewirausahaan dan pengembangan usaha, serta keterbatasan akses pada inovasi (digital), keterampilan, dan akses pembiayaan.

Sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM ke depan dapat diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan adaptasi terhadap perubahan digital. Perkembangan digitalisasi yang pesat menawarkan peluang dan risiko bagi UMKM (*two side of the same coin*). Di satu sisi, digitalisasi memberikan peluang kepada UMKM untuk melakukan inovasi produk, layanan dan proses produksi serta meningkatkan akses pasar dengan biaya yang relatif rendah disertai pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen, dan lingkungan bisnis secara keseluruhan. Di sisi lain, digitalisasi juga memberikan tantangan bagi UMKM terkait dengan keterbatasan kemampuan untuk mengadopsi dan fleksibilitas untuk merespon perubahan dengan cepat.

Paparan diatas berimplikasi pada perlunya strategi kebijakan yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus penanganan kesehatan, dengan fokus antara lain:

- (i) Meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan di era new normal (*safeguard our lives*), yang mencakup memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan seraya upaya untuk menemukan vaksin di dalam negeri terus dioptimalkan. Kedepan perlu juga diperhatikan kemampuan distribusi vaksin di seluruh wilayah.
- (ii) Selain kesehatan, kebijakan penanggulangan juga perlu memperhatikan pencaharian/kehidupan (*safeguard our livelihood*), yang dapat menahan kontraksi lebih dalam pada sektor riil dan UMKM, serta kebijakan yang mendorong kemudahan iklim berusaha untuk mendukung pemulihan investasi dan kegiatan ekspansi industri.
- (iii) Mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru, dengan merujuk pada sector-sektor prioritas dan unggulan untuk mendorong daya saing ekspor, seperti ekonomi kreatif, pariwisata dan kemaritiman melalui implementasi teknologi dan informasi digital. Penggunaan aplikasi digital juga dapat dimanfaatkan untuk membangun linkage antara UMKM dan UMKM, serta UMKM dan industri.

*Last but not least*, dapat ditekankan bahwa optimalitas penerapan strategi tersebut harus didukung oleh penguatan dan sinergi antar daerah, pusat-daerah, pemerintah-swasta serta pengkapisialisasian modal sosial dan gotong royong yang menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat pada saat pandemi Covid-19. Dalam hal penyelamatan kemanusiaan, perlu terfokus pada seluruh kelompok yang *vulnerable* seperti mereka yang dibawah garis kemiskinan, kehilangan pekerjaan, dan gender perempuan.

## **BAB III**

# **PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI ERA NEW NORMAL: SUATU PEMIKIRAN**

### **3.1. Pendahuluan**

Sebagaimana diketahui, wabah Covid-19 adalah pandemi skala global pertama yang disebabkan oleh virus<sup>4</sup>, yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis dengan kerugian yang signifikan baik secara khusus di sektor kesehatan, namun juga menjalar ke hampir seluruh sektor ekonomi secara global, dan bahkan membesar menjadi krisis multidimensional serta diikuti dengan implikasi biaya sosial yang sangat tinggi. Pandemi Covid-19 ini juga telah mengingatkan kita dengan sangat jelas betapa rapuhnya sistem buatan manusia yang paling mendasar, yaitu kesehatan. Kondisi ini terlihat di awal masa pandemi, seluruh dunia mengalami masalah kekurangan masker, alat tes, ventilator dan barang-barang vital lainnya, sehingga berdampak vital pada masyarakat khususnya pekerja lapangan yang berada di garda terdepan, seperti: buruh pabrik, pekerja informal dll.) dan masyarakat umum terpapar/terinfeksi oleh virus tersebut, serta bahkan menimbulkan tingkat fatalitas yang tertinggi sepanjang sejarah di dunia<sup>5</sup>. Lebih lanjut, akibat pandemik ini adalah terganggunya (terhentinya) seluruh sistem produksi, keuangan, dan transportasi, sebagai akibat dari kombinasi guncangan yang dahsyat baik dari sisi penawaran dan permintaan. Dampak sosial-ekonomi akibat wabah virus ini tergolong sangat berat dan multi-dimensi, yang dapat menimbulkan risiko tinggi bagi stabilitas ekonomi dan politik nasional, khususnya sebagai akibat peningkatan ketimpangan/kesenjangan ekonomi.

Bab ini memaparkan rumusan paradigma baru pembangunan ekonomi inklusif di era kenormalan baru. Menyambung bagian pendahuluan ini, dua bagian selanjutnya memaparkan perubahan lingkungan strategis dan tantangan PADA masa pandemi di satu sisi, serta tinjauan modalitas yang dimiliki perekonomian nasional di sisi yang lain. Perubahan lingkungan strategis yang dihadapi perekonomian nasional antara lain melingkupi kondisi infrastruktur dasar dan pelayanan publik, pendidikan dan modal SDM, pemberdayaan ekonomi rakyat, kegiatan inovasi dan riset, serta faktor

---

<sup>4</sup> Spanish Flu terjadi pada 1930 namun hanya di Eropa dan Asia.

<sup>5</sup> Jumlah kematian 1,29 juta jiwa Per 13 November 2020 (sumber: Google Coronavirus (COVID-19) statistics data).

kelembagaan. Sementara itu, tinjauan terhadap modalitas perekonomian nasional mencakup kekayaan alam (SDA), modal budaya (*social capital*), populasi dan bonus demografi, serta potensi pengembangan ekonomi syariah. Bagian berikutnya memaparkan rumusan paradigma yang menjangkar lingkungan strategis dan modalitas perekonomian, terutama prioritas strategi kebijakan dalam mengawal era kenormalan baru. Bagian penutup memaparkan beberapa isu penting dalam mendorong keberhasilan implementasi dari strategi yang digunakan.

### **3..2. Perubahan Lingkungan Strategis dan Tantangan di Era Pandemi**

#### **3.2.1. Perubahan Lingkungan Strategis**

Sebagaimana diketahui bersama, dalam satu dekade terakhir pasca periode krisis keuangan global 2008/09 kinerja perekonomian Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif, pertumbuhan ekonomi tetap meningkat dan ditopang stabilitas ekonomi yang terjaga. Indikator kesejahteraan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan juga menurun. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari pengelolaan makroekonomi yang disiplin serta penguatan struktur ekonomi yang terus ditempuh secara konsisten.

Walaupun demikian, tantangan perekonomian ke depan tetap tidak ringan. Setelah diterpa krisis keuangan global 2008/09, ekonomi global cenderung tumbuh stagnan dan memasuki *a new norm*, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan tren jangka panjangnya. Kondisi pasar keuangan dunia juga masih diliputi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi. Banyak pihak menyebut bahwa dunia saat ini telah berubah dengan cepat dan telah memasuki lingkungan baru dengan *Volatility* (volatilitas), *Uncertainty* (ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas), dan *Ambiguity* (kerancuan) yang terus meningkat; dikenal dengan terminologi VUCA. Ke depan, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian dunia akan semakin berat dengan hadirnya revolusi teknologi dan digital, perubahan peta kekuatan perekonomian dunia, serta berbagai dinamika geopolitik global.

Tantangan yang sudah merupakan keniscayaan adalah pesatnya peningkatan peran teknologi digital dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia (trasformasi digital). Perkembangan ini perlu dicermati karena selain dapat berdampak positif dalam meningkatkan kenaikan efisiensi dan produktivitas perekonomian, teknologi digital juga dapat membawa disrupsi dalam perekonomian apabila tidak dikelola dengan baik. Perkembangan teknologi digital makin menambah tantangan bagi perekonomian yang

bersumber dari global dan domestik. Dari global, tantangan bersumber dari produktivitas yang menurun, kebijakan *inward looking* yang meluas, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Sementara tantangan dari domestik berhubungan dengan kinerja sektor industri pengolahan yang belum kuat, daya dukung infrastruktur yang masih terbatas, sumber pembiayaan domestik yang belum optimal, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus dikembangkan.

Permasalahan tidak berhenti disitu, karena dunia saat ini mengalami krisis kesehatan yang sangat dahsyat akibat penyebaran pandemi Covid-19 yang mulai muncul sejak akhir 2019 di China, sebagaimana telah dipaparkan dalam beberapa bagian sebelumnya. Dampak Covid-19 berpotensi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sosial, terutama bila pemerintah tidak hati-hati dalam membuat formulasi kebijakan. Sektor informal dan UMKM yang signifikan menyerap tenaga kerja merupakan yang paling terganggu oleh dampak pandemi Covid-19. Dalam pemikiran terkini, problem kesenjangan yang terjadi di tengah transformasi digital yang tidak terbendung memunculkan perlunya mewujudkan agenda pengaturan ulang secara masif untuk mengikis jarak sosial ekonomi dan tatanan politik dunia untuk kebaikan bersama, yang dikenal dengan terminologi '*great reset*' (WEF, 2020).

Berbagai perubahan lingkungan strategis tersebut perlu disikapi dan direspons dengan tepat sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan inklusif. Indonesia yang maju dan inklusif bermakna bahwa perekonomian Indonesia didukung stabilitas yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketahanan eksternal yang kuat, dan kesejahteraan masyarakat luas yang meningkat. Stabilitas perekonomian, baik stabilitas harga maupun stabilitas sistem keuangan, yang terjaga menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketahanan eksternal yang kuat yang tercermin pada neraca pembayaran surplus serta struktur pembiayaan luar negeri yang sehat, diperlukan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat berupa angka pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta ketimpangan antar kelompok pendapatan masyarakat dan antar wilayah di Indonesia yang mengecil, diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

### **3.2.2. Beberapa Tantangan Utama di Era Pandemi**

#### **(i) Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik**

Infrastruktur fisik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam suatu negara, terutama karena membantu “menjembatani” Bergeraknya roda

kegiatan ekonomi, dalam hal ini menghubungkan mobilitas barang dan jasa antar lokasi geografis, ataupun memberikan dukungan (prasarana) untuk terlaksananya aktivitas kegiatan antara manusia. Dari kaca mata ekonomi, infrastruktur fisik merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah, antara lain meliputi jalan, jembatan, dan pengairan dan lainnya (Mankiw, 2003). Todaro (2006) juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Secara empiris, sejumlah studi juga menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas *output* yang dihasilkan.

Namun demikian, meskipun telah disadari betapa pentingnya ketersediaan infrastruktur fisik untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kondisi infrastruktur di nusantara masih menghadapi sejumlah tantangan khususnya terkait pembebasan lahan, pendanaan, regulasi yang dirasa masih belum *investor-friendly*, dll. Dalam *Global Competitiveness Report 2019*, yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke-72 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur, atau relatif berada pada standar rata-rata. Kondisi ini juga mengindikasikan daya saing kita yang relatif belum sebaik dibandingkan dengan negara jiran khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand sebagai kompetitor dalam menarik investasi asing.

Selain infrastruktur terkait daya saing ekonomi dan investasi, infrastruktur fisik di bidang kesehatan dan pelayanan masyarakat (publik) juga sangat diperlukan, dan bahkan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan pembangunan kualitas SDM Indonesia. Sebagaimana diketahui, World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, infrastruktur kesehatan dapat dibagi menjadi infrastruktur kesehatan fisik dan pendukungnya serta infrastruktur kesehatan non fisik. Infrastruktur kesehatan fisik meliputi bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek obat, dan sebagainya, sedangkan infrastruktur fisik pendukung meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Infrastruktur kesehatan non fisik adalah ketersediaan tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, dan klinik, aksesibilitas, dan sebagainya.

Untuk mencapai tingkat kesehatan (angka harapan hidup dan IPM) yang tinggi, salah satu faktor kuncinya adalah ketersediaan infrastruktur kesehatan

yang memadai.<sup>6</sup> Akses menuju rumah sakit/puskesmas/klinik di Indonesia saat ini masih cukup terbatas, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 52,9 % rata-rata penduduk Indonesia merasa sulit/sangat sulit untuk mendapatkan akses ke rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (seperti: puskesmas/klinik). Namun, angka tersebut relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk perdesaan, yang menyatakan 85,4 % merasa sulit/sangat sulit untuk mengakses rumah sakit. Selain infrastruktur fisik, infrastruktur non fisik juga mempunyai peranan yang sangat vital untuk penyediaan pelayanan publik ini. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2019, terdapat 1,18 juta sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari 73,13 % orang tenaga kesehatan dan 26,87% orang tenaga pendukung kesehatan.<sup>7</sup>

Kondisi infrastruktur kesehatan yang relatif sangat terbatas tersebut, kemudian dengan terjadinya wabah serangan virus Covid-19 yang datang secara tak terduga dan menular secara cepat/masif, telah menyebabkan tidak tertampungnya lonjakan pasien di rumah sakit, dan bahkan tercatat sejumlah kasus fatalitas (kematian). Rasio tempat tidur rumah sakit dan dokter terhadap jumlah penduduk di Indonesia relatif sedikit dibandingkan dengan negara tetangga.

Terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan antar wilayah, yang membuat penanganan Covid-19 semakin sulit ketika kasus menyebar luas ke seluruh wilayah dan pedesaan.<sup>8</sup> Saat ini tingkat keterisian tempat tidur di Indonesia juga cukup tinggi. Dengan

---

<sup>6</sup> Salah satu *proxy* utama untuk melakukan pengukuran tingkat kesehatan suatu negara adalah angka harapan hidup. Ukuran ini merupakan salah satu dari tiga komponen dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup Indonesia pada tahun 2018 berada di angka 71,5 tahun, sedikit di atas Filipina yang berada di angka 71,1 tahun, sedangkan negara tetangga lain seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura berada di angka lebih besar dari 75 tahun. Selain itu, skor IPM Indonesia pada tahun 2018 sebesar 0,71 berada di peringkat 6 ASEAN, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nilai tersebut membuat Indonesia masuk dalam kategori pembangunan tinggi menurut United Nations Development Programme (UNDP).

<sup>7</sup> Proporsi terbanyak dari tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga keperawatan sebanyak 29,23% dari total tenaga kesehatan. Dari total tenaga kesehatan tersebut, terdapat sekitar 95 ribu dokter yang terbagi menjadi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pada tahun 2019 memiliki rasio +/- 0,35 dokter per 1000 penduduk; relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan Malaysia sebesar 1,5 dokter per 1000 penduduk; Singapura sebesar 2,3; dan Thailand sebesar 0,8.

<https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.PHYS.ZS>.

<sup>8</sup> Menggunakan indeks komposit dari 30 indikator kesehatan masyarakat, Suparmi dkk. (2018) menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat pembangunan sangat bervariasi antar provinsi, dengan nilai indeks berkisar dari 44 di Provinsi Papua hingga 65 di Provinsi Bali. Secara umum, provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki tingkat kesehatan dan layanan kesehatan yang di bawah standar. Selain antar provinsi, tingkat ketimpangan kondisi dan layanan kesehatan antar daerah di dalam suatu provinsi relatif tinggi.

membandingkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit dengan jumlah pasien isolasi, indikator *bed occupancy rate* (BOR) dapat dibuat untuk melihat seberapa tinggi kapasitas rumah sakit sudah terpenuhi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 5 September 2020, BOR di Indonesia berada di angka lebih dari 40 %. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali memiliki BOR tertinggi dengan angka di atas 80 %.

Penanganan pandemi ini tentu sangat membutuhkan peranan vital dari tenaga kesehatan, khususnya meliputi kegiatan operasional rumah sakit, dan penanganan pasien Covid-19. Dengan semakin meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia, maka beban tenaga keperawatan dan tenaga medis akan semakin berat, hingga tercatat sejumlah tenaga kesehatan juga turut menjadi korban.<sup>9</sup> Selain terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang ada, kekurangan alat pelindung diri untuk tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan juga masih dirasakan tenaga medis hingga saat ini.<sup>10</sup> Hal-hal tersebut berimplikasi pada bertambahnya kebutuhan penambahan infrastruktur fisik, terutama rumah sakit darurat untuk penanganan pasien. Selain itu, peningkatan keamanan dan keselamatan bagi tenaga medis yang terus menangani pasien Covid-19 juga semakin bertambah, agar ketahanan infrastruktur kesehatan Indonesia dalam menghadapi pandemi ini dapat dijaga dan ditingkatkan.

### **(ii) Basis Ekonomi Kerakyatan**

Sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan inklusif di tanah air. Berdasarkan piramida struktur pelaku usaha di Indonesia di dominasi oleh UMKM (99%), dengan kontribusi sebesar 62% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2018. UMKM Indonesia menyumbang hampir 97% pekerjaan rumah tangga dan 56% dari total investasi bisnis, dengan penyerapan lapangan kerja sebanyak 97% dari total angkatan kerja. Di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap ekspor belum dapat memberikan dampak yang signifikan yaitu baru mencapai 14% terhadap ekspor nasional. Konsern atau harapan utama dari keberadaan UMKM adalah bagaimana mengoptimalkan jumlah UMKM yang besar sehingga dapat berkontribusi secara lebih maksimal terhadap PDRB dan ikut mendukung penciptaan lapangan kerja.

Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh UMKM nasional, baik konvensional maupun syariah, adalah: (i) perluasan akses pasar: jangkauan

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200907133513-20-543596/idi-184-tenaga-kesehatan-meninggal-selama-pandemi-corona>.

<sup>10</sup> <https://jabar.idntimes.com/news/indonesia/ita-malau/ironi-pandemik-nakes-terus-berguguran-karena-apd-minim-dan-kelelahan-regional-jabar/2>

pasar sebagian besar UMKM adalah pasar lokal di tingkat kabupaten atau kota. Hanya sebagian kecil UMKM dapat menjangkau pasar di tingkat provinsi atau antar provinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas; (ii) keterbatasan kapasitas: UMKM umumnya menghadapi keterbatasan faktor-faktor produksi, khususnya faktor modal dan kemampuan manajerial. Hal ini tidak terlepas dari asal muasal UMKM yang berawal dari usaha mikro sehingga sangat bertumpu pada kemampuan perorangan; (iii) tantangan pembiayaan: keterbatasan modal UMKM seharusnya dapat dipenuhi dari pendanaan eksternal. Namun demikian masih terdapat gap antara UMKM dan lembaga pembiayaan formal, khususnya perbankan.

Memperhatikan tantangan/permasalahan UMKM tersebut, Pemerintah maupun lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga negara telah berupaya untuk menyusun kebijakan yang dapat mengatasi hal tersebut, dan dari kacamata UMKM juga diketahui bahwa kebijakan tersebut relatif bermanfaat dalam upaya mengatasi kendala dan kelemahan-kelemahan dalam meningkatkan produktivitas UMKM. Namun demikian, dalam upaya akselerasi kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi serta peningkatan nilai tambah UMKM bagi perekonomian nasional, UMKM dan pelaku usaha memandang masih terdapat ruang-ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan tersebut. Perbaikan dan penyempurnaan tersebut utamanya adalah untuk menjembatani gap antara kebijakan tersebut dan kondisi real UMKM.

Selain itu, besarnya populasi konsumen Muslim di Indonesia, UMKM yang bergerak di industri syariah memiliki potensi dan peluang yang sangat besar. UU no. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur mengenai kewajiban memiliki sertifikat halal, termasuk untuk UMKM serta program subsidi sertifikat halal dari KemenkopUKM dan Pemerintah Daerah Provinsi tertentu yang dapat menjadi landasan untuk UMKM syariah untuk semakin berkembang. Walaupun demikian, sebagian konsumen muslim Indonesia masih dianggap kurang memiliki *ownership* akan pentingnya konsumsi produk halal. Sementara itu, dari sisi pedagang/produsen, sebagian besar menyatakan masih terdapat kendala dalam melakukan proses Sertifikasi Halal. Banyak pengusaha UMKM yang merasa sertifikasi halal tersebut mahal biayanya, sehingga pelaku usaha enggan untuk mendapatkannya. Padahal, KemenkopUKM telah mengumumkan kebijakan sertifikasi halal tersebut gratis. Hal ini dapat mengindikasikan masih belum ada koordinasi yang baik antara kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi halal secara gratis dengan persepsi pelaku UMKM yang masih menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang memakan waktu dan biaya.

Di era pandemi saat ini, UMKM merupakan jenis usaha yang paling terkena dampak negatif dari krisis kesehatan ini dibandingkan dengan korporasi. Guncangan atau *shock* pada sektor UMKM terjadi melalui jalur pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi yang turut memperberat kendala klasik dalam pengembangan UMKM, yaitu pemasaran dan akses keuangan. Seiring dengan terjadinya pelemahan permintaan konsumsi masyarakat, omzet penjualan UMKM turut mengalami penurunan. Kendala perolehan *supply* bahan baku dan pembatasan distribusi akibat pembatasan sosial pada seluruh daerah berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan biaya pengiriman produk. Kendala UMKM pada kondisi pandemi ini pun menimbulkan penurunan pendapatan yang mengakibatkan terganggunya arus kas (*cashflow failure*) UMKM. Di sisi lain, kesulitan pembiayaan yang dialami pelaku UMKM mendorong terjadinya penurunan produksi, pengurangan alokasi biaya pemasaran dan pengurangan tenaga kerja yang masif.

### **(iii) Kegiatan Inovasi dan Riset**

Pentingnya inovasi bagi perekonomian suatu negara, secara teoretis mengacu kembali pada Schumpeter (1911), yang intinya menyatakan bahwa keberadaan inovasi memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pembangunan ekonomi, atau bukan sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan cenderung lebih merefleksikan peningkatan *output* yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para dunia usaha (melalui tenaga peneliti), dan bukan hanya sebagai implikasi dari perubahan teknologi, tetapi inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru atau penetrasi ke pasar baru. Dengan semangat kewirausahaan, dunia usaha yang inovatif mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, ataupun memperluas usaha yang telah ada. Penciptaan produk baru dan sekaligus menghancurkan produk lama sebagai implikasi dari kreativitas/inovasi iptek yang dikuasai oleh pihak swasta (korporat), teori ini sangat relevan dengan Teori Pertumbuhan Endogen (Romer, 1987; 1990) dimana unsur teknologi itu tidak dapat dijelaskan (hanya sebagai residual), tetapi bahkan dapat terus dikembangkan dan diperbaharui sejalan dengan adanya penemuan hasil riset yang baru. Teori pertumbuhan endogen menggarisbawahi pentingnya investasi dalam modal manusia, inovasi, dan pengetahuan merupakan kontributor signifikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa inovasi adalah mesin bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan produktivitas *output*<sup>11</sup>. Inovasi terutama berasal dari hasil riset yang memerlukan waktu, baik jangka menengah-panjang, yang dilakukan oleh peneliti yang andal/berkompetensi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengutip dari LIPI: “Tanpa riset, tak ada inovasi. Tanpa inovasi, bangsa akan sangat bergantung pada produk teknologi bangsa-bangsa lain”.<sup>12</sup> Selain itu, inovasi juga dapat menciptakan efisiensi dalam perekonomian, sehingga produk yang dihasilkan akan lebih bersaing untuk menembus pasar global. Hasil studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi endogen di Indonesia membuktikan peran penting kegiatan inovasi dan riset terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 50 tahun terakhir (Juhro et al, 2020a).

Bagi negara kita Indonesia, dengan struktur demografi yang mayoritas sekitar dua pertiga berada pada usia produktif, inovasi merupakan faktor penentu, agar jangan sampai masuk ke dalam *middle income trap* (jebakan kelas menengah). Bonus demografi yang kita miliki saat ini hingga tahun 2030/2035 nanti merupakan kesempatan emas yang seharusnya tidak boleh kita lewatkan saja, karena implikasinya akan sangat berat bagi generasi bangsa di masa depan. Selain faktor SDM, negeri kita juga diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, dan jika tidak diolah/ditingkatkan nilai tambahnya, sudah pasti akan membuat lemahnya daya saing kita. Pasar kita yang besar akan dibanjiri oleh produk manufaktur impor dengan nilai tambah tinggi, sementara kita ekspor komoditas mentah dengan nilai tambah yang rendah. Implikasinya, terlihat dari *current account* kita yang cenderung mengalami defisit yang persisten selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan *Global Innovation Index* di tahun 2020 ini menunjukkan peringkat Indonesia masih relatif rendah berada di posisi 85 dari 131 negara yang disurvei, atau belum banyak perubahan dari tahun 2017 yang berada di posisi 87. Bila dibandingkan khusus dengan negara berpendapatan menengah ke bawah, kita berada di posisi nomor 9 dari total 29 negara; dimana Vietnam menempati posisi 1 dan Filipina posisi 4. Kondisi ini tentu harus dicermati secara mendalam, karena implikasinya juga kepada daya saing kita, sebagaimana publikasi *Global Competitiveness Index* (2019) menempatkan Indonesia pada posisi 50 dari 141 negara.<sup>13</sup> Kelemahan inovasi

---

<sup>11</sup> Hasil studi World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2018 menyimpulkan bahwa kenaikan 1 % belanja penelitian dan pengembangan (litbang) akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % di negara-negara maju. Sedangkan di negara-negara berkembang, kenaikan 1 % belanja litbang akan memacu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), meski dengan persentase lebih kecil, yaitu antara 0,3 % dan 0,62 %.

<sup>12</sup> <http://lipi.go.id/lipimedia/riset-dan-inovasi-tak-terarah/16288>

<sup>13</sup> Sumber: World Economic Forum (WEF)

domestik terutama pada pilar kesiapan teknologi dan pilar inovasi. Indikator lain seperti kontribusi teknologi tinggi terhadap ekspor manufaktur juga masih rendah. Sumber daya Iptek yang meliputi pendanaan, jumlah dan kualitas peneliti dan perekayasa, hingga tingkat produktivitas Iptek yang berkaitan dengan paten dan publikasi ilmiah juga masih belum optimal.

Permasalahan lain terkait litbang dan inovasi adalah pendanaan yang masih sangat kecil, Indonesia menginvestasikan 0,24% dari PDB (2017) dan sebagian besar berasal dari pemerintah. Pesaing regional seperti: Vietnam (0,5%) dan Singapura (2,2%), sementara Australia (1,9%).<sup>14</sup> Meskipun pada Pasal 59 dalam Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan (UU Sisnas Iptek) telah mengamanatkan dana abadi penelitian sebagai salah satu sumber pendanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi, namun implementasinya saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, kurangnya sinkronisasi data penghitungan belanja litbang nasional. Dari Rp24,92 triliun dana riset pemerintah pusat pada 2016, hanya 43,74 % yang digunakan sebagai dana untuk penelitian. Selebihnya pendanaan digunakan untuk operasional, jasa iptek, belanja modal, dan pendidikan dan pelatihan (diklat). Kedua, belum ada mekanisme jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian. Sebagai ilustrasi, dana pemerintah pusat sebesar Rp24,92 triliun untuk riset tersebar di 81 Kementerian dan Lembaga (K/L), sementara hanya 13 K/L yang melakukan kegiatan litbang penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek. Ketiga, belum ada lembaga independen yang fokus mengelola pendanaan penelitian. Lembaga pendanaan riset nasional yang ada saat ini memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualitas. Keempat, selain karena keterbatasan ruang fiskal kendala juga terjadi karena riset belum merupakan prioritas dalam politik anggaran. Kelima, masih rendahnya kontribusi industri atau swasta pada kegiatan penelitian di Indonesia.<sup>15</sup>

Di era pandemi Covid-19 saat ini, akan sangat berpotensi menekan perkembangan/kinerja inovasi dan litbang nasional terutama dari sisi pendanaan, terutama mengingat sumber pendanaan riset/inovasi terbesar berasal dari keuangan pemerintah, yang pada saat ini lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi ini. Akan tetapi, di balik krisis kesehatan ini, sejatinya inovasi dan riset mempunyai peranan yang sangat vital untuk menjadi *champions* terutama di sektor kesehatan, transportasi, pangan, energi dan infrastruktur.

---

<sup>14</sup> Sumber: World Bank (2018) dan OECD (2018)

<sup>15</sup> Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1593486721.pdf>

#### **(iv) Pendidikan dan Modal Manusia**

Secara teoritis, modal manusia atau sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan utama dalam pembangunan ekonomi. Hal ini terutama karena modal SDM berbasis pada kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat direplikasi/dikembangkan tanpa batas ruang dan waktu.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu fokus utama pembangunan di Indonesia, dan hal ini terindikasi dari anggaran pemerintah untuk pendidikan telah meningkat pesat selama dua dekade terakhir, dengan mengalokasikan 20% untuk anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja pemerintah. Namun, bila dilihat dari rasio belanja pendidikan terhadap PDB, Indonesia hanya membelanjakan rata-rata 3% dari PDRB-nya untuk pendidikan selama lima tahun terakhir. persentase tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (4,1%); Malaysia (4,8%); dan Vietnam (5,65%).

Terlepas dari soal rasio belanja tersebut,<sup>17</sup> secara kuantitas, angka partisipasi sekolah di Indonesia berada di level yang cukup tinggi di antara negara ASEAN dengan angka partisipasi bersih sekolah dasar sebesar 97,6% dan 78,8% untuk sekolah menengah pada tahun 2018. Meskipun anggaran dan partisipasi pendidikan di Indonesia telah meningkat secara signifikan, namun dari segi kualitas, performanya masih perlu ditingkatkan lagi. Terlebih lagi jika mengacu dari hasil skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) untuk Indonesia tahun 2018 bidang literasi, matematika dan sains, Indonesia hanya mampu menempati posisi 70 dari 78 negara.<sup>18</sup> Jika tidak ada lompatan besar di bidang pendidikan, Indonesia dengan tren saat ini hanya akan mencapai skor rata-rata negara OECD dalam 50 tahun. Selain masalah anggaran yang masih relatif rendah, relatif rendahnya kualitas pendidikan nasional juga berkorelasi kuat dengan masih relatif rendahnya kompetensi guru. Hingga tahun 2018, masih sekitar 20% guru yang memiliki jenjang pendidikan di bawah Strata-1 (S1). Juga, masih banyak guru yang

---

<sup>16</sup> Berangkat dari Model Solow (1956), Romer (1987; 1990) membangun model pertumbuhan ekonomi endogen (*endogenous growth theory*) yang menitikberatkan pentingnya modal manusia di atas modal fisik kapital.

<sup>17</sup> Dengan adanya tambahan alokasi untuk pendidikan dimaksud, terjadi peningkatan alokasi sumber daya ke sekolah-sekolah dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan mendukung para orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Antara 2001 dan 2017, partisipasi sekolah meningkat sebesar 23 %, atau 10 juta siswa. Pada 2015, rata-rata lama sekolah berada di angka 8 tahun, meningkat dua kali lipat dibanding rata-rata lama sekolah pada tahun 1990.

<sup>18</sup> Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD (2019).

kekurangan pengetahuan mata pelajaran dasar dan keterampilan pedagogis untuk menjadi pendidik yang efektif.<sup>19</sup>

Di era pandemi Covid-19 saat ini, tantangan pengembangan SDM Indonesia semakin kompleks, kegiatan belajar mengajar yang tadinya dilakukan di sekolah harus untuk sementara diberhentikan. Kegiatan belajar mengajar yang dialihkan ke media daring ini menyebabkan timbulnya beberapa masalah baru, terutama ketersediaan jaringan internet, kesiapan guru dan murid dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, dan potensi putus sekolah bagi murid dari keluarga yang terkena PHK atau kehilangan mata pencaharian akibat pandemi ini. Kebijakan belajar dari rumah (BDR) sebagai respons dari pandemi Covid-19 memiliki dampak serius kepada siswa dan guru. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) berisiko menghambat bahkan menghentikan proses pembelajaran bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil karena keterbatasan akses internet dan biaya yang harus dikeluarkan setiap murid. Sekolah dan murid-murid yang tidak memiliki fasilitas memadai mengalami kesulitan melanjutkan proses belajar-mengajar. Hal tersebut berpotensi meningkatkan disparitas pendidikan. Kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia telah menyusun sejumlah kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi di sektor pendidikan, termasuk pembentukan kurikulum darurat, menggeser tahun ajaran baru, dan pemberian bantuan pulsa internet secara gratis.

Akses internet adalah hal yang vital bagi proses PJJ, kecepatan dan stabilitas koneksi dari internet menjadi prasyarat utama bagi pembelajaran jarak jauh yang efektif. Hal ini tentunya menjadi kendala apabila dilihat secara nasional. Banyak wilayah di Indonesia belum dijangkau oleh internet, bahkan sinyal komunikasi dan listrik pun belum mencapai di sejumlah daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).<sup>20</sup> Selain permasalahan akses internet, dampak Covid-19 pada perekonomian telah meningkatkan jumlah penduduk miskin.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Pada tahun 2012, pemerintah pusat memperkenalkan uji kompetensi bagi guru untuk menilai pengetahuan mata pelajaran dan keterampilan pedagogis mereka. Hampir tiga juta guru yang mengikuti tes pada tahun 2015 memiliki nilai rata-rata 53,02; di bawah target yang ditentukan yaitu 55. Pemberlakuan UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen mengarah pada pengenalan program sertifikasi guru yang menghubungkan kenaikan gaji dengan peningkatan kualifikasi dan keterampilan. Namun, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa efektivitas program ini relatif rendah.

<sup>20</sup> Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai 66% pada tahun 2018. Meskipun begitu, terlihat adanya disparitas yang cukup tinggi antara akses internet di pedesaan dan perkotaan yaitu 52% di pedesaan dan 78% di perkotaan pada tahun 2018. Disparitas akses tersebut dapat dilihat ketika membandingkan beberapa provinsi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki penetrasi internet sebesar 89%. Sedangkan masih ada beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia yang memiliki penetrasi internet di bawah 50%, dengan Provinsi Papua sebagai provinsi dengan tingkat penetrasi yang terkecil di angka 29%.

<sup>21</sup> Sebanyak hampir 2 juta penduduk pada Maret 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,42 juta orang dibanding 24,78 juta orang pada September 2019.

Terdapat potensi murid-murid sekolah yang akan putus sekolah karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membayar sekolah maupun karena bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Estimasi dari World Bank<sup>22</sup> memprediksi akan terdapat 91 ribu anak yang putus sekolah akibat *negative shock* Covid-19 terhadap pendapatan. Implementasi kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lapangan juga tidak mudah. Dalam praktiknya, banyak tenaga pengajar yang tidak dilatih dan tidak mengetahui cara penggunaan sarana pembelajaran daring. Selain itu, terdapat beberapa poin tentang pelaksanaan PJJ termasuk imbauan agar guru tidak terlalu membebani murid dengan capaian yang sesuai dengan kurikulum dan penilaian yang bersifat timbal balik menyesuaikan dengan kebutuhan murid.

#### **(v) Faktor Kelembagaan**

Faktor kelembagaan/institusi merupakan salah satu pilar utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Acemoglu dan Robinson (2012) menyimpulkan bahwa sukses atau gagalnya suatu negara bukan ditentukan oleh kebudayaan, iklim, geografi, tingkat kepatuhan pada kebijakan, ataupun agama, melainkan baik atau tidaknya pengelolaan kelembagaan ekonomi dan politik. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sangat besar kemungkinannya untuk terjadi dalam negara dengan kelembagaan yang inklusif, dibanding kelembagaan yang ekstraktif.

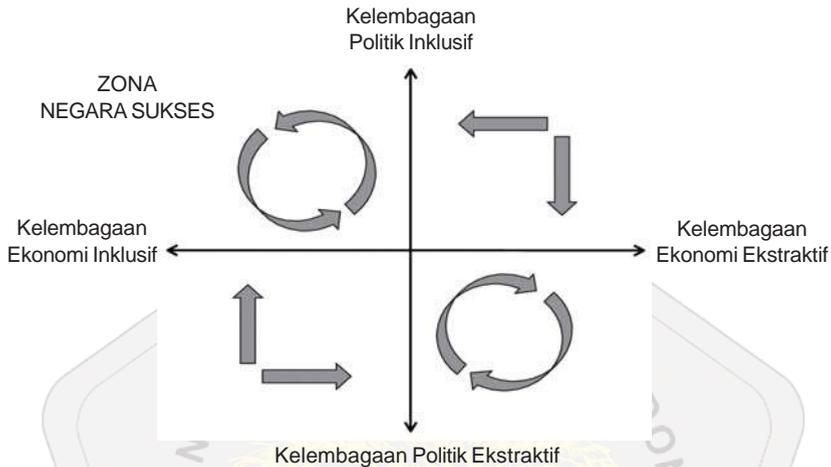
Secara analitis, terdapat empat kondisi kelembagaan yang tercipta sesuai dengan pilihan masyarakat, yaitu: (i) Kelembagaan ekonomi ekstraktif (*extractive economic institutions*). Kondisi dengan tatanan aturan dan hukum yang lemah, tidak adanya jaminan terhadap hak cipta, adanya kendala atau aturan yang menyebabkan tidak berfungsinya pasar dan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. (ii) Kelembagaan politik ekstraktif (*extractive political institutions*). Kondisi yang mendekati batas absolutisme. Kelembagaan politik mendorong kekuasaan terkonsentrasi pada beberapa orang/grup tanpa mekanisme aturan main yang baik dan *checks and balances*; (iii) Kelembagaan ekonomi inklusif (*inclusive economic institutions*). Kondisi terjaminnya hak cipta, aturan dan hukum, dukungan pemerintah (pelayanan publik dan regulasi) untuk kegiatan pasar, keterbukaan pada kegiatan baru, serta akses yang tinggi pada pendidikan dan kesempatan maju bagi masyarakat luas. (iv) Kelembagaan politik

---

<sup>22</sup> Azevedo, J.P., Hasan, A., Goldemberg, D., Iqbal, S.A., and Geven, K., (2020). Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes, World Bank, Jakarta.

inklusif (*inclusive political institutions*): kondisi dimana kelembagaan politik memungkinkan pluralisme dan partisipasi luas dari masyarakat, memberikan batasan (*check and balances*) dan aturan main pada politisi. Selain itu, pada tingkatan tertentu terdapat sentralisasi politik kepada negara untuk dapat menegakkan aturan dan hukum secara kolektif.

**Gambar 3. Keterkaitan Kelembagaan Politik dan Ekonomi**



Sumber: Juhro (2013)

Terdapat sinergi kuat antara kelembagaan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, sinergi kelembagaan yang inklusif (ekonomi dan politik) akan menciptakan kekuatan (*virtuous cycle*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penyebaran kekuatan yang lebih luas, kelembagaan inklusif cenderung menempatkan kelembagaan ekonomi yang menyelelarkan pemanfaatan potensi sumber daya secara luas, menghilangkan kendala berusaha (*entry barriers*), dan mendorong kecenderungan bekerjanya pasar yang dapat memberikan keuntungan secara luas. Sinergi antara kelembagaan ekonomi dan politik yang ekstraktif juga akan menciptakan *feedback loop* (*vicious cycle*) yang kuat. Dalam hal ini, kelembagaan politik memungkinkan para elit mengontrol kekuasaan untuk mengatur/memilih kelembagaan ekonomi yang memiliki kemampuan dan potensi oposisi relatif terbatas. Mereka juga mampu mengatur pergeseran struktur kelembagaan politik. Sebaliknya, kelembagaan ekonomi ekstraktif cenderung memperkaya sesama elit, serta kekayaan dan kekuatannya memungkinkan mereka mengkonsolidasikan dominasi politik.

Realitanya khususnya di negara kita, terjadinya sinergi kelembagaan ekonomi dan politik yang ekstraktif merupakan salah satu fenomena

yang cukup sering kita dengar/baca khususnya dari pemberitaan surat kabar/media massa. Dengan adanya kelembagaan politik memungkinkan para elite mengontrol kekuasaan untuk mengatur/memilih kelembagaan ekonomi yang memiliki kemampuan dan potensi oposisi relatif terbatas. Mereka juga mampu mengatur pergeseran/perubahan struktur kelembagaan politik. Sebaliknya, kelembagaan ekonomi ekstraktif cenderung memperkaya sesama elite, serta kekayaan dan kekuatannya memungkinkan mereka untuk mengkonsolidasikan dominasi politik. Hegemoni politik juga menciptakan lemahnya institusi penegakkan hukum (*law enforcement*). Paska kebijakan otonomi daerah, juga turut menciptakan *elite captures* di tingkat daerah, yang cenderung mempraktikkan sinergi kelembagaan bersifat ekstraktif ini.

Aspek utama lain terkait faktor kelembagaan ini adalah terkait koordinasi kebijakan baik antar sektor maupun antar instansi baik di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, mengacu pada GII (2020), salah satu faktor utama rendahnya skor inovasi nasional (ranking 85 dari 131 negara) terutama disumbang oleh faktor institusi. Sebagai contoh, topik riset yang sama tapi dikerjakan oleh beberapa instansi pemerintah yang berbeda, juga hasil riset suatu badan, namun instansi/kementerian terkait tidak mau menggunakan hasil riset tersebut, karena sudah ada badan riset di bawah koordinasinya juga melakukan studi yang sama.<sup>23</sup> Ego sektoral atau kurang terjalinnnya koordinasi antar instansi/lembaga pada akhirnya akan menimbulkan inefisiensi dan rendahnya produktivitas *output* yang dihasilkan.

Selanjutnya, aspek penting lain dari kelembagaan ini adalah faktor kepemimpinan. Di awal masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan terus menyebar ke Indonesia, dapat kita ketahui bersama bahwa respons kebijakan pencegahan dan penanggulangan krisis kesehatan ini cenderung berjalan relatif lambat dan bahkan sejumlah pemimpin/figur publik meragukan akan bahayanya pandemi ini, karena dianggap penyakit yang bisa sembuh sendiri.<sup>24</sup> Fenomena *leadership* ini tentunya dapat menimbulkan kebingungan publik. Selain itu, di awal masa pandemi, dapat kita amati juga cukup banyak terjadi kelemahan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya soal penetapan PSBB di suatu daerah. Kondisi ini juga berpotensi menular pada perilaku kedisiplinan masyarakat

---

<sup>23</sup> Badan Badan Tenaga Atom Nasional memiliki penelitian benih padi varietas unggul, tetapi tak termanfaatkan karena Kementerian terkait lebih memprioritaskan varietas padi unggul hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di bawah subordinasinya (sumber: <http://lipi.go.id/lipimedia/riset-dan-inovasi-tak-terarah/16288>)

<sup>24</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302162005-20-479814/menkes-virus-corona-penyakit-yang-bisa-semuh-sendiri>.

dalam melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Tentu perilaku indisipliner seperti ini bukan hanya disebabkan oleh faktor *followership*, namun juga disebabkan oleh faktor kesadaran individu itu sendiri yang masih rendah, meskipun pemerintah telah melakukan kampanye sosial dan himbauan secara intensif termasuk dengan pemberian sanksi, namun relatif masih juga ditemukan pelanggaran.

### **3.3. Tinjauan Modalitas Perekonomian Nasional**

#### **3.3.1. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)**

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun potensi yang besar tersebut belum dikelola secara optimal. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis di dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa.<sup>25</sup> Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan panjang 95 ribu kilometer. Tidaklah mengherankan, nusantara juga memiliki kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, terutama biota laut, bahan tambang dan galian. Indonesia memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (*sea grass beds*).<sup>26</sup> Untuk bahan tambang, Indonesia juga memiliki jumlah cadangan minyak sekitar 2,5 miliar barel pada tahun 2019, Indonesia memiliki cadangan gas terbesar ke-14 dunia dengan 103,3 triliun ton kubik dan memegang sekitar 40% dari cadangan panas bumi dunia. Selain itu, Indonesia merupakan produsen emas terbesar ke-8 di dunia, memproduksi sekitar 100 ton / tahun menurut Survei Geologi AS 2013, produsen tembaga dan nikel terbesar ke-5, dan pengeksport gas alam cair (LNG) terbesar ke-2, setelah Cina.

Meskipun kaya dengan sumber daya alam tambang, untuk pemenuhan kebutuhan suplai energi nasional khususnya dari energi fosil seperti minyak bumi, Indonesia masih tercatat net impor sebesar 300 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi minyak bumi yang terus menurun. Penurunan produksi itu disebabkan oleh sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang sudah tua, sementara produksi sumur baru masih terbatas. Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh

---

<sup>25</sup> Total luas hutan di Indonesia sebesar 128 juta ha, dengan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan selama jangka waktu 2011 hingga 2017 adalah sebesar 20,68 triliun rupiah, masih di bawah target yaitu sebesar 23,35 triliun rupiah. Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Status Hutan & Kehutanan di Indonesia 2018. Jakarta

<sup>26</sup> Potensi ikan laut di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun dan potensi luas area budidaya laut sekitar 12,1 juta hektar. Sumber: [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SOSEK/buku/Final%20Amafrad%20Buku%20WPPNRI%20572%20\(secured\).pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/SOSEK/buku/Final%20Amafrad%20Buku%20WPPNRI%20572%20(secured).pdf)

gas alam, meskipun negeri kita tercatat memiliki cadangan 98 triliun kaki kubik, namun potensi penemuan cadangan gas di dalam negeri juga menunjukkan penurunan karena cadangan gas baru belum mampu untuk dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan laut Natuna yang memiliki cadangan gas sebesar 40 triliun kaki kubik yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, produksi batu bara dapat dilakukan dengan metode ekstraksi yang tidak terlalu rumit dan lebih murah, sehingga lebih bernilai ekonomis bagi Indonesia. Karena hal tersebut dan lokasi geografisnya yang dekat dengan pasar negara berkembang seperti India dan Cina, Indonesia terus meningkatkan produksi batu baranya dalam 20 tahun terakhir. Mineral menjadi semakin penting untuk berbagai macam industri terutama di sektor elektronik. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia menerapkan larangan ekspor mineral mentah dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas industri penghasil di Indonesia. Mineral terpenting yang ditemukan dan diproduksi di Indonesia adalah timah, bauksit, nikel, emas, dan tembaga. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang dapat diolah sebagai bahan baku industri, aktivitas hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai tambah dari bahan baku dalam negeri. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih berusaha untuk melakukan berbagai pelarangan ekspor bahan baku mentah terutama untuk mineral dan minyak sawit. Maka dari itu, dibutuhkan hilirisasi industri sumber daya alam.

Dalam jangka pendek, hilirisasi sumber daya alam akan memperbaiki defisit neraca perdagangan yang diakibatkan oleh ekspor bahan mentah yang pada akhirnya diimpor kembali dalam bentuk barang jadi. Hilirisasi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan berbagai industri pengolahan bahan baku yang menyebabkan masuknya investasi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan. Hilirisasi industri juga perlu diiringi dengan penguatan kapabilitas industri melalui peningkatan kompetensi SDM dan penguasaan teknologi. Pengembangan industri di seluruh wilayah Indonesia juga perlu didorong melalui pembangunan berbagai kawasan industri. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam selama ini kurang berkembang, salah satunya karena masih terhambatnya regulasi pemerintah. Oleh karena itu, indeks *Ease of Doing Bussiness* (EoDB) atau kemudahan berbisnis di Indonesia harus diperbaiki secara intensif agar investasi untuk hilirisasi dapat lebih mudah untuk masuk. Peringkat EoDB Indonesia berada pada posisi stagnan yaitu peringkat 72-73 dari tahun 2017 hingga 2020.

Meskipun kaya dengan SDA, tingkat perkembangan/kemajuan ekonomi Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara dengan karakteristik serupa, seperti: Australia, Malaysia, Brazil dan Afrika Selatan. Negara-negara tersebut relatif telah berhasil mengoptimalkan pemanfaatan SDA-nya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Namun, sebetulnya Indonesia juga bukan negara yang gagal dalam pemanfaatan SDA untuk kepentingan rakyatnya, dan kita cenderung lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara yang kaya SDA, namun justru terjadi konflik sosial dan keamanan yang berkepanjangan seperti yang terjadi di sejumlah negara Afrika. Hal ini mengindikasikan hubungan yang kontradiktif antara kekayaan sumber daya alam dan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Di dalam teori ekonomi, fenomena semacam ini disebut sebagai *resource curse*, kekayaan SDA justru menjadi penyebab kehancuran suatu negara. “Kutukan sumber daya alam” ini dapat terjadi melalui tiga jalan/saluran<sup>27</sup>, dan saluran pertama adalah disrupsi terhadap struktur ekonomi. Saluran ini menjelaskan bagaimana banyaknya ekspor komoditas primer menyebabkan mata uang terapresiasi, hal ini mengurangi daya saing ekspor dan impor menjadi murah. Selain itu, aktivitas ekonomi yang berfokus pada ekstraksi sumber daya alam akan mengurangi insentif pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi yang inovatif. Saluran kedua adalah tentang kegagalan institusional; pemerintah yang tidak efisien dalam mengolah sumber daya alam, dan tidak dapat menyalurkan manfaat sumber daya alam untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan indikator sosial lainnya. Saluran ketiga adalah konflik yang dapat terjadi akibat ketidakpuasan dari kelompok tertentu yang memiliki ikatan sejarah dengan tempat adanya sumber daya tersebut serta konflik akibat perebutan sumber daya oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan<sup>28</sup>.

Dalam jangka panjang, sumber daya alam Indonesia khususnya yang tidak dapat diperbaharui akan semakin berkurang/hilang. Cadangan minyak mungkin hanya akan bertahan selama sepuluh hingga 15 tahun lagi, sedangkan cadangan batu bara diperkirakan habis dalam 20 tahun. Tapi situasi ini bukan tidak mungkin untuk diubah. Pemerintah daerah yang diberkahi dengan pendapatan tinggi dari sumber daya alam, terutama minyak dan gas, harus mampu mendidik masyarakatnya, mempekerjakan

---

<sup>27</sup> Tadjoeddin, Z., (2007). A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development. CRISE Working Paper Number 35, University of Oxford.

<sup>28</sup> Beberapa negara telah berhasil keluar dari kutukan atau setidaknya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kutukan tersebut. Dubai adalah contoh negara yang berhasil mengimplementasikan visi jangka panjang sebelum kehabisan minyak. Dubai menginvestasikan kekayaan sumber daya alamnya kepada masyarakatnya dan mendiversifikasi ekonominya. Kebijakan ini dikenal sebagai ‘Dana Sumber Daya Alam/Natural Resources Funds’ (NRF). Dana dari kebijakan NRF selanjutnya dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, untuk investasi

orang-orang terbaik untuk membantu mendiversifikasi ekonomi dan memperkuat layanan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga dapat menawarkan bantuan dengan berbagi pengetahuan dan praktik pengelolaan sumber daya alam untuk menjauhi kutukan sumber daya alam.

### **3.3.2. Budaya Nusantara (*Social Capital*)**

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun bahasa yang dapat ditemui di berbagai daerah di dalam negara ini. Semboyan nasional yang tertulis pada lambang negara, Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu), mencerminkan kondisi keberagaman budaya di Indonesia. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Semboyan ini didukung oleh ungkapan untuk budaya saling membantu yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu gotong royong.

Dalam sejarahnya, kepulauan Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perdagangan dunia semenjak abad ke-7. Posisi strategis Indonesia dalam perdagangan dimulai semenjak berdirinya kerajaan Sriwijaya yang menjalin hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Arab. Beragamnya kelompok etnis dan agama di Indonesia menyebabkan perkembangan budaya kreatif yang sangat bervariasi mulai dari pertunjukan, busana, olahraga, arsitektur, seni musik, sastra, makanan, dan perfilman. Keberagaman budaya dan pengalaman Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia ini dapat menjadi potensi besar bagi Indonesia pada saat ini untuk mengembangkan perekonomian daerah terutama melalui sektor pariwisata. Perkembangan pesat agama Islam serta budaya syariah di Indonesia juga merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan luas wilayah perairan sebesar 3,2 juta km<sup>2</sup>, masyarakat Indonesia memiliki budaya maritim yang tinggi. Teknologi perkapalan dan pelayaran telah berkembang pesat pada masa kerajaan hindu-budha di Indonesia.

Tradisi/budaya kita yang ada sudah sejak lama adalah bergotong royong, dimana warga pada suatu komunitas bersama-sama membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi salah satu/beberapa warganya. Sebagai contoh, gotong royong membangun rumah peribadatan. Secara teoretis, hal ini disebut sebagai modal sosial. Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial ini sebagai suatu kerja sama informal yang didasari oleh berbagai nilai-nilai (*values*) dan norma (*norms*) dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan semangat kegotongroyongan atau budaya saling menolong, tentu mempunyai dampak yang sangat positif terutama

dengan menciptakan ketahanan yang kuat bagi suatu komunitas. Selanjutnya, Putnam (1993) menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) merupakan komponen esensial dari modal sosial. Kepercayaan sebagai motivasi dasar untuk bekerja sama. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam suatu komunitas maka semakin tinggi kecenderungan mereka untuk mau bekerja sama, dan pada gilirannya kerja sama tersebut membuahkan kepercayaan yang lebih besar lagi.

Untuk konteks perekonomian Indonesia, Juhro et al, (2020b) menunjukkan peran penting modal sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan nilai-nilai budaya seperti gotong royong yang dapat memberikan dampak yang positif terhadap *social capital* seperti integritas dan kejujuran. Terkait dengan hal ini, nilai-nilai keagamaan (religiusitas) juga menjadi faktor penting yang secara signifikan memberikan dampak pada pertumbuhan produktivitas. Temuan tersebut memiliki beberapa implikasi diperlukannya upaya untuk melestarikan dan membudayakan kembali budaya bangsa dan nilai-nilai kebangsaan luhur yang bernilai positif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Demikian pula halnya dengan upaya untuk meningkatkan tingkat religiusitas masyarakat Indonesia ditengah keberagaman yang ada.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Azis (2019) bahwa dalam hubungan antara budaya dan ekonomi, terdapat komponen yang memainkan peran sebagai variabel penghubung. Variabel penghubung yang memiliki peran penting dalam menghubungkan (kausalitas) ekonomi dan budaya adalah institusi/lembaga, baik formal maupun informal. Lembaga informal berasal dari "*socially transmitted information*" dan merupakan bagian dari warisan/budaya, sementara lembaga formal umumnya berkaitan dengan sistem politik yang berlaku. Keduanya memengaruhi kinerja perekonomian dengan cara yang berbeda, meskipun hasil akhir yang tercipta dari keduanya sama yaitu efisiensi kinerja perekonomian. Lembaga/institusi yang dipengaruhi budaya dapat memengaruhi *transaction cost* (seperti biaya negosiasi dan informasi asimetris) yang pada gilirannya akan memengaruhi perekonomian. Dalam lingkungan yang dinamis, melalui keputusan organisasi tentang teknologi dan inovasi, serangkaian persyaratan yang mencerminkan kualitas lembaga dan *social capital* memiliki peranan penting dalam memengaruhi pertumbuhan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Budaya dan lembaga berinteraksi dan berkembang secara saling melengkapi (komplementer), bukan hubungan kausalitas satu arah. Tipe suatu lembaga akan membuat budaya berkembang ke arah yang berbeda, sementara budaya yang berbeda juga akan membuat lembaga berfungsi secara berbeda.

### 3.3.3. Populasi dan Bonus Demografi

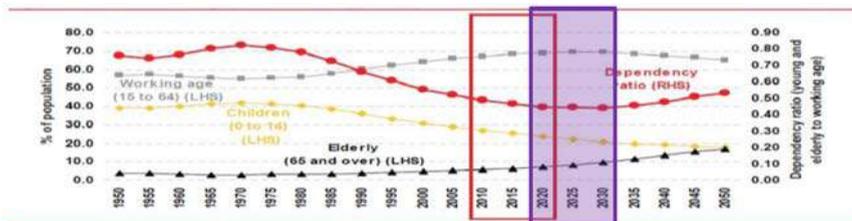
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa, banyaknya penduduk Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat besar, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Selama 15 tahun terakhir ini, Indonesia juga mengalami pertumbuhan kelas menengah dari 7 % menjadi 20 % dari populasi, yang berarti sebanyak 52 juta orang Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok menengah. Tingkat urbanisasi di Indonesia juga tumbuh dalam tingkat yang tinggi. Sekitar 55 % penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dengan peningkatan konstan sekitar 2,5 %, diperkirakan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan akan mencapai sekitar 70 % dari total populasi dalam 10 tahun ke depan. Jumlah angkatan kerja Indonesia pada Februari 2020 berada di angka 137,91 juta orang. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja di Indonesia, paling tidak dari kualifikasi lulusan pendidikannya.<sup>29</sup>

Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada 2030. Bonus demografi adalah peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat tingginya proporsi penduduk usia produktif dibandingkan dengan usia non-produktif. Di Indonesia, fenomena ini terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu yang dipercepat dengan keberhasilan dalam menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kesehatan, dan program pembangunan. Bonus demografi memberikan ketersediaan tenaga kerja yang banyak dan pada saat yang sama dukungan ekonomi yang harus diberikan penduduk usia produktif kepada penduduk usia non produktif menjadi lebih ringan. Akibatnya penduduk usia produktif memiliki peluang untuk menabung yang pada akhirnya meningkatkan sumber pembiayaan investasi. Bonus demografi merupakan modal dasar untuk lolos dari *middle income trap*, khususnya melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik. Indonesia sudah mulai mendapatkan bonus demografi mulai tahun 2010 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2030.

---

<sup>29</sup> Dari jumlah angkatan kerja itu, baru sekitar 25 % angkatan kerja di Indonesia yang memiliki pendidikan setingkat SMA ke atas. Angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan SMP ke bawah ini akan membuat Indonesia sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin global. 53 % dari pekerja di industri manufaktur hanya memiliki pendidikan setingkat SMP ke bawah, dominasi ini akan menyulitkan revolusi industri yang akan banyak berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi robotik.

**Gambar 4. Skema Bonus Demografi Indonesia**



Sumber: Bank Indonesia (2017)

Proyeksi penduduk produktif Indonesia (usia 15 sampai 64 tahun) pada tahun 2020 adalah 185,3 juta jiwa dan milenial (usia 21- 36 tahun) berkontribusi pada sekitar 63,5 juta jiwa. Ini menjadikan milenial sebagai mesin pertumbuhan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Generasi milenial berinovasi melalui aktivitas kreatif, pekerjaan pengetahuan, dan pembuatan *start-up* yang didukung oleh inkubator bisnis atau akselerator yang didorong oleh modal ventura. Inovasi ini didukung oleh kecerdikan generasi milenial untuk menggabungkan berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk membuka jalan menuju berbagai peluang. Perkembangan teknologi merupakan bagian inti dari kehidupan mereka. Tren populer global sangat mempengaruhi mereka yang memiliki akses ke teknologi seperti *smartphone*, internet, dan media sosial. Ketika teknologi tersebut didukung oleh pendidikan yang tepat, hal ini dapat mendorong pandangan yang lebih luas tentang dunia dan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dan merekonstruksi praktik ekonomi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki generasi milenial, potensi Indonesia dalam kompetisi global di berbagai bidang akan semakin baik apabila generasi milenial dapat dikembangkan secara optimal.

Terlepas dari peluang yang tersedia bagi generasi milenial untuk memulai kegiatan ekonomi kreatif, generasi milenial tampaknya masih menghadapi hambatan dan ancaman yang dapat menghalangi manfaat dari kelebihan mereka. Walaupun generasi milenial di berbagai wilayah memiliki gagasan dan antusiasme yang sama tentang teknologi dan kreativitas baru, akses menuju teknologi masih belum tersebar secara merata. Kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan juga ini juga menyebabkan hambatan lain seperti pendidikan kewirausahaan yang tidak memadai, kurangnya pengalaman kerja, kurangnya akses ke pinjaman dan kredit, dan kurangnya jaringan. Hambatan Pasar juga dapat mempengaruhi kewirausahaan generasi milenial. Eksternalitas negatif dari globalisasi seperti terkikisnya nilai-nilai budaya lokal perlu diperhatikan agar efek negatif globalisasi tidak menjadi faktor penghambat yang substansial bagi perkembangan generasi milenial.

Mendorong generasi milenial Indonesia untuk berkontribusi pada ekonomi terutama melalui kegiatan kreatif akan membutuhkan investasi pada potensi mereka dan pencegahan ancaman negatif agar mereka dapat menjadi pemimpin di dunia global maupun domestik.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketergantungan bahan baku impor, dan menciptakan tambahan lapangan kerja, dibutuhkan kewirausahaan yang bersifat inklusif. Dengan modal perkembangan teknologi yang pesat, generasi milenial memiliki potensi untuk menjadi pelaku utama dalam membangun kewirausahaan sosial. Dengan menjadi wirausaha yang berbasis sumber daya alam unggulan Indonesia terutama di sektor pertanian, generasi milenial dapat memanfaatkan kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses pasar dan meningkatkan efisiensi produksi pertanian. Sektor pertanian saat ini mengalami masalah yaitu kurangnya minat generasi muda yang mau bekerja di sektor pertanian. Regenerasi di bidang pertanian akan membuat lapangan kerja di sektor pertanian menjadi menarik bagi generasi baru, prospektif dan menguntungkan, serta dapat menurunkan angka pengangguran. Dengan akses pasar yang kuat dan proses produksi serta distribusi yang memanfaatkan kemajuan teknologi, kewirausahaan di sektor pertanian dengan generasi milenial sebagai penggerak utamanya dapat memenuhi kebutuhan pangan yang tinggi di daerah perkotaan serta meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah perdesaan.

### **3.3.4. Potensi Pengembangan Ekonomi Syariah**

Dalam dua dekade terakhir, Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat baik secara global maupun nasional. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sebesar sekitar 229 juta jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk muslim akan terus meningkat dan diperkirakan mencapai 27.5% dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan penduduk muslim ini akan menyebabkan permintaan terhadap produk dan jasa halal bertambah secara signifikan.

Namun demikian, peran Indonesia dalam memenuhi permintaan produk dan jasa halal belum optimal. Indonesia baru memiliki kontribusi di pasar halal dunia sebesar 3,8% dari 2,1 triliun dolar Amerika. Indonesia menempati posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia dalam the Global Islamic Economy Index 2018/2019. Performa ekspor Indonesia dalam memenuhi kebutuhan produk fesyen muslim, pariwisata halal, dan makanan halal terus meningkat, namun Indonesia masih memiliki net impor yang besar untuk

produk dan jasa halal sehingga menyebabkan defisit pada transaksi berjalan. Saat ini industri halal Indonesia menghasilkan 53,2 triliun rupiah per tahun, setara dengan 0,4 % PDB Indonesia.

Tentunya masih terdapat berbagai tantangan untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Regulasi terkait industri halal yang belum memadai, kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat akan produk halal, dan juga keterhubungan antara industri halal dan keuangan syariah yang masih rendah merupakan beberapa masalah utama dari pengembangan ekonomi syariah. Masalah lainnya adalah kurangnya kapasitas produksi domestik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi produk halal di Indonesia. Tata kelola dan manajemen risiko sektor halal masih belum memadai. Pemanfaatan teknologi belum optimal pada industri halal. Standar halal Indonesia belum dapat diterima di tingkat global.

Industri halal adalah potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan oleh Indonesia. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekonomi syariah. Dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya sektor industri halal, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah dan institusi terkait berpegang pada prinsip 4 C, yaitu komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait (*commitment*), program yang konkrit sehingga mudah untuk diimplementasikan (*concrete*), sinergitas antara lembaga dan pihak terkait (*collaborative*) serta edukasi yang dilakukan secara intens mengenai nilai lebih dari gaya hidup halal (*campaign*).

Sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem rantai nilai halal tersebut, BI telah melaksanakan berbagai program pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian, makanan, fesyen, pariwisata, dan energi terbarukan. Selain itu, MUI dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM) berperan sebagai lembaga otoritas sertifikasi halal. UUD No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikat halal mulai tahun 2019. Namun demikian, Indonesia sampai saat ini belum terdaftar sebagai anggota SMIC (*The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries*). Ini adalah lembaga standardisasi proses halal yang menaungi negara-negara Muslim. Hal ini bisa menjadi kendala dalam memasarkan produk berlabel halal Indonesia ke negara-negara Muslim yang lain.

Beberapa tantangan ekonomi syariah Indonesia saat ini adalah: (1) posisi Indonesia saat ini yang belum menjadi pemain besar di sebagian besar

industri halal global. Sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah di Indonesia masih dipasok melalui impor; (2) perbedaan mazhab dan ushul fiqh ulama komisi fatwa dapat mempengaruhi halal atau tidaknya suatu produk, contohnya terdapat perbedaan pendapat mazhab syafi'i dan mazhab maliki mengenai kehalalan binatang yang hidup di dua alam seperti kodok.<sup>30</sup> Hal ini menyebabkan pembuatan standar halal internasional bahkan nasional menjadi tidak mudah; (3) pengembangan ekonomi syariah Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan dengan beberapa negara lain terutama dibandingkan dengan Malaysia yang menempati peringkat pertama di *State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019*.<sup>31</sup>

Namun demikian, dari sisi empiris sektor keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, pasar keuangan, terutama pasar saham syariah, secara ketat mematuhi prinsip-prinsip Islam sehingga beroperasi secara berbeda dari pasar saham tradisional (Kuran, 1995). Secara khusus, kegiatan di pasar saham syariah terdiri dari lima prinsip, yaitu pelarangan terhadap ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), pelarangan bunga (*riba*), larangan investasi di industri yang 'tidak etis' (*haram*), larangan melakukan spekulasi risiko (*maysir*), dan adanya *risk-return sharing* (Hearn, Piesse, dan Strange, 2011; Abbes dan Trichilli 2015). Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan 227 juta dari 261 penduduknya menganut agama Islam pada 2017. Berdasarkan hal ini saja, aktivitas di pasar modal dan pembangunan ekonomi (pertumbuhan) seharusnya sebagian besar didorong oleh prinsip Islam. Juhro et al. (2020a) dengan menggunakan data *time series* dalam 5 dekade terakhir, menunjukkan bahwa meski diperoleh hasil yang belum *clear-cut*, model semi-endogen secara empiris dapat menjelaskan pertumbuhan Indonesia dengan lebih baik. Ketika model pertumbuhan diperluas dengan memasukan sistem keuangan Islam, hasil yang diperoleh sesuai dengan ekspektasi/hipotesis yaitu pertumbuhan pasar saham syariah dapat memacu pertumbuhan produktivitas (*Total Fcator Productivity*) Indonesia.

---

<sup>30</sup> <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Memakan-dan-Membudidayakan-Kodok.pdf>

<sup>31</sup> Malaysia dapat menjadi negara dengan ekonomi syariah terdepan karena Malaysia telah lama mengambil langkah-langkah penting untuk membangun ekosistem ekonomi Islam terdepan di dunia. Malaysia memiliki standar halal yang kuat dan komprehensif yang didukung oleh ekosistem yang luas yang mencakup zona bebas halal (*halal hubs*), produsen produk halal yang berkembang dengan baik, industri keuangan Islam yang kuat, dan ekosistem investor yang kuat yang mencakup ekuitas swasta, modal ventura, dan *sovereign wealth fund*. Keunggulan Malaysia ini terus dipertahankan dengan mengambil langkah-langkah peting untuk memperkuat perannya dalam regulasi global produk halal melalui pembentukan Badan Akreditasi Halal Internasional yang berupaya untuk menjawab permasalahan di antara para pemberi sertifikasi.

### 3.4. Strategi Kebijakan Ekonomi Inklusif di Era *New Normal*

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kondisi pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan, namun juga telah berdampak terhadap perlambatan perekonomian pada sisi *supply* dan *demand* secara paralel dan saling memperkuat satu sama lain (*amplification mechanism*). Respons kebijakan pemerintah terutama penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) turut menambah terjadinya pelemahan permintaan konsumsi masyarakat yang sebetulnya merupakan penopang perekonomian nasional, di saat aktivitas perdagangan luar negeri maupun investasi relatif sudah mengalami penghentian. Guncangan (*shocks*) yang tiba-tiba dan tak terduga ini tentu pada gilirannya akan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Bagian berikut ini menengahkan rumusan paradigma pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam mengawal era kenormalan baru.

Dengan memperhatikan berbagai perubahan lingkungan strategis dan modalitas perekonomian nasional, berikut ini akan dibahas sejumlah prioritas strategi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan *stakeholders* terkait, khususnya dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional di era pandemi dan *new normal*.

**Gambar 5. Lingkungan Strategis dan Strategi Kebijakan Ekonomi Inklusif**



### (i) Pengembangan Infrastruktur dan Perluasan Pelayanan Publik

Dalam kondisi normal, atau sebelum terjadinya pandemi Pemerintah RI telah menetapkan 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari kementerian/lembaga (K/L), maupun integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini diharapkan memiliki daya ungkit (*multipliers*) yang tinggi. Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi pariwisata unggulan.<sup>32</sup> Juga, komitmen untuk lanjutan program pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api kecepatan tinggi, serta jaringan pelabuhan utama terpadu. Namun, dengan terjadinya pandemi Covid-19, dilakukan pemangkasan anggaran beberapa kementerian karena fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi nasional (PEN).<sup>33</sup> Dengan semakin terbatasnya anggaran yang tersedia tersebut, strategi kebijakan pembangunan infrastruktur sewajarnya akan difokuskan (*refocussing*) pada jenis infrastruktur yang berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, proyek padat karya akan sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak akibat pandemi ini. Namun demikian, para pelaksana pembangunan tetap harus mengimplementasikan protokol kesehatan (standar), sehingga proyek pembangunan infrastruktur dimaksud tidak menjadi sumber/klaster baru penyebaran Covid.

Adapun infrastruktur kritikal yang perlu disiapkan/dilanjutkan di era pandemi saat ini hingga paska pandemi (periode *recovery*) adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan/pengembangan vaksin sebagai *game changer*, baik secara mandiri maupun kerjasama internasional menjadi syarat utama penanganan kesehatan dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Proses pembuatan vaksin seyogyanya dilakukan dengan cepat, namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan keampuhannya. Selain didistribusikan pada kelompok yang ditargetkan (tenaga kesehatan dll), vaksin juga harus dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat luas yang memerlukan.
- b. Pengembangan sarana-prasarana di bidang kesehatan, khususnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah bersalin, dan puskesmas. Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan bagi penanganan Covid-19 sangat diperlukan agar ketersediaan tempat tidur rumah sakit tidak sampai pada ambang kritis. Penyediaan laboratorium

---

<sup>32</sup> Proyek dimaksud adalah Danau Toba, Borobudur DSKT, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali.

<sup>33</sup> Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-covid-19-anggaran-kementerian-pupr-dipangkas-rp-4458-triliun>

untuk deteksi *polymerase chain reaction* (PCR) dan pengembangan vaksin Covid-19 diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tes massal dan persiapan penyediaan vaksin Covid-19. Sebagai dukungan terhadap infrastruktur non-fisik kesehatan yaitu sumber daya manusia kesehatan, insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah serta belanja alat kesehatan (APD, *test kit*, reagen, dll.) juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan SDM kesehatan dan melindungi SDM kesehatan dari risiko saat menangani pasien Covid-19.

- c. Infrastruktur ketahanan pangan. Di era pandemi ini dan ke depan, proyek-proyek strategis untuk penyediaan suplai pangan domestik sangat perlu diprioritaskan mengingat jumlah populasi yang besar, sementara impor dari negara lain sulit dilakukan dalam kondisi krisis seperti saat ini. Proyek dimaksud terutama dalam bentuk pembangunan/perbaikan sarana irigasi, bendungan dan termasuk program cetak sawah baru. Sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim dan perikanan yang sangat besar, infrastruktur pendukung untuk penyediaan pangan juga masih perlu terus dikembangkan dan termasuk melibatkan investor swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
- d. Infrastruktur telekomunikasi tentu sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini. Dengan adanya pembatasan jarak (*social distancing*), cara bekerja karyawan/pegawai mengalami perubahan dari bekerja di kantor menjadi *work from home* dan hal yang sama juga terjadi di sektor pendidikan, siswa terpaksa bersekolah (belajar) jarak jauh (pembelajaran jarak jauh/PJJ), dengan berbasis pada platform digital. Mengingat kondisi geografis nusantara yang luas dan kepulauan, sementara penduduk cenderung teraglomerasi di daerah perkotaan khususnya di Pulau Jawa, maka pembangunan konektivitas infrastruktur digital perlu terus diupayakan (dikelola) secara strategis hingga dapat melayani sampai ke daerah-daerah pelosok (terluar). Kondisi terbatasnya akses digital bagi pelajar di pedesaan (daerah tertinggal) sangat perlu mendapat dukungan prioritas oleh pemerintah untuk penyediaan internet gratis (bersubsidi) sehingga kegiatan belajar dapat terus berlangsung, meski dilakukan secara *online*.
- e. Infrastruktur fisik, seperti pembangunan konstruksi untuk jalan tol untuk terus dilanjutkan di era new normal, karena sebagai akses untuk transportasi pangan, obat-obatan dan barang vital lainnya.<sup>34</sup> Selain

---

<sup>34</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/06193371/jokowi-kebut-infrastruktur-di-tengah-pandemi-terkendal-a-dana-hingga-lahan?page=all>

itu, pembangunan jembatan dan berikut moda transportasi darat-laut-udara sangat urgen disiapkan mengingat (dengan asumsi) vaksin Covid akan tersedia di tahun 2021, namun dengan geografis negara kita kepulauan, tentu interkoneksi antar daerah dan antar pulau untuk distribusi dan logistik vaksin tersebut perlu dipastikan sudah tersedia dengan baik hingga mencapai ke pelosok nusantara.<sup>35</sup>

- f. Infrastruktur di bidang energi seperti listrik dan gas, bukan hanya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga sehari-hari, namun juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri kesehatan dan industri strategis lainnya yang masih tetap beroperasi dalam kondisi Protokol Covid.
- g. Selain itu, infrastruktur yang mendukung pola hidup bersih dan sehat seperti instalasi penyediaan air bersih dan termasuk perumahan yang layak juga sangat diperlukan untuk mendukung upaya mengatasi (mencegah) potensi penyebaran virus di masyarakat yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini adalah infrastruktur di sektor keuangan khususnya pembayaran dengan non tunai (*cashless*) untuk transaksi juga perlu terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya hingga seantero negeri.

Selanjutnya belajar dari pengalaman pandemi saat ini, dipandang sangat krusial untuk melakukan perbaikan menyeluruh (reformasi) terhadap sistem kesehatan nasional, dan sekaligus antisipatif terhadap kemungkinan risiko sistemik yang berulang di masa depan, sebagaimana yang disampaikan oleh Chief World Health Organization (WHO): “*the world must be better prepared for the next pandemic*”.<sup>36</sup> Untuk itu, paling sedikit ada 2 poin penting yang dapat menjadi prioritas kebijakan (*soft infrastructure*) di bidang kesehatan nasional.

*Pertama*, sangat diperlukannya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no.28/2014.<sup>37</sup> Di era pandemi saat ini,

---

<sup>35</sup> <https://www.wsj.com/articles/covid-19-vaccine-race-turns-deep-freezers-into-a-hot-commodity-11599217201>

<sup>36</sup> Sumber: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who/world-must-be-better-prepared-for-next-pandemic-says-who-boss-idUSKBN25Y11Y>

<sup>37</sup> Untuk lebih detail lihat, <https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk282014.pdf>

pelaksanaan JKN dimaksud merupakan upaya perlindungan sosial diperlukan sebagai respons terhadap dampak Covid-19 kepada masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks ekonomi, hal ini juga berarti untuk menjaga kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen kunci bagi perekonomian nasional. Semakin banyaknya pengguna JKN akan meningkatkan pengumpulan pendapatan dan pengumpulan risiko yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan asuransi sosial.<sup>38</sup>

*Kedua*, di era digital saat ini, pengembangan/pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis digital seperti: *Artificial Intelligence (AI)*, sangat urgen dikembangkan, khususnya dengan mempertimbangkan risiko sistemik khususnya penularan penyakit antar manusia (antar hewan dan manusia) dan berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia dapat terjadi dalam jangka waktu yang sangat cepat dan tak terduga. Aplikasi teknologi berbasis mesin/algorithm ini diyakini akan sangat membantu dan lebih efisien untuk mendiagnosis dan mengatasi potensi permasalahan yang terkait dengan kesehatan manusia.<sup>39</sup> AI juga akan bermanfaat menganalisis data besar dan mikro untuk membuat sistem peringatan dini terhadap risiko pandemi ke depan, mengidentifikasi kelompok masyarakat yang *vulnerable* terhadap risiko guncangan, serta dapat membantu dalam percepatan penemuan riset terhadap vaksin Covid-19.

### **(ii) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan berfokus pada sektor UMKM, mengingat potensi yang besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pilar strategi pengembangan ekonomi diarahkan untuk penyelamatan (relief) UMKM dalam jangka pendek dan penguatan/pengembangan UMKM yang kompetitif secara global dalam jangka menengah-panjang.

---

<sup>38</sup> Anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2020 adalah 203,9 triliun rupiah yang akan disalurkan melalui program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial tunai dan sembako, dll. JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan harus dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan bahkan mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan JKN. Saat ini biaya perawatan Covid-19 dapat ditanggung melalui BPJS kesehatan. Maka dari itu, penjangkauan pengguna JKN yang lebih besar akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terutama Covid-19 saat ini dan pelayanan kesehatan lainnya di masa depan.

<sup>39</sup> Sejumlah negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia relatif berhasil dalam pengendalian penyebaran Covid (a.l. melalui *contact tracing* dan *forecasting contagious effects*) dengan penggunaan aplikasi teknologi digital.

## Membangun UMKM yang kompetitif

Untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan kompetitif, tentu sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia (pelaku) UMKM yang kompeten dan profesional. Kriteria pelaku UMKM dimaksud, yaitu memiliki *entrepreneurship skill*, manajemen produksi-pemasaran-keuangan, dan cakap (pengetahuan dasar) dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya. Untuk itu, meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM, Pemerintah telah menyusun sejumlah program kebijakan khususnya berupa pemberian pelatihan bagi pelaku UMKM yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif dalam rangka peningkatan produktivitas dan penjualan (skala ekonomi), dengan subjek antara lain: pengetahuan manajerial, dan khususnya pemanfaatan teknologi terkini di era digitalisasi saat ini. Salah satu program pelatihan yang relevan untuk menggugah *awareness* pelaku UMKM terhadap manfaat peranan teknologi digital untuk komersialisasi dan *outreach* penjualan UMKM tanpa batas geografis, antara lain yang diselenggarakan oleh Baparekraf (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dengan Digital Entrepreneurship (BDE 2.0).<sup>40</sup>

Selain itu, Pemerintah juga sedang mengajak pelaku industri, UMKM, dan pendidikan tinggi terutama vokasi untuk bersinergi memanfaatkan momentum pengembangan kawasan industri.<sup>41</sup> Strategi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pihak industri/UMKM maupun pihak pendidikan vokasi. Dengan adanya sinergi antara UMKM dan pendidikan vokasi, akses mahasiswa untuk melakukan magang sebagai sarana belajar sambil bekerja akan meningkat sehingga lulusan vokasi nantinya telah terbekali gambaran dalam melakukan pekerjaan secara nyata. Di sisi lain, pendidikan vokasi dapat memberikan bantuan dan pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menjalankan usahanya. Sinergi ini akan menciptakan lulusan vokasi yang memiliki kapabilitas untuk bekerja di industri/UMKM dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia UMKM yang telah ada.

Strategi lain dalam konteks pengembangan SDM UMKM pasca pandemi dapat dilakukan melalui pendampingan dan termasuk pelatihan UMKM dalam penggunaan platform *online*, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta strategi pemasaran *online*. Pendampingan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi,

<sup>40</sup> Sumber: <https://teknologi.bisnis.com/read/20200513/84/1239933/kemenkominfo-tawarkan-beasiswa-pelatihan-digital-bagi-15.200-peserta>

<sup>41</sup> Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200826194907-4-182263/jokowi-vokasi-kita-dorong-sinergi-dengan-umkm>

*marketplace provider*, dan perbankan. Khusus untuk mendukung penjualan ekspor produk UMKM diperlukan pendampingan bersama agregator dan memanfaatkan informasi pasar luar negeri dari Kementerian Luar Negeri terkait standardisasi dan kurasi produk agar dapat memenuhi kriteria dan *demand* di pasar luar negeri. Fasilitasi pemerintah diperlukan pula juga dalam hal pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro agar tumbuh menjadi wirausaha.<sup>42</sup>

Di era digital ini, UMKM didorong untuk menjadi kekuatan baru perekonomian nasional. Terdapat faktor kunci lain untuk mewujudkan visi ini, selain faktor SDM dari pelaku UMKM sebagaimana dibahas di atas, yaitu, digitalisasi melalui inisiasi UMKM *go digital* dan terintegrasi dengan modal keuangan digital melalui sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Namun demikian, mengingat dampak negatif akibat pandemik yang relatif signifikan terhadap UMKM, untuk itu perlu dilakukan terobosan kebijakan dari sisi pembiayaan khususnya. Dalam rangka mengurangi beban *cashflow* UMKM, pemerintah dan OJK memberikan stimulus berupa restrukturisasi kredit yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2020. Beberapa cara restrukturisasi kredit tersebut adalah penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.<sup>43</sup> Kebijakan restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat membantu keberlanjutan usaha pelaku UMKM sehingga mampu bertahan dalam menghadapi kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Selain restrukturisasi kredit, belajar dari kebijakan negara lain untuk membantu UMKM *survive* dan segera bangkit di era *new normal*, Pemerintah juga perlu memfasilitasi likuiditas UMKM dengan memberikan pinjaman jangka pendek bersuku bunga subsidi untuk membantu permodalan bagi usaha mikro atau wirausaha yang baru tumbuh, karena sebagian besar merupakan korban PHK dari industri.

---

<sup>42</sup> Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kapasitas pendamping yang dapat diterapkan, adalah: (i) Pemberdayaan tenaga pelatih yang telah dimiliki oleh kementerian desa dengan peningkatan pemahaman terhadap proses bisnis; (ii) Mencetak lebih banyak tenaga ahli pendamping yang menguasai beberapa standar keahlian tertentu antara lain manajemen produksi, manajemen keuangan dan manajemen risiko; (iii) Pemberdayaan tenaga PKK yang sudah tersedia di setiap desa dengan melengkapi kapasitas mereka tentang teknologi digital; (iv) Kerja sama dengan Perguruan Tinggi dapat dilakukan dengan lembaga pengabdian masyarakat atau dengan mahasiswa KKN untuk pendampingan untuk aspek spesifik tertentu misalnya pelatihan kewirausahaan.

<sup>43</sup> Hingga tanggal 10 Agustus 2020, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp 837,64 triliun dari 7,18 juta debitur. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Kolaborasi-dan-Sinergi-Pengawasan-Terintegrasi-OJK-Jaga-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Stabil.aspx>

Selain itu, upaya penyelamatan terhadap UMKM seharusnya juga tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, namun juga perlu memperhatikan kemampuan (daya saing) UMKM dalam jangka panjang, dan kontribusinya terhadap perekonomian global terutama mengingat ruang kompetisi yang terbuka di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi UMKM dapat menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Namun demikian, sebagian besar pemain UMKM di pasar *online* saat ini masih didominasi sektor perdagangan, atau kebanyakan masih menjadi *reseller* dari produk impor.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu sangat hati-hati dalam memberikan stimulus untuk penyelamatan UMKM digital jika hanya menjadi perantara produk impor, karena berpotensi memperbesar *current account deficit* (CAD). Visi kita bersama ke depan yaitu menjadikan UMKM nusantara yang lebih berorientasi pada pengembangan sektor manufaktur (melalui inovasi dan adopsi teknologi), serta masuk dalam jaringan pemasaran global (*Global Value Chains / GVC*). Kondisi ini pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan devisa (surplus perdagangan), selain tentunya bersifat inklusif dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi ekonomi informal. Untuk meningkatkan ekspor dan mampu menyaingi produk impor, paradigma pengembangan UMKM digital dapat lebih target spesifik, sehingga dapat mendorong pergeseran dari sekedar *reseller* produk impor menjadi pemasok atau bahkan produsen dari produk domestik yang berorientasi pada ekspor. Untuk itu, UMKM perlu dapat menciptakan produk yang konsisten secara kualitas dan kuantitas sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM domestik dapat terbangun. Selanjutnya, kesadaran UMKM akan prosedur ekspor seperti prosedur bea cukai juga perlu dibangun agar UMKM dapat melakukan ekspor tanpa hambatan regulasi yang dapat menggagalkan proses transaksi. Kerja sama perdagangan yang telah dilakukan Indonesia juga harus dapat menjangkau lebih banyak UMKM sehingga memperluas koneksi UMKM untuk melakukan ekspor. Yang terakhir, tentunya pemanfaatan teknologi digital berupa *e-commerce* dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha domestik dengan pasar global.

Selanjutnya, selain faktor SDM dan digitalisasi UMKM, faktor lain yang berperan strategis bagi UMKM dan “naik kelas” sebagai *global player*, dibutuhkan sinergi yang kuat dan terkoordinasi dari semua pihak baik dari sisi kebijakan (pemerintah pusat dan daerah) maupun swasta (badan usaha). Untuk itu perlu dipetakan skema sinergi dan kewenangan antara Pemerintah, Badan Usaha, pelaku UMKM, akademisi dan agregator dalam pengembangan UMKM agar tidak tumpang tindih. Adapun sinergi antara Pemerintah dan Badan Usaha utamanya dibutuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendampingan untuk peningkatan kualitas SDM UMKM, antara lain melalui pelatihan teknologi, manajemen, keuangan, dan pengemasan bersama badan usaha seperti platform *e-commerce* dan agregator.
- b. Pemerintah dapat menugaskan BUMN di setiap daerah untuk menjadi agregator sebagai penampung sekaligus memberikan nilai tambah produk UMKM sehingga membentuk *value chain* ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan *economics of scale* UMKM. Melalui kemitraan, UMKM dapat melakukan perbaikan standardisasi mutu dan kualitas atas hasil produk dan proses bisnis guna memenuhi standar yang ditetapkan dunia usaha (perusahaan besar) yang menjadi mitra. Untuk mendorong UMKM masuk pasar ekspor, diperlukan pula kemitraan dengan Badan Usaha yang telah memiliki pengalaman pada *global value chain*.
- c. Kerja sama di bidang logistik dapat diterapkan untuk bantuan pengiriman produk UMKM untuk mengatasi kendala distribusi dan subsidi logistik melalui pemberian potongan harga pengiriman untuk produk produk UMKM tujuan ekspor.

### **Pengembangan UMKM Syariah**

Selain UMKM konvensional yang diuraikan di atas, UMKM syariah di nusantara khususnya memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat lagi, mengingat mayoritas populasi konsumen adalah Muslim di tanah air, termasuk potensi pasar produk syariah di luar negeri khususnya di kawasan Timur Tengah. Selain aspek SDM dan digitalisasi UMKM seperti pada UMKM konvensional di atas, isu spesifik bagi UMKM syariah yaitu aspek pembiayaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan akses ke perbankan atau lembaga keuangan syariah termasuk sumber pendanaan yang berbasis platform digital, yaitu dikenal dengan *financial technology (fintech)*. Di era digital saat ini, platform keuangan syariah berbasis digital berpotensi besar untuk berjalan bersamaan dengan UMKM baik konvensional maupun syariah. Pendanaan *fintech* syariah tidak hanya berbasis ekuitas atau modal komersial, dana sosial seperti zakat dan wakaf juga berpotensi untuk menjadi sumber pendanaan usaha kecil yang terdampak Covid-19.

Dengan mendorong lebih banyak UMKM syariah untuk mencari pendanaan melalui *fintech* syariah, usaha-usaha yang tadinya tidak dianggap layak untuk mendapat pendanaan oleh bank konvensional akan lebih banyak terjaring oleh *fintech* syariah karena persyaratan yang lebih fleksibel. Pendanaan *fintech* syariah juga memberikan keamanan bagi pengguna Muslim karena penggunaan prinsip syariah dalam perjanjiannya. Skema berbagi risiko (*risk-*

*sharing*) memberikan keamanan finansial lebih terhadap pelaku UMKM karena segala keuntungan dan kerugian yang dialami oleh UMKM tersebut dibagi kepada para mitra pendana sesuai kesepakatan sehingga pembagian risiko tersebut menjadi adil bagi kedua belah pihak. Saat ini sudah terdapat payung penyelenggara *fintech* syariah yang ditunjuk oleh OJK yaitu Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sehingga setiap *fintech* syariah dapat memiliki wadah untuk melakukan pengembangan.<sup>44</sup> Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM-UMKM syariah untuk mencari pendanaan berbasis syariah yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan *recovery* akibat dampak Covid-19 dan juga untuk mengembangkan usahanya dalam menjawab tantangan era digital di masa depan.

### **(iii) Percepatan Digitalisasi dan Penguatan Inovasi/Riset**

Transformasi ekonomi digital berbasis inovasi dan adopsi teknologi digital menjadi semakin urgen untuk menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas tantangan global-domestik saat ini dan sekaligus mengawal optimisme bertransisi menuju negara maju yang kompetitif dan inklusif dalam jangka menengah-panjang. Untuk itu, arah pembangunan sangat perlu untuk didorong dengan mempercepat proses digitalisasi dalam segenap aspek serta membangun ekosistem inovasi yang memberdayakan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara teoretis, menurut Lawrence dkk. (2020), ekosistem inovasi adalah jaringan organisasi dan individu dengan aset seperti kreativitas manusia, ketajaman bisnis, penemuan ilmiah, dan modal investasi. Organisasi dan individu ini datang bersama-sama menumbuhkan ide agar bisa tumbuh menjadi pelaku usaha yang kuat dan industri kompetitif yang dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi secara positif.<sup>45</sup> Namun demikian, ekosistem inovasi di negara kita khususnya sinergi pemerintah, institusi riset, dan dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya relatif belum berjalan. Padahal dengan adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak yang terlibat, dapat mendorong hilirisasi dan komersialisasi (pemanfaatan) hasil penelitian dan inovasi pada gilirannya.

Dimensi lain dari riset dan inovasi pada konteks Indonesia adalah faktor keragaman tingkat perkembangan baik SDM, dunia usaha dan sektor ekonomi antar daerah. Untuk itu, aplikasi inovasi/hasil riset tidak mungkin berlaku seragam/homogen, sehingga tentunya perlu mengakomodasi “local wisdom” dan faktor spesifik yang bersifat inheren di daerah dimaksud.

---

<sup>44</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20200824/563/1282420/afsi-resmi-ditunjuk-ijk-sebagai-payung-bagi-penyelenggara-ara-fintech-syariah>

<sup>45</sup> Sumber: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/06/ksi-1591869641.pdf>

Sebagai ilustrasi, adopsi mesin traktor untuk menggarap sawah mungkin relevan di Jawa, namun di daerah lain, belum tentu *applicable*, sehingga perlu dibuat teknologi alternatif yang *customized* untuk di daerah tersebut. Dalam hal ini, teknologi yang tepat guna dapat dipandang sebagai *frugal innovation*, yang didefinisikan sebagai sebuah proses desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keadaan masyarakat untuk melakukan inovasi produk dan layanan yang mudah beradaptasi, terjangkau, dan mudah diakses. *Frugal innovation* merupakan pilihan yang baik bagi Indonesia, karena berorientasi pada penyediaan teknologi yang terjangkau secara ekonomi. *Frugal innovation* mendorong individu untuk mengasah kreativitasnya dan kewirausahaan yang inovatif (Juhro dan Aulia, 2019). Selanjutnya, dalam konteks respons terhadap pandemi Covid-19 dan persiapan menuju era kenormalan baru, Indonesia membutuhkan inovasi (litbang) yang terutama difokuskan untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan sekaligus meminimalkan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini.

Untuk memitigasi risiko dari meningkatnya ketimpangan dan terhambatnya perkembangan generasi masa depan akibat pandemi Covid-19, maka dibutuhkan inovasi kebijakan dalam setiap tahap menuju era selanjutnya.

### **Bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan**

Hasil polling terhadap sejumlah ekonom, mayoritas setuju bahwa langkah optimal saat ini adalah untuk berinvestasi lebih besar untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan melalui pembangunan RS sementara, peningkatan intensitas uji masal, peningkatan produksi ventilator serta alat pelindung diri, dan pemberian insentif untuk tenaga medis.<sup>46</sup> Akses kesehatan Indonesia saat ini masih cukup terbatas. Untuk dapat mengendalikan pandemi Covid-19 ini, diperlukan akses yang menyeluruh, terutama untuk golongan yang rentan terkena virus Covid-19 ini. Untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan, pemanfaatan teknologi *telemedicine* sebagai akses masyarakat terhadap kebutuhan kesehatan seperti konsultasi dengan dokter dan pengiriman obat-obatan akan sangat membantu proses berobat masyarakat tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan secara fisik. Pada daerah *hotspot* Covid-19 (seperti Jabodetabek, Jawa Timur, dan Bali), diperlukan inovasi pemanfaatan *mobility information* agar pekerja dapat melakukan pekerjaannya secara *remote*. Beberapa inovasi pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) juga dapat diterapkan seperti penggunaan CCTV

---

<sup>46</sup> <https://irsa.or.id/2020/04/02/quick-on-line-survey-result-among-economists-on-policies-to-manage-the-covid-19-crisis/>

untuk mendeteksi pelanggaran *social distancing*, penyederhanaan administrasi rumah sakit menggunakan *chatbot*, dan *software* berbasis AI untuk mendeteksi infeksi Covid-19. Pengembangan berbasis komunitas atau *Community-driven development* (CDD) dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan protokol kesehatan dengan basis kelurahan/kecamatan untuk penyebaran informasi kesehatan, *supporting* faskes lokal, penegakan *social distancing*, dan penyediaan kebutuhan primer.

Dalam jangka menengah, diperlukan juga kerja sama investasi termasuk dengan swasta untuk penyaluran layanan kesehatan terutama apabila vaksin sudah dapat diciptakan karena proses penyaluran vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan secara efisien. Dalam jangka panjang, diperlukan perbaikan kondisi dan peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan publik baik yang bersifat fisik maupun nonfisik sebagai persiapan akan kemungkinan adanya pandemi berikutnya di masa depan. Pendekatan *one health system* yang memadukan sistem kesehatan dengan keamanan pangan, kontrol penyakit menular antara manusia dan hewan, serta keselamatan lingkungan juga perlu dilakukan Indonesia sebagai transformasi sistem kesehatan publik untuk jangka panjang. Adopsi *telemedicine* secara luas juga diperlukan dalam jangka panjang agar akses masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa kesehatan dapat semakin meningkat.

Untuk menjaga dan meningkatkan inklusivitas pembangunan, maka dibutuhkan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Saat ini, Indonesia telah memiliki beberapa pondasi perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program Indonesia pintar (PIP), jaminan kesehatan nasional (JKN), kartu sembako, dan kartu pra-kerja. Langkah paling logis tentunya adalah dengan meningkatkan cakupan program-program tersebut untuk menjangkau lebih banyak penerima bantuan karena meningkatnya masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi ini. Pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan dapat menjadi agen percepatan pendataan keluarga penerima yang layak untuk mendapatkan perlindungan sosial tersebut. Diperlukan juga peningkatan nilai bantuan yang diberikan pada jangka pendek ini untuk memitigasi berkurangnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan pada kelompok rentan. Pada jangka menengah, skema *cash for work* melalui program-program padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja diperlukan sebagai stimulus masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan produktif. Selain itu produksi yang inklusif dalam bentuk pemberian bantuan bagi pekerja informal dan industri mikro, terutama yang bergerak di bidang pangan, serta pelatihan untuk pekerja dan wirausaha juga dapat membantu

kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya. Dalam jangka panjang, diperlukan pengembangan inovasi jaringan sosial yang lebih memanfaatkan teknologi digital dan responsif terhadap kejutan negatif. Inovasi di dunia pendidikan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan di dunia kerja juga akan mengurangi potensi jumlah kelompok yang rentan terhadap efek negatif kondisi perekonomian yang mungkin akan terjadi di masa depan.

Di sektor pendidikan, metode pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh seluruh lembaga pendidikan merupakan respons terhadap kondisi pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* (AI), layanan pembelajaran berbasis video bisa memberikan *feedback* kepada guru mengenai bagian mana dari suatu kurikulum pembelajaran yang paling sulit untuk dipahami oleh murid.<sup>47</sup> Dunia usaha yang menggunakan TIK untuk memberikan layanan pendidikan (EdTech) di Indonesia semakin berkembang, dan beberapa diantaranya mulai bersaing secara global. Maka dari itu, pengembangan pendidikan yang mengandalkan teknologi digital melalui pemanfaatan teknologi di sekolah dan universitas serta pengembangan dunia usaha yang bergerak di bidang platform EdTech harus diperkuat agar inovasi pendidikan berbasis digital dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kunci dari penyediaan akses kesehatan, jaminan sosial, pendidikan, dan berbagai fasilitas dari pemerintah adalah data. Tanpa pendataan yang baik, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menentukan target dari setiap program pembangunan. Untuk itu, dipandang sangat perlu untuk mengembangkan sistem identitas penduduk berbasis digital, sebagai langkah inovasi agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pemerintah dan juga kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta berbagai tujuan lainnya (*interoperability*). *Interoperability* ini dapat mencakup layanan finansial digital, layanan jaringan sosial, dan inklusivitas dalam ekonomi digital, sehingga dapat memberi manfaat yang optimal. Dengan adanya identitas digital ini dapat memperlancar sistem pembayaran di perbankan, juga kemudahan pendataan wajib pajak, efisiensi administrasi bisnis maupun pemerintahan, dan kemudahan serta keamanan bagi konsumen maupun produsen dalam melakukan transaksi digital. Akan tetapi, *interoperability* dari identitas digital ini juga mempunyai sejumlah tantangan yaitu dibutuhkannya sistem keamanan digital yang terjamin, sistem persetujuan dalam pembagian data, dan risiko eksklusivitas terhadap

---

<sup>47</sup> <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/25/how-is-ai-used-in-education-real-world-examples-of-today-and-a-peek-into-the-future/#c64a0b586e8b>

masyarakat dengan literasi digital yang rendah dan akses internet yang masih terbatas.

## Adopsi teknologi

Aplikasi inovasi yang dapat mengembangkan teknologi tepat guna dan penggunaan sumber daya dalam negeri sebagai substitusi impor sangat dibutuhkan agar Indonesia dapat bertahan dalam situasi pandemi dan juga keluar dari pandemi sebagai negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Adopsi teknologi di sektor andalan yaitu agrikultur/makanan dan manufaktur sehingga sektor tersebut tidak lagi tertinggal dalam penggunaan teknologi dan tidak ketergantungan impor akan membantu banyak pelaku usaha dan tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan. Di sisi lain, sektor-sektor potensial yang dapat berkembang dalam menghadapi pandemi ini seperti kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pendidikan juga perlu diberdayakan.

Indonesia harus dapat mengidentifikasi cara mengubah sistem agrikultur yang ada sekarang, kebanyakan petani hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar sehingga kebanyakan petani hanyalah pekerja di lahan pertanian tersebut. Hal ini menyebabkan *economies of scale* tidak dapat terjadi dan juga penggunaan peralatan modern jadi terhambat. Infrastruktur distribusi yang masih terbatas menyebabkan banyak hasil tanam yang tidak dapat didistribusikan secara efisien. Salah satu aplikasi teknologi untuk menghadapi hal ini adalah penggunaan *e-commerce* yang secara langsung menghubungkan petani dengan konsumen. Dengan begitu, petani dapat melakukan penanaman dengan lebih aman karena mereka telah mengetahui seberapa banyak permintaan yang akan mereka dapatkan. Penggunaan teknologi pertanian yang dapat membantu produktivitas hasil panen seperti mesin pemilih bibit unggul, alat pemotongan dan pengantongan padi, alat pengering kedelai, dan instalasi pengolahan limbah dapat meningkatkan kapabilitas sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

Sektor manufaktur juga merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19, banyak pabrik yang mengurangi produksinya karena pekerja harus bekerja sesuai jam kerja yang diatur dalam kondisi pandemi ini. Sektor manufaktur memiliki tantangan dalam memanfaatkan teknologi agar *remote working* tetap memberikan produktivitas yang tinggi. Teknologi *real time monitoring* dapat membantu pabrik dalam mengelola konsumsi energi dan juga melakukan kontrol terhadap peralatan dan mesin. Pemanfaatan teknologi robot untuk melakukan otomatisasi berbagai

perakitan produk juga dapat mengoptimalkan produksi. Dengan semakin majunya teknologi internet 5G sehingga akses data menjadi semakin cepat, perkembangan *industrial internet of things* (IIoT) juga menjadi semakin cepat. IIoT dapat membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan aman bagi pekerja pabrik. Potensi peningkatan efisiensi sektor manufaktur ini dapat menjadi momentum Indonesia untuk mengurangi berbagai ketergantungan impor, terutama barang-barang yang seharusnya bisa diproduksi tanpa harus memiliki kemampuan teknologi yang tinggi.

## **Kolaborasi riset**

Inovasi tentunya tidak terlepas dari tentunya tidak terlepas dari kegiatan pengembangan penelitian/riset dan pengembangan (litbang). Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan gaya hidup dan tatanan ekonomi menuju *less contact economy* yang ditandai dengan adanya *hyperconnectivity* antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adaptasi kebiasaan baru ini menyebabkan pergeseran pola bisnis, perilaku masyarakat, dan struktur industri. *Hyperconnectivity* menuntut adanya ekosistem digital yang terhubung antar sektor sehingga ketahanan dan efisiensi kegiatan ekonomi dapat meningkat dan Indonesia dapat semakin mendekati revolusi industri 4.0. salah satu inisiatif Kemenristek untuk berkontribusi pada penanganan Covid-19 adalah melalui program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 yang merupakan kolaborasi antar lembaga, IDEathon yang merupakan wadah untuk masyarakat untuk berinovasi, Portal SINTA - Covid-19 yang menyediakan deskripsi ilmiah dan data penunjang riset Covid-19, dan Riset-Inovasi Diaspora yang merupakan skema pendanaan riset dan inovasi.

Saat ini terdapat lebih dari 200 program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa tema yaitu pencegahan Covid-19, skrining Covid-19, alat kesehatan pendukung, obat-obatan dan terapi, *multi clinic*, dan sosial humaniora. Salah satunya adalah pengembangan vaksin di Indonesia yang diberi nama vaksin “merah-putih” yang menggunakan isolat virus Indonesia. Vaksin merah-putih ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan kerja sama impor, dan terutama menjaga kedaulatan kesehatan manusia Indonesia secara swasembada.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/menristek-kepala-brin-jelaskan-perkembangan-vaksin-merah-putih-dan-tegaskan-mutasi-d614g-tidak-menghambat-pengembangan-vaksin/>

#### (iv) Pengembangan Modal Manusia

Kondisi pandemi saat ini dapat digunakan sebagai momentum untuk membuat terobosan kebijakan guna perbaikan/peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM secara integratif, efektif dan efisien. Dalam jangka pendek, otoritas pendidikan dapat mengambil sejumlah kebijakan prioritas sebagai berikut. *Pertama*, melakukan relokasi anggaran untuk mendukung konektivitas internet sehingga siswa tetap dapat bersekolah meski melalui interaksi daring (PJJ). Siswa, guru, dan mahasiswa dan dosen masing-masing mendapatkan subsidi pulsa secara reguler. Selain itu, terdapat alokasi untuk tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, dan guru besar. Untuk membantu perekonomian para pengajar<sup>49</sup>.

Selain itu, instansi pemerintah, termasuk BUMN, dan swasta yang menjalankan WFO serta masyarakat yang *high income* juga dapat berperan dengan memberikan bantuan sosial (*social responsibility*) untuk penyediaan internet gratis khususnya bagi siswa-siswa dengan kategori prasejahtera (*low income*) dan orang tuanya yang terkena PHK di lingkungan kantor/ area kerjanya masing-masing. *Kedua*, proses penerimaan siswa di tahun ajaran baru yang lalu, pemerintah telah memberikan tambahan kuota untuk penerimaan jumlah siswa kurang mampu di sekolah negeri (tanpa iuran sekolah), meskipun sempat menimbulkan polemik akibat kebijakan yang dilakukan secara insidental. *Ketiga*, dapat dilakukan secara spasial, untuk pembukaan sekolah secara tatap muka khususnya di zona hijau, namun dilakukan secara gradual dan dengan standar protokol Covid.

Selain masalah yang bersifat urgen terkait pembelajaran via daring seperti di atas, permasalahan klasik di pendidikan juga terkait dengan sejumlah faktor, yaitu alokasi anggaran, kualitas guru dan faktor kelembagaan. *Pertama*, kebijakan terkait anggaran pendidikan, meskipun alokasi anggarannya sudah mencapai 20 % dari total belanja negara secara nasional, namun bila dibandingkan dengan *GDP per capita*, rasio belanja pendidikan kita sebesar 3,3 % relatif masih lebih rendah dari Vietnam (6,3%) atau Thailand (4,1%)<sup>50</sup>. Untuk itu, di era *recovery* dan pasca pandemi nantinya, prioritas pertama kebijakan adalah menambah/ meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan. Meskipun sudah naik 20 %, namun sebetulnya hitungan secara riil per kapita masih sangat rendah, dan ini

---

<sup>49</sup> Sejalan dengan ini, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 mengatur ketentuan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai April 2020 bisa digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat Covid-19. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan subsidi kuota internet selama empat bulan mulai dari September 2020. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kemendikbud-berencana-subsidi-kuota-internet-untuk-guru>

<sup>50</sup> See World Bank (2018)

implikasinya pada daya saing pendidikan nasional yang relatif tertinggal dengan negara *peers* di ASEAN khususnya.<sup>51</sup>

*Kedua*, dalam rangka peningkatan kualitas guru, strategi kebijakan yang dapat dilakukan terutama adalah (i) rekrutmen untuk tenaga calon guru dilakukan/dipilih berdasarkan kualifikasi yang tepat (*competency-based*), atau bukan karena faktor lainnya. Untuk *existing* guru, perlu dilakukan sertifikasi guru yang standar untuk *update* keilmuan dan wawasannya; (ii) untuk memperoleh guru yang kompetensi tinggi dibutuhkan pula insentif yang menarik bagi calon guru yang baru melamar maupun untuk *existing* guru sehingga punya motivasi tinggi untuk membagikan ilmu ke para siswanya.

*Ketiga*, sinkronisasi antar kelembagaan juga menjadi faktor kunci untuk perbaikan kualitas pendidikan khususnya di daerah. Kewenangan desentralisasi yang diberikan kepada kepala daerah (walikota/bupati/gubernur) seharusnya dimanfaatkan untuk memilih kandidat pejabat/staf dinas pendidikan yang *capable* dan berintegritas tinggi, atau bukan karena faktor subyektif lainnya. Selain itu, sekolah biasanya memiliki komite sekolah yang bisa memainkan peran penting dalam manajemen sekolah, namun umumnya mereka tidak memiliki otoritas, kapasitas, dan sumber daya untuk dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan manajemen sekolah (perencanaan operasional), turut menyusun dan sekaligus mengawasi penggunaan anggaran yang akuntabel dan efektif seperti dana BOS misalnya. Untuk itu, sangat disarankan keberadaan peran komite sekolah ini lebih dimanfaatkan di masa mendatang.

Kondisi pandemi menyebabkan proses belajar-mengajar konvensional dengan tatap muka menjadi terhambat. Walaupun metode PJJ telah diimplementasikan, masih ada beberapa pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara daring seperti praktikum di lab, pengabdian di desa (KKN), dan magang yang membutuhkan keberadaan fisik secara langsung. Maka dari itu dibutuhkan metode yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembelajaran dan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Konsep perpaduan pembelajaran tatap muka dan daring (*blended learning*) dapat menjadi solusi untuk perguruan tinggi agar tetap dapat menyediakan seluruh tipe pembelajaran bagi mahasiswa. Proses *blended learning* ini juga dapat membantu mahasiswa yang ingin mengambil SKS di luar program studinya/perguruan tingginya.

---

<sup>51</sup> [https://news.okezone.com/read/2020/08/07/65/2258521/kemendikbud-bakal-berikan-bantuan-kuota-internet-ke-25-mahasiswa?utm\\_source=dable](https://news.okezone.com/read/2020/08/07/65/2258521/kemendikbud-bakal-berikan-bantuan-kuota-internet-ke-25-mahasiswa?utm_source=dable)

Permasalahan yang krusial lain terkait pendidikan adalah kurikulum<sup>52</sup>, terutama mengingat kurikulum yang digunakan saat ini cenderung belum mengakomodasi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini, apalagi kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Hal ini terindikasi dari rendahnya kemampuan membaca murid Indonesia pada hasil PISA.<sup>53</sup> Rendahnya kemampuan lulusan sekolah menengah ini menyebabkan mereka tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan di pasar kerja dan akhirnya cenderung untuk bekerja di pekerjaan dengan upah yang rendah. Secara umum, kurikulum yang digunakan masih bersifat “hafalan”, belum menerapkan *high-order thinking skills* (HOTS) yang lebih berorientasi pada analitis dan pemecahan masalah.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi (PT) terus meningkat selama 5 tahun terakhir, dan di 2019 tercatat naik menjadi 5,89% dari total angkatan kerja 13 juta orang.<sup>54</sup> Kondisi ini perlu dicermati secara mendalam, dan salah satu faktor utama penyebabnya adalah minimnya skill yang dimiliki oleh lulusan PT dimaksud. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi dengan baik, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan yang dibutuhkan industri, sehingga universitas dan/ lembaga pendidikan khususnya untuk vokasi/kejuruan dapat menyiapkan tenaga terampil sejak awal (*link and match*). Akreditasi perguruan tinggi juga secara umum relatif masih banyak berada di bawah standar nasional terutama di luar Jawa-Bali, sehingga banyak perguruan tinggi yang kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan industri belum tersambung dengan baik.<sup>55</sup>

Untuk itu, perlu dilakukan sejumlah langkah kebijakan strategis terutama dengan melakukan reformasi kurikulum dan sistem pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada pengembangan SDM yang dapat meningkatkan *skill* berbasis sains, atau yang dikenal dengan STEM (*science, technology, engineering, and mathematics*). Kurikulum ini juga mencakup keterampilan seperti *complex problem solving, creative and critical thinking, social skills*, dan kemauan untuk terus mempelajari hal baru, yang tentunya akan sangat relevan dalam konteks transformasi peradaban baru menuju era digital dan

---

<sup>52</sup> Lihat World Bank (2018)

<sup>53</sup> Hasil PISA 2018 menunjukkan 70 % murid Indonesia berada pada level 1 kemampuan membaca dan 72 % murid Indonesia berada pada level 1 kemampuan matematika.

<sup>54</sup> <https://www.kompasiana.com/heryizkak7272/5e27aff4d541df08eb003b42/coba-lihat-fenomena-banyaknya-pengangguran-terdidik-di-tahun-2020?page=all>

<sup>55</sup> Meskipun Indonesia telah membuat Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pendefinisian pekerjaan dan berbagai tugas yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut (kerangka kompetensi) masih menghadapi kendala, terlebih lagi keterlibatan sektor swasta pada persiapan KKNI juga masih terbatas.

otomasi di masa depan (Deming, 2015). Pengembangan keterampilan berbasis STEM ini akan menjadi sistem pembelajaran seumur hidup modern untuk membantu pekerja beradaptasi dan memperbarui keterampilan mereka selama kariernya. Di era digital saat ini dan akan semakin terus berkembang di masa mendatang, terdapat dua jenis keterampilan yang sangat penting: *pertama*, dengan semakin berkurangnya tugas rutin, *soft skill* seperti kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja dalam tim, memimpin, memecahkan masalah dan mengatur diri sendiri akan semakin dibutuhkan; *kedua*, pentingnya literasi digital semakin meningkat. Keterampilan umum TIK (teknologi informasi dan komunikasi) individu, seperti kemampuan untuk menggunakan alat komunikasi dan pencarian informasi atau *software*, akan semakin dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas *skill* khususnya bagi tamatan perguruan tinggi, Pemerintah (Kemendikbud) telah menetapkan Program Kampus Merdeka, yang pada intinya adalah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mendirikan program studi baru, pengajuan akreditasi, perubahan status dari badan layanan umum menjadi badan hukum, serta pemberian hak untuk mengambil mata kuliah di luar program studi untuk mahasiswa dan pendefinisian ulang satuan kredit semester (SKS) sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar” sehingga kegiatan seperti magang, pertukaran pelajar, riset, dan lain-lain dapat dihitung sebagai SKS yang diambil oleh mahasiswa.<sup>56</sup> Dengan demikian, diharapkan nantinya para lulusan kampus tidak hanya menguasai teori, namun juga menguasai *skill* yang *applicable* sehingga *ready to work* setelah tamat kuliah nantinya.

#### **(v) Penguatan Kelembagaan Inklusif**

Tantangan kehidupan ke depan akan semakin menghadapi banyak ketidakpastian dan semakin kompleks. Selain dampak pandemi virus Covid-19 ini, tantangan besar lain yang saat ini kita hadapi bersama adalah kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar akibat resesi ekonomi dan efek pemanasan global. Dari bahasan sebelumnya, telah dibahas bahwa perilaku kelembagaan ekonomi dan politik yang bersifat ekstraktif yang hanya menguntungkan individu/grup sendiri justru dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak instabilitas secara nasional, dan pada akhirnya akan membawa kerugian bersama. Untuk itu, guna mengatasinya dibutuhkan semangat berkolaborasi dari semua pihak baik masyarakat, swasta dan pemerintah, dan bukan hanya di tingkat domestik, namun juga secara internasional. Dalam hal ini, pandangan lazim di masyarakat,

---

<sup>56</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>

persoalan sesulit apa pun, akan dapat diselesaikan jika dilakukan secara bersama-sama atau dengan berkolaborasi. Adapun interaksi yang bersifat kolaboratif memiliki beberapa komponen utama yaitu tujuan bersama, struktur yang simetris, dan tingkat negosiasi, interaksi, serta interdependensi yang tinggi dan diharapkan dapat menciptakan ide/inovasi sebagai motivasi/tujuan bersama untuk mencapai penghidupan/kesejahteraan yang lebih baik. Untuk menjadi bangsa yang maju, diperlukan kemampuan melakukan inovasi, mengelola sumberdaya secara efisien, serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dalam kaitan ini, peran kepemimpinan ini sangatlah besar, dikarenakan bukan hanya menghindari keputusan berinovasi saja, namun juga ketidaksadaran atas kebutuhan pelebagaan atau institutionalisasi inovasi, yang merupakan penyebab utama. Jadi pemimpin diharapkan bukan hanya berani mengambil satu keputusan yang mungkin dipandang spekulatif untuk berinovasi, namun lebih dari itu melembagakan kemampuan dan proses inovasi (Juhro & Aulia, 2019). Jadi kepemimpinan, terutama di tingkat strategis adalah penentu utama apakah suatu organisasi akan berinovasi dan berinovasi secara terus-menerus dan berkelanjutan, atau tidak sama sekali. Hal ini dikarenakan tekanan evaluasi performa jangka pendek dan masa jabatan yang terbatas. Hal ini juga berlaku dalam kepemimpinan publik di pemerintahan yang evaluasinya dilakukan dalam jangka pendek dan masa jabatannya terbatas.

Untuk mencapai tujuannya secara optimal, seorang pemimpin yang efektif tentu perlu mempunyai beberapa pendekatan/strategi eksekusi di lapangan, terutama mengingat kita saat ini berada di era ketidakpastian yang tinggi. Salah satu pendekatan utama yang sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di era ini adalah kolaborasi katalitis (*catalytic collaboration*). Menurut Juhro dkk. (2020c), *catalytic collaboration* merupakan pendekatan baru untuk membuat transformasi sosial/ekonomi yang dapat membantu berbagai organisasi untuk bekerja bersama-sama untuk tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar tujuan masing-masing organisasi tersebut. Dalam penerapannya, *catalytic collaboration* memiliki empat komponen utama, yaitu memprioritaskan pembelajaran, menerapkan cara berpikir dan bertindak yang sistematis, membuka akses sebesar-besarnya atas aset/informasi bersama, serta membangun hubungan jangka panjang yang beraneka ragam dan bersifat transformasional.

*Catalytic collaboration* menjadi relevan untuk diterapkan karena isu-isu yang muncul semakin hari semakin kompleks. *Catalytic collaboration* dapat menyatukan potensi-potensi pertumbuhan ekonomi yang terdapat di tiap daerah sehingga pertumbuhan ekonomi nasional semakin baik. Seiring dengan kompleksitas, tantangan, perubahan yang terjadi secara global,

kebutuhan akan pemimpin yang dapat membantu sebuah organisasi untuk bertahan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi semakin tinggi. Pentingnya *catalytic collaboration* menunjukkan seorang pemimpin yang memiliki kompetensi dari *transformational leadership* tidaklah cukup, diperlukan juga adanya *catalytic collaboration* untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Dengan kompetensi dan kolaborasi dimaksud, pemimpin dapat menggerakkan organisasinya dengan solid untuk mencapai target secara efisien dan efektif.

Dalam kondisi wabah Covid-19 dan resesi ekonomi saat ini yang telah menimbulkan dampak kerugian kesehatan fisik-mental masyarakat dan tekanan sosial-ekonomi, namun dari sisi lain, juga dapat dipandang sebagai *opportunity* atau momentum yang tepat untuk menerapkan *catalytic collaboration* terutama dalam merespons dampak pandemik yang luar biasa saat ini. Pemikiran dan tindakan yang sistematis dengan dasar pembelajaran terhadap kondisi aktual pada tiap fase pandemi ini akan menciptakan respons yang sesuai sasaran serta memperhatikan segala konsekuensinya secara komprehensif. Pembukaan akses informasi oleh pemerintah akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari kondisi terkini melalui informasi yang terpercaya dari pemerintah. Sinergi antar lembaga pemerintahan yang transformasional juga dibutuhkan karena dampak dari Covid-19 yang bersifat multidimensi, sehingga dibutuhkan hubungan yang baik antar pemimpin suatu wilayah/lembaga sehingga respons yang dilakukan adalah hasil dari kolaborasi yang mempertimbangkan komponen keberlanjutan. Hal ini tentu saja akan dapat diaplikasikan apabila pemimpin dimaksud terkait memiliki kompetensi dari *transformational leadership* yang dapat meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam melakukan adaptasi dan inovasi terhadap setiap masalah yang ditimbulkan oleh Covid-19.<sup>57</sup>

Dapat ditegaskan bahwa dalam konteks inovasi, kepemimpinan di dalam suatu organisasi seharusnya juga tidak bergantung hanya pada sebagian individu yang inovatif, namun terdapat proses terstruktur dan terlembaga yang membuat orang-orang menjadi lebih inovatif sehingga terdapat proses pemikiran yang berkembang dari ideasi, lalu tumbuh jadi solusi, lalu berkembang menjadi inovasi, hingga kemudian menciptakan disrupsi yang

---

<sup>57</sup> *Transformational leadership* merupakan kepemimpinan yang menginspirasi dan mendorong anggota organisasi, maupun anggota masyarakat, untuk menentukan sebuah tujuan yang besar dan mencapainya bersama-sama. Dalam fokusnya untuk memengaruhi orang lain, terdapat empat level hubungan antara pemimpin dan anggota dalam kepemimpinan transformasional, yaitu secara profesional, personal, emosional, dan intelektual. Keempat level hubungan/pengaruh pemimpin terhadap anggota ini akan menentukan efektivitas transformasi dalam diri anggota.

membawa pembaruan. Terobosan yang membawa pembaruan adalah akibat, sedangkan pelembagaan inovasi dalam bentuk ekosistem inovasi adalah penyebabnya. Kepemimpinan transformatif tidak hanya berani mengambil risiko dan keluar dari tekanan evaluasi jangka pendek dan masa jabatan terbatas, namun juga memandang inovasi sebagai hal yang perlu dijaga keberlanjutannya dengan menstrukturisasi dan melembagakan proses inovasi. Bentuk komitmen dan keseriusan organisasi atas hal ini terlihat dengan adanya suatu posisi kepemimpinan senior di level strategis dalam bentuk *Chief Innovation Officer* (CIO) atau *Chief Networking Officer* (CNO), yang berbeda fungsinya dengan *Chief Information Officer* (CIO). Tentunya dengan adanya seorang CIO/CNO, maka akan ada departemen khusus dengan fokus inovasi, daripada menjadikan inovasi sebagai kegiatan sampingan atas tiap departemen. Pada akhirnya, hasil yang dapat terlihat adalah terobosan yang membawa pembaruan yang tidak hanya berdampak, namun juga berkelanjutan. Inovasi-inovasi kebijakan dengan mengandalkan kemajuan teknologi dan digitalisasi yang terwadahi oleh institusi yang inovatif akan sangat membantu dalam percepatan penanganan kesehatan dan pemulihan kondisi negara dari dampak pandemi Covid-19 ini.

Selain kepemimpinan dalam organisasi formal, aspek kepemimpinan yang tangguh dan transformatif juga sangat dibutuhkan untuk memajukan masyarakat kita yang mayoritas masih berpendidikan rendah, tinggal di pedesaan/pendalaman yang jauh dari akses informasi dan juga belum banyak terjangkau oleh infrastruktur modern khususnya digitalisasi. Untuk itu, peranan tokoh agama dan masyarakat di daerah tersebut sebagai *informal leaders* juga mempunyai peranan kritical untuk membawa daerahnya menjadi lebih maju dan bertransformasi di segala bidang.

Selain *feature* kelembagaan dengan *leadership*, sebuah negara dengan yang kuat juga seharusnya memiliki kemasyarakatan (*followership*) yang madani, ditopang oleh modal sosial dan tingkat pendidikan yang tinggi. Kondisi ini juga sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi krisis kesehatan saat ini, dimana komunitas seharusnya akan mudah untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari di era *new normal*. Dengan adanya *followership* yang kuat, rakyat yang memiliki *trust* dan secara solid/kompak dalam mengikuti pemimpinnya akan menciptakan masyarakat yang madani. Beberapa contoh negara yang telah mencapai tingkat kemandirian tinggi adalah Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara tersebut telah memiliki modal sosial yang kuat dan tingkat pendidikan yang tinggi. Masyarakat yang madani memiliki pandangan yang rasional yang diimbangi dengan pendekatan emosional sehingga masyarakat ini bersifat inklusif dan toleran. Di Indonesia, di tengah musibah yang melanda saat ini, memiliki momentum

untuk memanfaatkan *trust* dan semangat gotong royong sebagai komponen penting dari modal sosial. Transformasi Indonesia menuju masyarakat madani dengan *transformational leadership* yang didukung *followership* yang kuat akan dapat mengakselerasi Indonesia dalam beradaptasi di era kenormalan baru dan menjadi aset besar untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju, serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa depan.

Dalam konteks penguatan kelembagaan dalam skala yang lebih luas, sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis maka Indonesia juga dituntut untuk mampu memanfaatkan arah perkembangan ini dengan segera memperbaiki iklim berusaha, mewujudkan kemudahan lalu-lintas barang dan jasa, meningkatkan daya saing infrastruktur dan suprastruktur ekonomi, dan terus merespons secara proaktif tren ekonomi dunia. Oleh karenanya, penguatan kolaborasi dalam artian revitalisasi kemitraan atau kerjasama dengan blok ekonomi regional dan global menjadi salah satu langkah yang sangat strategis dalam mendorong daya saing dan pemasaran produk-produk ekspor Indonesia. Terlebih mengingat kedekatan negara-negara anggota secara geografis dan hubungan kerja sama yang selama ini sudah dibangun dalam bilateral. Revitalisasi kemitraan tersebut juga akan mendorong peran Indonesia lebih jauh ke dalam rantai pasok global (*global supply chain*) dengan memanfaatkan *backward linkage*, yakni memenuhi kebutuhan bahan baku atau bahan penolong yang lebih kompetitif dari negara mitra lainnya; dan *forward linkage*, yakni dengan memasok bahan baku atau bahan penolong ke negara lainnya. Langkah ini akan mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, khususnya beberapa sektor prioritas sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

### 3.5. Strategi Implementasi

Mengacu pada 5 strategi pokok dalam rangka pengembangan ekonomi inklusif di era normal, selanjutnya dapat dirumuskan sejumlah strategi utama dalam implementasinya sebagai berikut.

- Pertama, penguatan strategi dengan mencari solusi “*dynamic optimization*” dengan *multiple constraints*. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa saat ini perekonomian dunia dan nasional menghadapi tantangan yang sangat besar dan kompleks. Pandemi covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia bukan hanya mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, tetapi juga menghantam kinerja perekonomian global. Akibatnya, perekonomian dunia, termasuk Indonesia, menghadapi ancaman krisis dan menghadapi risiko peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks ini, krisis kesehatan

dan krisis ekonomi membuat otoritas di setiap negara di dunia menghadapi masalah yang begitu kompleks (*multiple constraints*). Dalam sudut pandang "*dynamic optimization*", pengambilan keputusan tentu membutuhkan penanganan yang terencana, terukur dan terpadu. Oleh karena itu, penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi harus berjalan beriringan, karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi saling berkaitan. Penyelesaian krisis kesehatan akan membutuhkan kekuatan ekonomi; dan sebaliknya krisis ekonomi mensyaratkan penyelesaian krisis kesehatan dengan baik.

- Kedua, strategi dan *timing* respons kebijakan untuk mengatasi kombinasi *supply-demand shocks* secara paralel. Fenomena pandemi Covid-19 juga menunjukkan tekanan sisi *supply* dan *demand* secara bersamaan; yang saling memberikan *feedback-loop* satu sama lain. Oleh karena itu, strategi dan *timing* respons kebijakan menjadi penting. Dari berbagai pengalaman di berbagai negara dan pengamatan fenomena yang terjadi di lapangan, diyakini agar otoritas perlu merespons tekanan sisi *demand* dalam jangka pendek. Spirit dasar dari berbagai langkah yang dilakukan tersebut adalah bahwa, dalam jangka pendek, bagaimana menumbuhkan permintaan masyarakat di tengah *supply disruption* dan *demand shock* yang terjadi. Sisi permintaan ditumbuhkan terlebih dulu dengan harapan akan diikuti oleh peningkatan sisi penawaran. Untuk itu, peran kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk men-*jumpstart* perekonomian melalui strategi penyerapan anggaran yang cepat dan tepat, sebagaimana pula program peningkatan pengeluaran untuk *public goods*, seperti bantuan sosial, yang dilakukan pada masa-masa awal dan kemudian diikuti oleh program-program yang lebih terintegratif, yaitu PEN. Dalam perspektif waktu selanjutnya, diharapkan dampak stimulus moneter dan keuangan akan bekerja untuk mengakselerasi kegiatan sektor riil lebih lanjut, tentunya dengan dukungan peran aktif dunia usaha dan masyarakat.
- Ketiga, penguatan sinergi dan terobosan (*breakthrough*). Langkah penyelamatan perekonomian perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengawal penerapan tatanan kehidupan baru (*new normal*) untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. Pemahaman konteks *new normal* akan mengarahkan persepsi kita mengenai kondisi yang tentunya berbeda dengan kondisi sebelumnya. Namun demikian, dalam *new normal* kita perlu merumuskan berbagai opsi strategi kebijakan yang tepat, sehingga sekaligus dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Penerapan strategi dalam *era new normal* diharapkan dapat

menyokong pertumbuhan ekonomi, dimana dengan mulai beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan pada akhirnya mengontrol pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, melalui *new normal*, otoritas kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat – baik di pusat maupun daerah, perlu memperkuat sinergi untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat; serta di sisi lain, semua pihak juga diharapkan tetap berupaya menghentikan penyebaran pandemi Covid-19. Dalam hal ini, pengendalian krisis dan pemulihan ekonomi nasional perlu mengedepankan kepemimpinan (yang kuat) serta menggunakan cara-cara pemulihan yang lebih inovatif guna menciptakan terobosan-terobosan (*breakthrough*). Pendekatan pemulihan yang bersifat sektoral yang lebih fokus pada daerahnya masing-masing perlu disempurnakan. Krisis yang multidimensi yang melanda semua daerah di Indonesia perlu penanganan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dengan optimal.

- Keempat, membangun strategi untuk memperkuat ketahanan sistemik (*systemic resilience strategies*). Belajar dari pengalaman pandemi Covid-19, saat ini kita hidup dalam kondisi ketidakpastian dalam suatu sistem yang dinamis, saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain di masa depan, sehingga faktor *shock* meskipun awalnya berskala kecil, namun dapat menimbulkan dampak yang teramplifikasi menjadi sangat bagi seluruh sistem di suatu negara atau dunia. Untuk itu, kita membutuhkan suatu wawasan dan metode dari berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk membuat gambaran realistis tentang bagaimana suatu sistem terbentuk, dan juga berguna untuk membangun “sebuah sistem dari berbagai sistem” (*system of systems*) yang lebih besar secara integratif. Secara implementatif, kondisi ini juga menekankan kita akan pentingnya resiliensi suatu sistem terhadap berbagai guncangan/tekanan, yang memungkinkan sistem untuk pulih khususnya dari fungsi yang hilang (*lost functionality*) dan beradaptasi dengan realitas baru terkait ekonomi internasional, kebutuhan masyarakat, dan perilaku manusia serta risiko iklim yang lebih tidak terduga (OECD, 2020).

*Systemic resilience strategies* menekankan pentingnya bukan hanya pencegahan, tetapi juga pemulihan dan adaptasi setelah terjadinya *shocks*. Aspek resiliensi ini perlu “mengakui” bahwa kemungkinan gangguan secara masif dapat terjadi kembali di masa depan sehingga menjadi penting bagi sistem ini untuk memiliki kapasitas untuk pemulihan dan adaptasi untuk memastikan keberlanjutan hidup di masa depan, termasuk juga memanfaatkan peluang-peluang baru terungkap

pada saat krisis untuk melakukan perbaikan ancaman sistemik yang lebih luas/lebih besar. Contohnya, pandemi Covid-19 memberikan kesempatan untuk mengatasi keadaan darurat lain seperti perubahan iklim dengan lebih efektif. Dengan kata lain, momentum ini dimanfaatkan untuk memantul ke depan (“bouncing forward”), bukan malah sebaliknya memantul ke belakang atau “bouncing backward” (Linkov dkk., 2018). Dengan demikian, *systemic resilience strategies* ini perlu dikembangkan, tidak hanya untuk menghadapi pandemi Covid-19 saat ini saja, namun terpenting adalah kemungkinan adanya pandemi (guncangan lain) di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan *sharing* informasi (data) yang terkait antar negara seperti *sharing* mengenai tipe pencegahan dan penanganan yang efektif dalam mengatasi pandemi, informasi mengenai vaksin dan obat pencegah lainnya, cara-cara pencegahan penyebaran penyakit, dan kesadaran dasar sanitasi.

- Kelima adalah penguatan strategi komunikasi. Komunikasi secara efektif oleh para pemimpin sangat penting untuk mengelola kredibilitas suatu kebijakan, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan transparansi. Di masa krisis komunikasi dari para pemimpin seringkali tidak efektif, atau bahkan salah. Sering para pemimpin bersikap terlalu percaya diri dan optimis pada tahap awal krisis dan juga cenderung menunda pengumuman untuk waktu yang lama sementara mereka menunggu lebih banyak fakta muncul dan keputusan dibuat. Walau tidak terdapat pendekatan baku mengenai bagaimana strategi komunikasi sebaiknya dilaksanakan, diperlukan komunikasi yang bijaksana dan sering untuk menunjukkan bahwa para pemimpin mengikuti situasi dan menyesuaikan respons mereka saat mereka belajar lebih banyak. Ini membantu mereka meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mereka sedang menghadapi krisis. Para pemimpin harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa masalah, pertanyaan, dan minat masyarakat luas ditangani. Komunikasi tidak boleh berhenti setelah krisis berlalu. Menawarkan pandangan yang optimis dan realistis dapat memberikan pengaruh yang kuat pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, menginspirasi mereka untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh.



## **BAB IV**

# **ANALISA SEKTORAL DAN STRATEGI PENGUATAN PEMULIHAN INKLUSIF**

### **4.1. Pendahuluan**

Kecepatan pemulihan ekonomi nasional amat bergantung pada kemampuan sektor ekonomi, baik dari sisi pengeluaran maupun sebaliknya, dalam menyerap dengan baik stimulus yang diberikan sebagai daya ungkit untuk mengembalikan permintaan. Meski demikian, kita juga menyadari jika struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya belum bisa dikatakan ideal betul terutama bila ditinjau dari ragam sumber pertumbuhan yang masih bergantung pada konsumsi domestik. Dampaknya, perubahan sentimen acap kali mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat hingga pada gilirannya memberi tekanan ke sektor riil dan penerimaan negara yang turun. Hal ini kemudian diperberat dengan berlanjutnya defisit transaksi berjalan yang kembali melebar sejak tahun 2012 silam. Bagaimanapun, era *commodity super cycles* telah berakhir serta menandai arah baru transisi ekonomi nasional yang diharapkan dapat mengandalkan lahirnya berbagai peluang sumber pertumbuhan baru yang inklusif digawangi oleh sektor UMKM maupun Ekonomi dan Keuangan Syariah. Keberhasilan laju transformasi ekonomi nasional pada saat yang sama juga masih dibayangi oleh dampak negatif dari pandemi Covid – 19. Ditengah iklim perdagangan global yang menurun signifikan, konsumsi domestik juga mengalami kendala serupa seiring diterapkannya PSBB secara bertahap di berbagai daerah. Tidak dapat dipungkiri, kebijakan pembukaan ekonomi tengah dihadapkan pada pilihan yang cukup dilematis ketika jumlah kasus terinfeksi semakin hari semakin tinggi dikala pembukaan ekonomi juga tidak kalah penting bagi sebagian besar masyarakat untuk kembali menyambung kehidupan. Sementara itu, pengembangan faktor produksi sebagai prasyarat transformasi ekonomi mengalami kendala yang cukup signifikan sebagai implikasi dari kebijakan belanja pemerintah dan investasi swasta yang cenderung melakukan rekonsiliasi untuk lebih fokus ke penyediaan bantalan sosial maupun prasarana kesehatan. Untuk itu, analisa kebijakan hematnya tetaplah perlu cermat memperhitungkan implikasi yang timbul terhadap tantangan struktural atau siklikal, termasuk konteks new normal terhadap dinamika perekonomian Indonesia sekarang.

Berkaca dari pendahuluan tersebut, maka Bab ini akan memaparkan lebih lanjut tentang pentingnya langkah penguatan modalitas perekonomian untuk bangkit dari tekanan pandemi seraya terus mewujudkan upaya transformasi menuju negara maju. Sebelumnya telah dijelaskan pula tentang pentingnya menempuh kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara seimbang, yakni memerhatikan kecepatan dan besaran dampak secara kausalitas (*trickle-down effect*). Tentunya, upaya untuk memastikan laju pertumbuhan ekonomi kembali normal tidak dapat mengabaikan target jangka panjang untuk reformasi struktural. Kondisi yang masih diliputi ketidakpastian tentu perlu segera direspons dengan kesiap-siagaan kebijakan oleh para pemangku kepentingan. Rumusan kebijakan itu sendiri perlu memerhatikan keterkaitan antar sektor ekonomi baik secara *backward-linkage*, *forward-linkage*, maupun *inter-linkage* sehingga mampu melahirkan kerja pembangunan secara lebih terintegrasi. Bahasan dalam bab ini sekaligus akan merangkum analisa tematik yang dilakukan oleh beberapa FG Bidang Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan PP ISEI yang memiliki kaitan erat terhadap langkah pemulihan dari pandemi, diantaranya adalah sebagai sektor penopang dalam bentuk kajian Ketenagakerjaan dan Ekonomi Pertanian, kemudian juga sektor potensial seperti Kemaritiman, Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perdagangan Internasional, dan model bisnis UMKM yang dapat menjahit keterkaitan antar sektor tersebut menjadi suatu *on-boarding program* dalam mendukung prospek pertumbuhan yang tetap positif dan inklusif.

## **4.2. Sektor Penopang Pemulihan Ekonomi**

### **4.2.1. Perluasan Keuangan Inklusif**

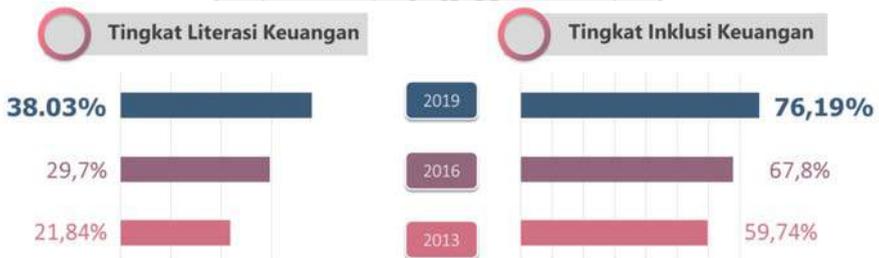
Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada pemerataan ekonomi secara menyeluruh, peningkatan akses atau inklusi keuangan menjadi motor penggerak perekonomian melalui pemanfaatan produk yang bermuara kepada lembaga keuangan formal.

Pandemi covid – 19 yang membatasi mobilitas manusia berimplikasi pada kebutuhan atas ketersediaan produk/layanan keuangan yang mudah diakses oleh setiap orang menjadi suatu hal yang amat strategis. Kegiatan ekonomi harus tetap berjalan meski berada dalam keterbatasan, begitu juga dengan kelancaran transaksi keuangan yang menjadi urat nadi di dalamnya. Inklusi keuangan menjadi fenomena baru dengan inovasi pada fitur yang lebih *accessible*, *flexible*, dan *affordable*. Meski demikian, berbagai tantangan masih menyertai upaya perwujudan keuangan inklusi yang lebih merata secara nasional. Salah satunya adalah rendahnya tingkat

literasi keuangan nasional.<sup>58</sup>

Indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 76,9% atau naik sekitar 8,39% dari tahun 2016. Sementara, literasi keuangan ikut meningkat menjadi 38,03% atau bertambah 8,33% dari sebelumnya di tahun 2016. Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, indeks literasi keuangan Indonesia masih berada dibawah negara peers lainnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung menggambarkan jika mayoritas masyarakat Indonesia walaupun telah memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan secara rutin, namun tidak semuanya memahami risiko yang akan dihadapi dan pemanfaatannya secara optimal dalam ikut meng-*generate* biaya ekonomi lebih efisien.

**Grafik 2. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional tahun 2019**



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK. 2019

Hasil survei diatas sekaligus menunjukkan adanya gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan antara daerah pedesaan maupun perkotaan. Pada tahun 2019, indeks inklusi keuangan di desa hanya sebesar 68,5%, jauh lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan di daerah perkotaan yakni sebesar 83,6%. Hal serupa juga terjadi pada tingkat literasi keuangan, di daerah pedesaan literasi keuangan pada tahun 2019 hanya mencapai sebesar 34,5%, lebih rendah dari indeks literasi keuangan di perkotaan yang sebesar 41,4%. Perlu ada suatu kesadaran kolektif antara pemangku kepentingan dan masyarakat setempat untuk meningkatkan akseptasi produk dan layanan keuangan dalam menunjang kehidupan dan transaksi keuangan sehari-hari. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki kapasitas infrastruktur teknologi yang sama baiknya, begitu juga dengan keberadaan agen layanan keuangan inklusif yang masih belum merata.

<sup>58</sup> Mengacu pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2019. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir sejak pertama kalinya survei ini dilaksanakan pada tahun 2016, secara bertahap pemahaman masyarakat terhadap akses dan produk keuangan meningkat.

## Sinergi dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Tantangan selanjutnya adalah meski produk dan layanan keuangan telah tersedia dan tersebar di beberapa daerah tujuan, namun belum semuanya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemerintah daerah amatlah penting dalam merancang produk yang sesuai kebutuhan. Berbagai upaya dalam rangka mendukung perluasan akses keuangan tersebut tentu tidak dapat hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagai penyusun arah strategi dan kebijakan. Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Pemda) juga diperlukan sebagai pelaksana program peningkatan inklusi keuangan. Hal ini kemudian yang ikut melandasi pentingnya kehadiran forum koordinasi dan sinergi di masing-masing daerah untuk meningkatkan akses keuangan, salah satunya melalui pemberdayaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Keberadaan forum koordinasi percepatan akses keuangan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta pertumbuhan yang lebih merata melalui pembiayaan pada sektor ekonomi yang potensial menjadi sumber pertumbuhan baru. Hal tersebut juga diperkuat melalui komitmen pemerintah dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional dapat mencapai 90% di tahun 2024. Respon kebijakan dalam mendukung visi tersebut perlu disusun sedemikian rupa, mencakup dimensi jangka pendek maupun menengah-panjang, sinkronisasi adalah hal yang penting tetapi belum cukup jika tidak dilengkapi beberapa kebijakan pendukung, antara lain:

Dalam jangka pendek.

- (i) Tersedianya kelengkapan petunjuk teknis, mencakup jenis program, monitoring dan evaluasi atas implementasi kegiatan di pusat maupun daerah. Petunjuk yang disusun diharapkan mampu melihat permasalahan secara spasial dan menawarkan solusi yang implementatif.
- (ii) Edukasi dan sosialisasi yang masif melalui berbagai kanal media komunikasi. Menjangkau kebutuhan informasi penduduk tentang produk dan layanan jasa keuangan yang bisa diandalkan dalam turut menghindari risiko pandemi.
- (iii) Fasilitasi *business matching*, terutama bagi beberapa sektor usaha yang berdaya tahan dan sedang berangsur pulih. *Linkage* antar sektor ekonomi terhadap industri dengan skala industri yang lebih tinggi di atasnya mampu mempercepat perbaikan produksi dan Kembali menstimulus belanja sektor swasta.

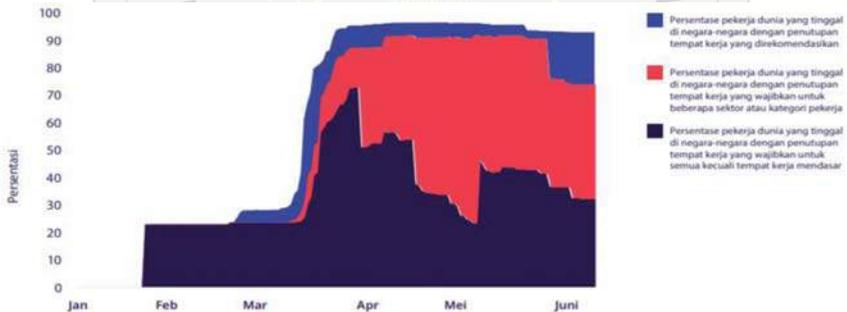
Dalam Jangka Menengah – Panjang

- (i) Meningkatnya titik akses layanan keuangan di daerah, termasuk yang berbasis digital. BPD dapat mengambil peran sebagai katalisator dalam perluasan akses keuangan dengan menjadi bank perantara bagi agen inklusi keuangan.
- (ii) Dukungan insentif biaya transaksi yang lebih murah guna menstimulus penggunaan produk dan layanan keuangan formal yang lebih luas, bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Termasuk, insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil mendorong percepatan akses keuangan.
- (iii) Menginisiasi kawasan khusus inklusi keuangan sebagai percontohan bagi daerah lain untuk mengembangkan kebijakan yang lebih implementatif.

#### 4.2.2. Pemulihan Iklim Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan telah sangat terpengaruh oleh pemberlakuan tindakan karantina yang mencakup berbagai bentuk penutupan tempat kerja (ILO, 2020). Statistik juga menunjukkan jika secara global terjadi dampak yang cukup massif karena hampir sepertiga dari pekerja di dunia (32%) tinggal di negara-negara yang melakukan kebijakan karantina secara menyeluruh.

**Grafik 3. Persentase Pekerja di Dunia Terdampak Pandemi Covid - 19**



Catatan: Persentase pekerja yang dipekerjakan di negara-negara dengan penutupan tempat kerja yang wajikan untuk beberapa sektor atau kategori pekerja dan penutupan tempat kerja yang di-rekomendasikan ditumpuk di atas persentase mereka yang dipekerjakan di negara-negara dengan penutupan tempat kerja yang wajikan untuk semua tempat kerja kecuali yang mendasar.

Sumber: ILOSTAT, perkiraan model ILO, November 2019, dan Pelacak Respons Pemerintah untuk CO-VID-19 dari Oxford.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia tenaga kerja di Indonesia sebetulnya bisa dilihat dari dua sisi, yakni sisi pekerja dan pengusaha. Dari sisi pekerja, adalah terjadinya gelombang PHK dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja

mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%.<sup>59</sup> Sementara itu dari sisi pengusaha, pandemi covid 19 menyebabkan terhentinya kegiatan bisnis dan rendahnya kemampuan keuangan untuk bertahan. Tidak banyak kalangan usaha yang memiliki kemampuan ketahanan keuangan lebih dari 3 bulan, pemutusan hubungan kerja pada saat yang sama juga berimplikasi pada jumlah konsumsi rumah tangga yang menurun secara signifikan. Beberapa sektor usaha yang bisa bertahan umumnya hanya mereka yang bergerak pada sektor primer dan pemenuhan alat kesehatan.

Tantangan tidak berhenti sampai disitu, tenaga kerja di Indonesia juga masih menghadapi kendala struktural yakni sekitar 57% dari total penduduk yang bekerja masih berpendidikan SMP ke bawah dan *skill* yang terbatas. Kompetensi yang masih lemah ikut menjadi kendala adaptasi teknologi dan informasi sebagai salah satu prasarana yang dapat digunakan dalam membuka ceruk pasar baru di tengah pandemi. Berbeda dengan kejadian pada saat Krisis Finansial Global di tahun 2008, UMKM dapat berperan aktif menjadi bantalan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja didukung dengan kelembagaan yang lebih fleksibel dan cepat beradaptasi. Namun demikian, penurunan permintaan yang terjadi di kondisi pandemi tidak dapat dipungkiri terjadi secara luas dan signifikan kepada berbagai sektor. UMKM menjadi klaster pertama yang mengalami dampak negatif akibat pandemi, efisiensi tenaga kerja tidak lagi terelakkan baik dari sisi jumlah maupun jam kerja yang secara agregat menyebabkan jumlah pendapatan lebih mengecil. Sementara itu aliran tenaga kerja yang mengalami PHK menuju sektor informal tidak terbandung, dan beberapa data menunjukkan terjadi *shifting* menuju sektor pertanian, kondisi ini terutama dipengaruhi beberapa hal diantaranya: (i) sektor pertanian masih tumbuh positif, (ii) tidak ada kompetensi khusus yang harus dimiliki untuk cepat beradaptasi, (iii) terdapat risiko *layoff* yang lebih lanjut di sektor formal seiring kontraksi yang berlanjut selama triwulan III di tahun 2020.

Perlambatan ketersediaan lapangan kerja juga tercermin dari survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Hasil survei menunjukkan bahwa kegiatan dunia usaha turun pada triwulan II-2020. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -35,75%, terkontraksi lebih dalam dibanding -5,56% pada triwulan I sebelumnya. Penurunan kegiatan dunia usaha terjadi pada seluruh sektor ekonomi dengan penurunan terdalam pada sektor Industri Pengolahan,

---

<sup>59</sup> Berdasarkan Survei "Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia" yang dilakukan oleh LIPI pada bulan Mei 2020.

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Jasa-jasa yang sebagian diantaranya merupakan padat karya. Penurunan terjadi terutama disebabkan oleh gangguan pasokan dan permintaan akibat pandemi Covid – 19. Meski demikian, SKDU juga meng-capture prospek positif dari penggunaan tenaga kerja yang diperkirakan membaik di paruh kedua 2020 meski masih dalam fase kontraksi. Berdasarkan sektornya, hampir seluruh sektor diperkirakan mengalami perbaikan penggunaan tenaga kerja seiring kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi dana stimulus pemulihan bagi kalangan usaha serta membaiknya ekspektasi positif untuk melanjutkan realisasi investasi menjelang akhir tahun nanti.

Mencermati peluang yang ada di depan mata, perlu ada kebijakan yang konsisten merespon perubahan permintaan dan penawaran di dunia tenaga kerja tersebut. Menyambung prospek pemulihan yang lebih positif, dalam jangka pendek pemerintah perlu melanjutkan upaya perbaikan kualitas iklim usaha (kemudahan perizinan usaha). Disamping itu, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk perdagangan (e-commerce) juga dapat diarahkan untuk mendorong usaha mikro dan kecil segera pulih serta naik kelas. Pemerintah telah mengambil langkah kedepan yang cukup signifikan melalui penerbitan UU Cipta Kerja, berikutnya kita perlu mengawal proses implementasi tersebut agar bisa mendatangkan lebih banyak manfaat terhadap tumbuh kembang iklim tenaga kerja nasional seraya akselerasi stimulus dana fiskal juga ditempuh dengan tepat sasaran, yakni diantaranya kepada industri maupun UMKM padat karya.

Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah perlu membangun sistem pendidikan dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara luas. Hal ini diperlukan untuk mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) yang dapat menopang inovasi produk maupun perbaikan proses produksi. Mekanisme *link and match* tetap kita andalkan dan perlu didorong secara intensif untuk penyerapan angkatan kerja baru yang dihasilkan dari sekolah vokasi maupun pendidikan tinggi. Pada saatnya kurikulum pendidikan juga perlu ditinjau kembali penyesuaiannya terhadap perkembangan saat ini, terutama terkait semakin terintegrasi dan terbukanya perekonomian global serta perkembangan teknologi digital.

#### **4.2.3. Peningkatan Ketahanan Pangan**

Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang masih mencatat pertumbuhan positif selama kita melalui masa pandemi dalam dua triwulan terakhir. Meskipun kontribusi tahunan PDB Pertanian pada Tw-III turun

menjadi 14,58% (Tw sebelumnya 15,46%), namun sektor ini tetap menyumbang pertumbuhan yang positif sebesar 2,15% (yoy) capaian ini pun diperkirakan masih akan membaik hingga akhir tahun seiring datangnya siklus panen besar terutama untuk komoditas beras. Komoditas pertanian yang masih tumbuh positif tersebut jika dipengaruhi oleh penerapan adaptasi kebiasaan baru di kalangan masyarakat secara umum. Meskipun belanja produk RT tercatat mengalami penurunan, namun kebutuhan untuk konsumsi bahan makanan utama ternyata masih relatif stabil. Hasil survei penjualan eceran Bank Indonesia pada bulan September lalu mengkonfirmasi perilaku konsumen tersebut, tren perbaikan pada penjualan eceran terus berlanjut sejak bulan Juni 2020 dan terjadi pada sebagian besar kelompok komoditas yang dipantau seperti Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat tumbuh positif selama Agustus dan September.

### **Sisi Pengeluaran: Pola Konsumsi Masa Pandemi**

Sepanjang tahun 2020, komponen sisi pengeluaran seluruhnya mengalami kontraksi, kecuali pengeluaran Pemerintah yang mengalami pertumbuhan 9,76 persen (y-o-y) pada Q3-2020. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga masih terkontraksi minus 4,04 persen, pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga non-profit yang melayani rumah tangga) juga minus 2,12 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 6,48 persen, ekspor minus 10,82 persen, dan impor lebih parah sampai minus 21,86 persen.

Walaupun pada Q4-2020 tanda-tanda peningkatan pengeluaran masyarakat sudah mulai terlihat, tapi kondisi tersebut masih jauh dari kondisi sebelum masa pandemi. Survei yang dilakukan oleh Bank Mandiri Research Institute (BMRI) menunjukkan kunjungan ke supermarket dan *took retail* sudah kembali normal, kunjungan ke *department store* dan restoran masih jauh di bawah kondisi normal. Pada bulan Oktober 2020, kunjungan ke restoran di Surabaya mencapai 52 persen dari normal, disusul Bogor dan Tangerang 51 persen, Bekasi 51 persen dan Medan 49 persen. Sementara di Makassar, Jakarta dan Denpasar, kunjungan ke restoran hanya tercatat masing-masing 47, 44 dan 44 persen dari normal. Menariknya, kunjungan ke Restoran pada Agustus dan September 2020 sempat cukup tinggi, walau pun kemudian menurun lagi, seiring dengan dinamika kasus Covid19 di beberapa kota besar Indonesia.

## Grafik 4. Perilaku pengeluaran rumah tangga selama Pandemi Covid-19



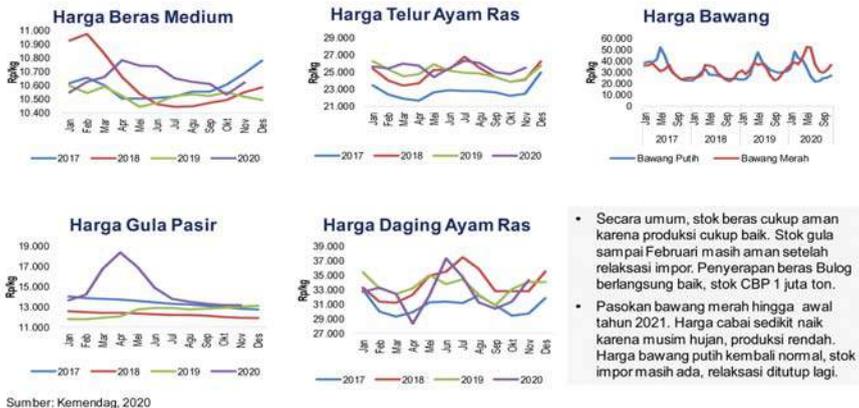
Secara umum, pada akhir Oktober 2020 pengeluaran masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah berada sekitar 79,3 persen dari kondisi normal sebelum Pandemi. Pengeluaran kelompok penghasilan menengah tercatat 86,2 persen dan penghasilan atas tercatat 89,8 persen. Pengeluaran untuk hobi dan olah raga pernah mencapai 140 dan 120 persen atau 40 dan 20 persen lebih tinggi dari kondisi normal pada Agustus 2020, walaupun kini telah berada pada kondisi normal. Selama pandemi Covid 19, pengeluaran rumah tangga Indonesia banyak untuk hobi, seperti bersepeda dan olah raga lain, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari pengeluaran rumah tangga di negara-negara lain. Dengan kata lain, pola permintaan untuk konsumsi produk pangan cenderung lebih rendah dari kondisi normal, kecuali untuk pangan pokok atau yang memiliki elastisitas rendah.

### Sisi Suplai: Kinerja Pangan Strategis

Dari sisi suplai, sektor pertanian mencatat pertumbuhan positif dan menjadi bantalan (*cushion*) di tengah resesi ekonomi Indonesia. Sektor pertanian tumbuh 2,19 dan 2,15 persen (*yoy*) dan pada Q2 dan Q3-2020. Sebagai bahan baku utama dari agroindustri, kinerja positif sektor pertanian perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan produksi dan produktivitasnya melalui intervensi dan kebijakan yang mampu memberikan insentif dan memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sepanjang tahun 2020, ekonomi pangan dan agroindustri mengalami perjalanan yang tidak mudah, karena Pandemi Covid 19 telah membuat kontraksi perekonomian nasional dan mengurangi daya beli masyarakat. Untungnya, harga pangan pokok beras relatif stabil, karena produksi tahun 2020 sedikit lebih tinggi dari tahun 2019. Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

yang dikelola Perum Bulog sampai Desember 2020 tercatat 1,1 juta ton, sebagian besar berasal dari pengadaan dalam negeri. Akan tetapi, sepanjang 2020 harga pangan strategis lain sangat fluktuatif, terutama pangan asal impor. Harga gula sempat sangat tinggi pada April - Mei, karena proses administrasi impor bermasalah, sehingga mengganggu perjalanan dan daya saing industri makanan dan minuman.

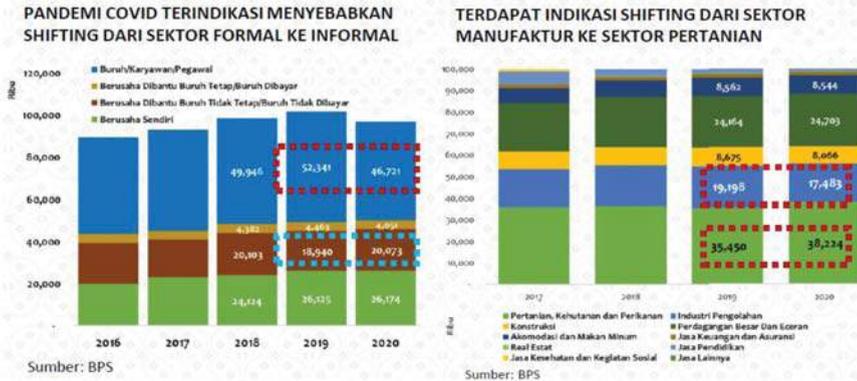
### Grafik 5. Dinamika Perubahan Harga Pangan Strategis Nasional



- Secara umum, stok beras cukup aman karena produksi cukup baik. Stok gula sampai Februari masih aman setelah relaksasi impor. Penyerapan beras Bulog berlangsung baik, stok CBP 1 juta ton.
- Pasokan bawang merah hingga awal tahun 2021. Harga cabai sedikit naik karena musim hujan, produksi rendah. Harga bawang putih kembali normal, stok impor masih ada, relaksasi ditutup lagi.

Penetapan kebijakan harga yang wajar dan adil akan membantu peningkatan nilai tukar petani (NTP) lebih baik. Nilai tukar petani pada bulan Oktober 2020 naik menjadi 102,25 dari bulan sebelumnya 101,66 angka tersebut namun masih lebih rendah dari peroleh NTP diawal Februari 2020 yang bisa mencapai 103,35. Kesejahteraan petani yang rendah tersebut dapat menimbulkan paradoks terhadap kesinambungan produksi pertanian nasional, karena laju pertumbuhan yang positif ternyata belum diimbangi dengan daya beli petani yang lebih baik. Padahal statistik tenaga kerja menunjukkan adanya fenomena *shifting* dari pekerja sektor manufaktur yang mengalami PHK kembali ke sektor pertanian. Belum optimalnya pengelolaan produksi dan pasokan serta distribusi dan tata niaga komoditas pangan harus segera dibenahi karena selain menjadi penyebab utama masih tingginya disparitas harga komoditas pangan di Indonesia, peran sektor pertanian dalam penciptaan kesempatan kerja juga semakin menurun.

## Grafik 6. Shifting Ketenagakerjaan Selama Pandemi ke Sektor Informal



### Prioritasi Kebijakan di Sektor Pertanian

Mencermati kondisi diatas, diperlukan prioritas kebijakan yang mampu mendukung pemulihan ekonomi pertanian, namun pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola pangan nasional. Usulan kebijakan tersebut diantaranya:

*Pertama*, kebijakan yang mampu memfasilitasi terobosan dalam perubahan teknologi, baik di hulu usahatani, maupun di hilir agro-industri sangat dibutuhkan. Misalnya, peningkatan kualitas benih dan input pertanian lain akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan positif sektor pertanian. Intervensi kebijakan dalam menggerakkan sumber-sumber pertumbuhan sektor pertanian akan mampu meredam dampak krisis ekonomi karena Pandemi yang lebih buruk lagi.

*Kedua*, pembangunan agroindustri memerlukan perubahan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi industri pada jangka pendek dan melonjakkan produktivitas pada angka menengah-panjang. Strategi memerlukan perbaikan kinerja badan penelitian dan pengembangan (Litbang atau R&D) kementerian relevan, penyempurnaan ekosistem inovasi yang melibatkan ABGC secara sinergis (*academics, business, government and civil society*).

*Ketiga*, strategi kebijakan yang mampu mendorong daerah-daerah yang menjadi andalan atau penopang sektor pertanian dan agroindustri secara spesifik, terutama di Jawa dan Sumatera. Strategi ini perlu juga diimbangi

dengan pengembangan dan pemberdayaan daerah-daerah di Luar Jawa yang memiliki potensi tinggi sebagai sumber pertumbuhan di masa depan. Pembangunan infrastruktur dan akumulasi kapital, yang mendukung pertanian presisi, pertanian berteknologi tinggi dan bahkan dengan dukungan teknologi mekanisasi yang efisien akan mampu berkontribusi pada pembangunan agroindustri masa depan.

*Keempat*, perhatian khusus perlu diberikan pada industri berbasis perikanan, yang terdampak relatif besar selama Pandemi, terutama dalam perbaikan rantai nilai dan sistem logistik kelautan dan perikanan. Misalnya, rendahnya nilai tambah subsektor perikanan selama ini karena industri perikanan mengalami banyak kendala rendahnya bahan baku pasokan ikan. Langkah terobosan masih amat diperlukan, misalnya perbaikan dan reorientasi kebijakan tol-laut, pembenahan insentif sistem muatan arus balik (dari Luar Jawa), serta peningkatan ekspor langsung (*direct call*) menggunakan kargo udara yang jauh lebih efisien.

*Kelima*, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pangan dan pertanian yang mampu kompatibel dengan perubahan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 lainnya. Kebijakan yang perlu segera disempurnakan adalah: pemberdayaan dan pendampingan kepada petani, peternak, nelayan dan UKM pangan, pembembangan jaringan kerja agroindustri, melibatkan perguruan tinggi dan lembaga akademik lain, penyempurnaan dukungan pembiayaan, dan peningkatan akses keuangan, terutama dalam meningkatkan inklusivitas keuangan dan perbankan.

### **4.3. Sektor Pendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi**

#### **4.3.1. Pengembangan Sumber Daya Kemaritiman**

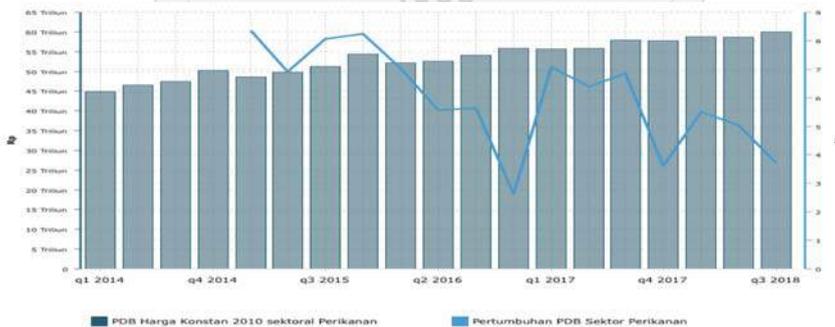
Pandemi Covid 19 telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan melambatnya kinerja sektor ekonomi maritim di beberapa Daerah Kedadatangan Utama nasional, serta menimbulkan risiko gangguan distribusi bahan ikan segar yang merupakan jenis pangan mudah rusak (*perishable food*). FAO (2020) juga menambahkan, setidaknya ada 5 (lima) hal yang terjadi pada sektor perikanan ditengah upaya untuk survive dari pandemi covid 19, yakni (1) kegiatan penangkapan ikan akan berkurang atau terhenti karena rendahnya permintaan dan penetapan harga, (2) hasil budidaya perikanan tidak terserap secara optimal kepada sektor agro industri lainnya, (3) perubahan mekanisme pasar pada pengolahan ikan, (4) gangguan lebih lanjut pada domestic dan *regional value chain*, (5) perubahan

manajemen dan kebijakan perikanan sebagai respons dinamika sektor maritim dan kelautan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya sektor perikanan adalah salah satu sektor utama yang diproyeksikan mampu memberi andil dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di tahun 2030 selain beberapa sektor potensial lainnya seperti jasa, pertanian dan Pendidikan. Sektor perikanan Indonesia memiliki potensi yang besar, potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya diperkirakan mencapai US\$ 82 miliar pertahun, dengan rincian potensi perikanan tangkap mencapai US\$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$ 46,7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US\$ 1,1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$ 5,2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun (Pursetyo, 2015).

Meski demikian, besarnya sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia ternyata belum diikuti oleh kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Kontribusi perikanan Indonesia saat ini baru mencapai 3 – 4% dari PDB tahun 2018. Sementara beberapa negara lain seperti Jepang, Korea, China dan New Zealand bahkan sudah menyumbang 30% dari PDB. Indonesia cukup beruntung dengan data pada triwulan pertama tahun 2020 yang menunjukkan persentase rata-rata kapasitas produksi adalah sebesar 71,28% atau masih sedikit lebih rendah dari triwulan yang sama di 2019 yakni sebesar 74,61%. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa serapan produk perikanan masih relatif baik meski ditengah kondisi pandemi Covid – 19.

**Grafik 7. Andil PDB Sektor Perikanan Terhadap Nasional (Tw I 2014 – Tw III 2018)**



(Sumber: BPS 2019)

<sup>60</sup> FAO (Food And Agriculture Organization) dikutip dari The State of World Fisheries and Aquaculture, 2020

Serapan produk ikan yang masih baik tersebut sayangnya belum diikuti oleh harga jual perikanan yang layak. Setelah perkembangan rata-rata realisasi dan perkiraan harga jual perikanan pada tahun 2016 – 2019 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 0,52%. Pada tahun 2019, rata-rata realisasi dan perkiraan harga jual berangsur menurun menjadi 0,35%, kemudian pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020 realisasi dan perkiraan harga jual perikanan tercatat mengalami kemunduran hingga -0,07%, nilai tersebut merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Keadaan ini kemudian juga berdampak pada penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) selama paruh pertama tahun 2020, dan mulai menunjukkan pembalikan di Tw III seiring adaptasi pola hidup *new normal* yang memberi peluang kunjungan tamu ke hotel dan rumah makan produk olahan laut. Pembalikan ini sendiri masih terbatas dan belum lebih tinggi dibandingkan awal tahun.

**Grafik 8. Tingkat NTN dan NTPi Nasional Januari – Agustus 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020

Menghadapi kondisi yang *extraordinary*, tentunya perlu recalibrasi kebijakan dari berbagai aspek, termasuk urgensi dari sisi kemampuan mendorong pemulihan ekonomi yang relatif aman terhadap risiko penyebaran wabah lebih lanjut.

### **Mitigasi Dampak Negatif Lebih Lanjut di Sektor Kemaritiman**

Dinamika sektor perikanan dan kelautan nasional masih dipengaruhi tantangan baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Pada sisi tantangan struktural sistem manajemen maritim perlu dibenahi untuk bisa mewujudkan tata kelola perikanan nasional yang berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi ekonomi. Sementara pada sisi siklikal, konsumsi domestik masih melemah dan permintaan ekspor menurun ditengah serapan komoditas ke industri lokal melambat, pandemi Covid – 19 telah menimbulkan dampak

signifikan di dalam dan luar negeri, serta baik sektor riil dan keuangan. Dengan demikian, untuk menopang dampak negatif yang lebih lanjut, diperlukan respons kebijakan di sektor kelautan dan perikanan yang mampu menjangkar ekspektasi perbaikan ekonomi dalam jangka pendek maupun menengah panjang, antara lain;

Pertama, usulan kebijakan jangka pendek yang diperlukan terdiri dari (1) Adaptasi teknologi yang dapat membantu penyerapan dan pemasaran produksi ikan nelayan dan pembudidaya ikan untuk menjaga stabilitas harga produk ikan, (2) Kebijakan subsidi BBM dan pakan untuk mengurangi biaya input produksi dan memberi kemudahan usaha perikanan untuk segera pulih, (3) Sosialisasi secara massif Gerakan Makan Ikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perbaikan tingkat harga dan perolehan Nilai Tukar Nelayan, (4) Insentif biaya logistik dan perpajakan, serta (5) Restrukturisasi kredit di sektor usaha perikanan yang terdampak pandemi. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah diusulkan enam paket stimulus ekonomi dalam rangka mempercepat penanganan dampak Covid – 19. Harapannya bantuan yang diberikan dapat diterima tepat sasaran, sekaligus memerhatikan *readiness* dari sektor usaha perikanan untuk kembali pulih tanpa mengurangi perhatian dalam mengantisipasi risiko penyebaran pandemi lebih luas.

Kedua, dalam jangka menengah dan panjang, dukungan yang diperlukan bagi sektor perikanan dan kelautan diantaranya adalah (1) Teknologi produksi benih unggul untuk komoditas yang diminati pasa global dan memberi nilai tambah lebih, (2) Penggunaan Big Data untuk perumusan kebijakan perikanan yang berbasis kepada pemantauan supply and demand secara aktual, (3) Insentif pakan dan bahan baku bagi sektor industri ikan olahan, dan (4) Penguatan tata kelola logistik yang semakin efisien.

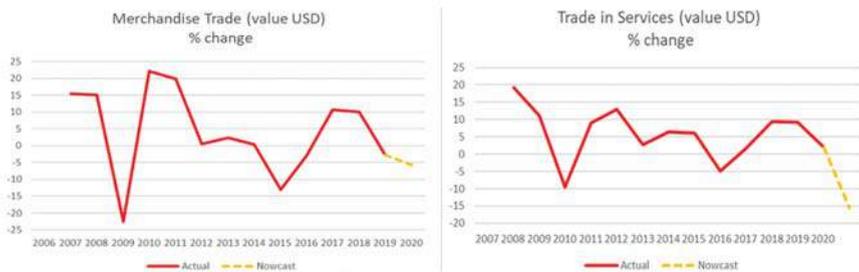
#### **4.3.2. Penguatan Strategi Perdagangan Internasional Era Baru**

Pandemi Covid – 19 telah menyebabkan disrupsi pada perdagangan internasional. Peristiwa luar biasa yang terjadi secara global tidak hanya mengganggu *supply* dan *demand* perdagangan internasional, namun juga tengah merubah preferensi mayoritas masyarakat dunia dalam melakukan konsumsi. Mobilitas manusia yang terbatas bagaimanapun telah menyebabkan mereka berpikir ulang untuk menentukan prioritas belanja bulanan (McKinsey Report, 2020). Terjadi perubahan pada megatrend perdagangan dunia yang terdiri atas 3 (tiga) fenomena utama; Pertama, pandemi telah mendorong akselerasi penggunaan teknologi di tengah-tengah masyarakat, secara khusus istilah otomatisasi dan digitalisasi semakin membumi

dan mendorong keinginan mencari barang-barang yang *less tangible*, dan tidak memerlukan banyak sentuhan fisik dalam aspek produksi. Kedua, perubahan konsesus para pemangku kebijakan terhadap arah perdagangan internasional, terjadi pergeseran dari pendekatan multilateralisme menuju bilateralisme hingga berlanjut ke regionalisme yang diiringi dengan peningkatan proteksionisme (*inward looking policy*). Ketiga, menguatnya tuntutan untuk mewujudkan visi SDG's dari sisi jenis komoditas yang diperdagangkan maupun investasi ke sektor ekonomi yang lebih memerhatikan *green environment*. Sebagai resultan atas ketiga megatren tersebut, pertumbuhan rantai nilai perdagangan dan investasi langsung secara global berangsur menurun bahkan sudah dirasakan sejak sebelum era pandemi tiba.

Sementara penurunan yang tajam dan merata terjadi hampir di seluruh dunia, baik itu yang berasal dari negara maju maupun berkembang, sampai dengan bulan Agustus tren pertumbuhan perdagangan dunia di beberapa negara juga masih tercatat negatif dan berada di bawah baseline.

**Grafik 9. Proyeksi Perdagangan Jasa dan Barang Dunia (Agustus, 2020)**



Sumber: UNCTAD, 2020

Indonesia tidak terkecuali menghadapi tantangan yang serupa, meskipun diprakirakan kedepan akan muncul peluang dari lahirnya peta perdagangan baru, namun masa transisi dalam pemulihan dari pandemi akan amat menentukan kecepatan sektor industri untuk masuk ke rantai perdagangan global. Dalam jangka pendek sektor usaha akan mengalami *downside effect* berupa waktu pengiriman barang lebih lama, biaya logistik bertambah, serta prosedur yang lebih ketat sesuai dengan standard protokol kesehatan di masing-masing yurisdiksi. Dalam jangka menengah, tantangan terbesar akan berasal dari modalitas kerjasama perdagangan internasional yang telah dibangun selama ini tidak semuanya bisa berjalan dengan efektif, diantaranya ditimbulkan oleh kebijakan pembatasan sosial maupun lockdown

yang diberlakukan secara mandiri di beberapa negara, salah satunya yang merupakan tujuan ekspor utama Indonesia seperti AS (11,86%) dan Uni Eropa (8,91%).

## **Paradigma Baru di Perdagangan Internasional**

Membaiiknya kinerja perdagangan internasional sesungguhnya merupakan salah satu faktor penentu dalam mendukung pemulihan serta mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke laju potensialnya, termasuk dalam rangka memperbaiki penyerapan tenaga kerja dan struktur neraca berjalan. Para pemangku kebijakan dihadapkan pada kerja keras untuk mencari peluang ekspor ditengah iklim permintaan dunia yang memang sedang lesu dan beberapa realisasi investasi yang sempat tertunda. Namun demikian, memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan diwaktu yang sama menuntut adanya perubahan mindset dalam mereview kebijakan *international trade existing*, diversifikasi produk saja tidak akan cukup namun juga perlu diimbangi dengan promosi perdagangan yang tetap intensif berbasis data dan teknologi. Kemudian, arah kebijakan perlu kembali diformulasikan berlandaskan kepada 2 (dua) tahapan penting yang juga merupakan lesson learned di beberapa negara lain (worldbank, 2020), antara lain:

Tahapan pertama yakni penguatan prasarana logistik khususnya dalam hal kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sebagai prasyarat awal yang harus dipenuhi agar mengembalikan sentiment positif atas produksi nasional. Dalam tahap ini dukungan stimulus yang bersifat penyederhanaan ketentuan serta keringanan pajak dianggap penting untuk mematik iklim perdagangan domestik ditengah modal usaha yang sudah tergerus untuk mempertahankan arus keuangan.

Tahapan kedua adalah memastikan tidak ada gangguan yang berarti pada rantai nilai perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan kendala teknis maupun administratif. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menginisiasi beberapa respons kebijakan yang cukup positif dalam meningkatkan iklim perdagangan misalnya seperti Program Pendampingan Ekspor (Export Coaching Program), percepatan pelayanan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor, serta percepatan pengajuan ekspor melalui National Logistics Ecosystem.

## **Strategi Memperkuat Dominasi di Pasar Internasional**

Isu lainnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan peranan Indonesia di kancah Internasional. Namun sebelum itu, kemampuan

untuk memproduksi barang yang lebih resilien dan sejalan dengan global megatrends saat ini amatlah diperlukan. Dukungan kebijakan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas menjadi suatu prasyarat untuk mencari peluang pasar baru dan memberi kemudahan iklim berusaha di domestik dalam medium jangka pendek. Dalam jangka panjang, negosiasi dagang dapat kembali dilakukan secara intensif untuk mengurangi hambatan ekspor seperti pengenaan tarif tambahan yang masih terjadi di beberapa negara tujuan.

Menghadapi ketidakpastian yang masih meliputi iklim perdagangan internasional. Berikut beberapa pilihan strategi maupun pendekatan kebijakan yang bisa ditempuh oleh para pemangku kepentingan termasuk bagi pelaku usaha:

- **Reshoring:** Pada beberapa industri, kebijakan *reshoring* atau merelokasi ekspansi perusahaan kembali ke negara asal dirasa lebih efektif sebab bisa memotong rantai nilai yang lebih pendek. Dalam hal ini kebijakan reshoring perlu diartikan secara lebih luas untuk melakukan *re-strategizing* teknologi serta strategi distribusi yang selama ini dijalankan. Dengan semakin ketatnya peraturan impor barang modal oleh negara tujuan, tidak sedikit membuka cabang di luar negeri kini mulai menghadapi lebih banyak tantangan. Perusahaan perlu tetap fokus efisiensi dan kembali memetakan pasar.
- **Diversifikasi:** Produk – produk yang bisa bertahan adalah mereka yang mampu cepat beradaptasi dan mengikuti perubahan keinginan konsumen. Digitalisasi telah mendorong masyarakat untuk mencari pengalaman baru berbelanja serta menentukan prioritas produk yang akan mereka beli, diluar barang – barang esensial yang menunjang hidup. Implementasi teknologi dan informasi telah menjadi arus utama yang akan membantu perusahaan memantau preferensi konsumen berbasis data. Kemampuan untuk mengkooptasi dan menganalisa data tersebut menentukan keberhasilan strategi diversifikasi produk.
- **Regionalisasi:** Implementasi nyata dari regionalisasi adalah dengan ditandatangani perjanjian RCEP (The Regional Comprehensive Economic Partnership) oleh 10 negara ASEAN bersama negara 5 mitra.<sup>61</sup> Interdependensi yang sudah terbangun sejak lama antara negara kawasan merupakan modal penting untuk membangun persamaan

---

<sup>61</sup> Penjelasan dikutip dari halaman resmi (<https://asean.org/summary-regional-comprehensive-economic-partnership-agreement/>) yang menjelaskan rangkuman atas hasil kegiatan penandatanganan perjanjian RCEP.

kepentingan dalam memulihkan iklim perdagangan regional. Perjanjian dalam RCEP akan menghapus sebagian besar tarif impor untuk memperluas akses arus barang dan jasa antar negara. Perjanjian ini akan berlangsung selama dua tahun kedepan dan Indonesia perlu memastikan bahwa proses ratifikasi yang masih berjalan dapat membawa keuntungan pasti bagi kedua belah pihak dan memperhatikan aspek keunggulan nasional secara spasial. Mengingat, peringkat daya saing industri di Indonesia yang masih bersaing ketat dengan negara lain di kawasan. Kerjasama ini juga dalam rangka meningkatkan komunikasi internasional, transportasi, logistik, serta keuangan dan investasi bagi negeri peserta.

- **Replikasi:** Strategi ini dibangun dengan kembali melihat dan memanfaatkan kompetensi inti atau keuntungan tertentu yang dikembangkan dan mendapat sambutan positif di dalam negeri (pasar domestik) sebagai suatu strategi yang sama untuk meningkatkan penetrasi pasar di luar negeri. Replikasi diyakini cukup efektif untuk mengurangi proses trial and error dan meningkatkan efisiensi sebab produksi akhir tetap dilakukan di dalam negeri. Meski demikian kebijakan replikasi akan menghadapi tantangan ketika negara tujuan sudah lebih awal menerapkan kebijakan duplikasi atas pengamatan mereka terhadap produk dan sektor usaha yang potensial dikembangkan. Persaingan pada akhirnya dapat dimenangkan oleh mereka yang mampu mewujudkan comparative advantage terhadap produk sejenis yang beredar di pasaran.

#### 4.3.3. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Apabila melihat perkembangan sebelum fenomena pandemi Covid – 19, tren meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa berbasis Syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Global Islamic Economy Indicators 2018/2019 bahkan menyebutkan jika permintaan dunia pada tahun 2017 terhadap produk halal dunia mencapai USD 2,1 triliun, dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai USD 3,0 triliun pada akhir 2023. Prakiraan tersebut juga didukung dengan bertambahnya jumlah *global player* dalam memasok produk halal dunia seperti Brazil yang berupaya menjadi produsen daging halal utama dunia, kemudian UAE dengan visi modest fashion terdepannya, serta Malaysia yang berencana menjadi pusat keuangan Syariah dunia.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim sekaligus sebagai salah satu konsumen produk halal dunia memiliki peluang untuk

memimpin inovasi dalam pengembangan produk barang dan jasa keuangan syariah yang tengah berjalan secara global. Selain didukung potensi konsumsi domestik terhadap produk halal yang terus meningkat, hal ini juga diikuti dengan perhatian terhadap pelaku usaha untuk menghadirkan barang-barang yang memiliki sertifikasi halal semakin menjamur. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi suatu negara percontohan dimana kualitas produk yang sudah bersertifikasi halal pada saat yang sama juga memenuhi standard produk global. Sementara itu, peringkat Indonesia sebagai produsen produk halal dunia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 Indonesia berada pada posisi ke-8 sebagai pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi posisi ke-5, serta meningkat ke ranking ke-4 pada tahun 2020 ini. Peringkat yang membaik tersebut terutama berasal dari sumbangan sektor pariwisata halal, halal food dan modest fashion yang masih menunjukkan pertumbuhan meski berada dalam kondisi pandemi Covid – 19.

**Gambar 6. Peringkat Indonesia Sebagai Produsen Produk Halal Dunia**

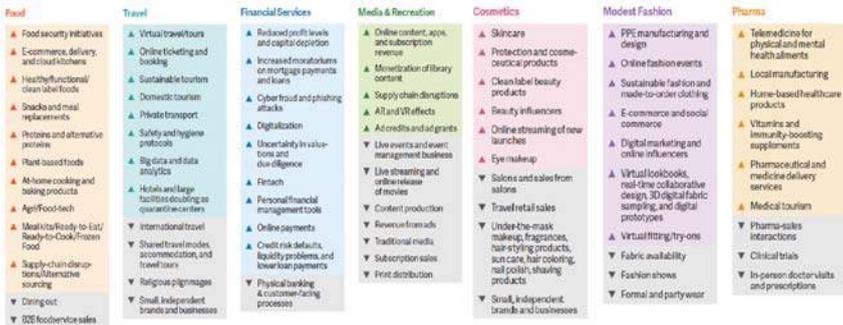


### Dinamika Eksyar dan Re-kalibrasi untuk Pulih dari Pandemi

Transisi dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru (new normal) bukanlah hal yang mudah bagi industri keuangan maupun pelaku usaha sektor riil syariah. Perlambatan ekonomi tidak terkecuali terjadi pada mayoritas sektor ekonomi seiring mobilitas manusia yang menurun secara signifikan, tercermin dari tertahannya permintaan masyarakat dan berakibat pada kegiatan usaha yang lesu. Covid – 19 diperkirakan akan berdampak kepada penurunan sebesar 8% dari total konsumsi masyarakat muslim dunia selama tahun 2020, penurunan konsumsi terbesar diperkirakan terjadi pada sektor travelling sementara dampak negatif terendah pada sektor makanan, farmasi, dan media & rekreasi. Tantangan serupa juga dialami oleh beberapa

negara anggota OIC (Organisation of Islamic Cooperation) baik dari sisi penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi diantaranya Malaysia yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 17% (yoy) pada Tw II 2020 dan merupakan terendah sejak 20 tahun terakhir. Kemudian Turki yang terkontraksi hingga 9,9% (yoy) pada triwulan yang sama seiring berlanjutnya kebijakan untuk pembatasan aktivitas diantara kota-kota besarnya.

**Gambar 7. Mapping Sektor Eksyar yang Terdampak Pandemi Secara Global**



Sumber: State of Islamic Economy Indicator, 2020

Meski demikian, ditengah dinamika yang berlangsung dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dampak negatif lebih lanjut dari Pandemi Covid – 19. Sektor ekonomi dan keuangan tengah melakukan recalibrasi terhadap perubahan gaya hidup masyarakat serta prakiraan kondisi new normal yang masih akan berjalan dalam jangka panjang sampai dengan vaksinasi teruji efektif secara klinis dan tersebar ke penduduk di seluruh bagian dunia. Proses kalibrasi kemudian tersebut dapat melahirkan *signals of opportunity* yang semakin menguat untuk mendorong pemulihan ekonomi secara lebih inklusif ditengah - tengah masyarakat, diantaranya terdiri dari:

- Pandemi Covid – 19 mendorong akselerasi tranformasi digital pada sebagian besar industri halal. Pelaku usaha syariah tersadarkan untuk segera mempersiapkan infrastruktur dalam menyambut Revolusi 4.0. Pemangku kebijakan mulai menaruh perhatian lebih untuk menyusun strategi dalam digitalisasi rantai pasokan, penggunaan big data, serta otomasi pada manufaktur, termasuk didalamnya *upskilling* para pelaku usaha UMKM dalam mengadopsi digitalisasi untuk proses bisnis yang lebih efisien.
- Disrupsi pada global value chain mendorong *re-strategizing* rencana investasi yang berfokus pada penguatan potensi ekonomi lokal.

Dorongan untuk penguatan produksi lokal secara terintegrasi menguat, terutama didorong oleh penyediaan produk berbasis agri-tech dan halal food, serta produk esensial lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat selama *stay at home*. Penguatan ekonomi lokal dianggap memiliki prospek lebih baik seiring pengetatan impor yang terjadi di beberapa negara tujuan.

- Perubahan preferensi konsumen untuk hidup dan mengonsumsi makanan yang lebih sehat serta berbelanja secara online. Kebijakan pengetatan kegiatan publik mendorong masyarakat untuk selalu berada dirumah, pada saat yang sama keinginan kebutuhan pokok harus terpenuhi melalui sarana online. Masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak untuk makanan favorit dan sehat selama menjalani isolasi mandiri. Sementara itu produk bersertifikasi halal memiliki potensi pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memastikan penyajian produk yang aman, higienis, serta menyehatkan, sebagaimana prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah.

Fenomena pandemi pada satu sisi memang memunculkan harapan yang tinggi agar ekonomi dan keuangan syariah bisa berperan besar untuk turut menopang aktivitas ekonomi dan menghindari kontraksi yang lebih dalam. Dalam jangka sangat pendek, penyaluran ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak negatif atau juga mustahik yang memerlukan pertolongan, seraya pendampingan dari beberapa Badan Amil Zakat juga dilakukan kepada unit usaha di masyarakat agar tetap berdaya tahan dan kembali melakukan kegiatan produksi, strategi blended finance yang mengkombinasikan aspek keuangan sosial dan komersial syariah perlu dioptimalkan untuk mengurangi gap pembiayaan yang selama ini dialami oleh sektor usaha informal. Program restrukturisasi kredit bagi UMKM maupun korporasi, harapannya juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha di sektor riil untuk menjaga keberlangsungan usaha di masa akan datang.

Berikutnya dalam jangka menengah, diperlukan suatu iklim berusaha yang baik, dalam mendukung arah pembangunan eksyarakat secara berkelanjutan terutama perangkat regulasi yang mengatur dan mengayomi sektor ekonomi dan keuangan syariah secara umum. Industri halal nasional belum memiliki aturan atau regulasi yang cukup memadai hampir di seluruh level usaha. Sementara, permasalahan hukum terus berkembang seiring dinamika perekonomian syariah nasional yang terus meningkat, misalnya (i) masalah

standarisasi akad, (ii) panduan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan (iii) belum ada ketentuan yang mengatur terkait *linkage* industri dan umkm syariah. Payung hukum yang kuat dalam hal diperlukan untuk mendorong industri keuangan maupun barang dan jasa syariah nasional bisa mencapai tingkat *maturity* yang diinginkan.

Payung hukum tersebut dalam beberapa kesempatan diusulkan sebagai suatu Rancangan Undang- Undang tentang Ekonomi Syariah (RUU Eksyar) yang ditujukan dalam menjadi landasan pengembangan industri syariah nasional yang berkaitan dengan kebijakan lainnya di sektor asuransi, teknologi finansial dan pasar modal syariah.

Dalam RUU tersebut juga direncanakan beberapa area yang menjadi fokus pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia adalah:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha syariah di Indonesia melalui penerapan “Rantai Nilai Halal” (Halal Value Chains), agar terjalinnya usaha kemitraan usaha antar UMKM, antara UMKM dan Korporasi dan antar Korporasi baik skala nasional maupun global.
- b. Pengembangan produk keuangan syariah (komersial maupun sosial), yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk konvensional dengan karakteristiknya bagi hasil (profit and loss sharing) dan sindikasi.
- c. Riset, Edukasi dan Komunikasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia yang masih rendah (diperkirakan masih dibawah 10%).

#### **4.4. Digitalisasi UMKM dalam Mendukung Pemulihan Sektor yang Inklusif**

Patut diakui perubahan pola konsumsi yang terjadi dengan cukup signifikan ternyata membawa tantangan yang tidak mudah bagi tumbuh kembang sektor usaha nasional, baik itu yang berskala industri besar maupun menengah. Kalangan usaha dari sektor industri maupun perdagangan besar yang terdampak mulai terindikasi melakukan penyesuaian pada rencana bisnisnya di tahun 2020, baik itu dari sisi penjualan, penyerapan tenaga kerja maupun realisasi investasi yang diperkirakan lebih rendah dari target. Dalam kondisi demikian, negara memerlukan sumber pertumbuhan yang lebih inklusif dan mampu melakukan pemulihan dengan cepat. Sumber pertumbuhan yang lebih inklusif ditandai dengan kemampuan mewujudkan pemerataan pendapatan serta menahan gelombang pemutusan tenaga

kerja, sementara pemulihan yang cepat dapat lebih efektif jika diimplementasikan pada kelompok usaha yang memiliki manajemen bisnis dan produksi yang lebih sederhana dan kerap dikelompokkan dalam kategori industri rumahan atau UMKM. Dalam perjalanannya UMKM sendiri merupakan elemen penting bagi ekonomi Indonesia yang harus dijaga, justru ketika sektor ini merupakan klaster yang terpukul atas dampak pandemik. Kita ketahui, dari 129 juta tenaga kerja aktif, mayoritas 96% diantaranya berada pada sektor UMKM, dan 60% PDB Indonesia disumbang oleh sektor informal.

Strategi pengembangan UMKM perlu dilakukan secara end-to-end dengan fokusnya pada upaya peningkatan produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Didukung dengan sinergi kebijakan terkait integrasi ekonomi dan keuangan digital, ekonomi dan keuangan syariah yang mengedepankan prioritas pada output produk potensial. Di Bank Indonesia arsitektur pengembangan UMKM diwujudkan dalam 3 (tiga) pilar kebijakan yaitu korporatisasi, kapasitas dan pembiayaan. UMKM akan diarahkan menuju SMI 4.0 melalui pengembangan strategi pemasaran menggunakan e-commerce, penyediaan sistem pembayaran berbasis digital (*cashless*), peningkatan kontribusi platform pembayaran digital dalam pembiayaan UMKM, mendorong sertifikasi standarisasi UMKM dan peningkatan kemampuan digital. Nemon kebijakan ini akan lebih optimal jika bisa disinergikan dengan otoritas perbankan dalam rangka mendorong pemenuhan rasio minimal kredit UMKM yang meningkat, kelancaran program restrukturisasi kredit sebagai bagian PEN, dan kebijakan tambahan subsidi bunga lainnya yang bisa membantu percepatan pemulihan. Dari sisi literasi juga perlu dilakukan berbagai program peningkatan kapasitas UMKM setidaknya dalam 4 (empat) level kurikulum yaitu umum, basic, intermediate dan advance untuk mendorong penguatan kelembagaan dan kapabilitas pengelolaan manajerial UMKM.

#### **4.4.1. Penguatan Kolaborasi UMKM dan Industri Kreatif Nasional**

Salah satu program dalam mewujudkan UMKM yang naik kelas adalah melalui peningkatan partisipasi dan *linkage*-nya terhadap sektor lain yang potensial dan mampu memberi nilai tambah lebih, salah satunya sektor ekonomi kreatif. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 industri kreatif berhasil menyumbang sekitar 19,45% dari total perekonomian nasional. Capaian tersebut relatif tinggi dan mengalami pertumbuhan yang signifikan apabila kita bandingkan pada tahun 2016 yang baru mencapai 7,5%. Tiga subsektor industri kreatif yang memberi kontribusi terbesar atas capaian tersebut antara lain adalah industri kuliner (41,69%), industri fashion

(18,15%), dan industri kerajinan/kriya (15,70%). Industri kreatif juga menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja dan terdiri dari 8,2 juta jenis usaha yang sebagian besar berupa UMKM. Industri kreatif pada dasarnya bukan merupakan industri yang sepenuhnya baru, melainkan beberapa kategorisasi dari industri yang sudah ada sebelumnya namun dengan sentuhan inovasi yang lebih baik.

Berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Perdagangan, industri kreatif tersebut meliputi kegiatan kreatif terkait dengan periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan computer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Indonesia, dengan keanekaragaman sumber daya alam (flora dan fauna) dan budaya memiliki potensi yang besar sebagai sentra industri kreatif di kawasan. Beberapa kegiatan UMKM nasional sebetulnya sudah mengarah kesana, dengan menysasar visi untuk menjadikan usaha yang sedang dibangun untuk *go – digital* maupun *go – export*. Beberapa pendekatan telah ditempuh baik oleh pelaku usaha sendiri dan dukungan dari pemerintah. Berdasar Strategi Nasional Pengembangan UMKM, telah ditentukan 3 pilar utama yang menjadi fondasi implementasi program pendampingan UMKM, antara lain (1) Meningkatkan ‘kapasitas’ manajerial dan kompetensi bisnis UMKM, (2) Memperkuat *linkage* maupun intergrasi kelompok usaha dalam mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi atau ‘korporatisasi’, dan (3) Mendukung aksesibilitas ‘pembiayaan’ bagi UMKM.

Elaborasi yang baik antara UMKM dan kegiatan dalam industri kreatif nasional dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang dihadirkan pada saat yang sama bisa membantu memenuhi kebutuhan konsumen secara online selama kondisi pandemi. UMKM dapat mengisi kebutuhan produk – produk budidaya yang membantu dalam menjalankan isolasi mandiri serta memelihara kesehatan tubuh, misalnya obat – obatan herbal, makanan sehat, hingga bentuk kerajinan yang bisa mewarnai isi rumah. Namun demikian, industri kreatif bukan berarti tidak memiliki kendala, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah pemasaran, riset dan pengembangan yang terbatas, edukasi bagi para pelaku usaha untuk terus berinovasi yang masih rendah, sumber pembiayaan masih berasal dari mandiri, serta tidak semuanya sudah memiliki infrastruktur teknologi dan informasi yang baik. Untuk itu, koordinasi program antar otoritas perlu terus digalakkan dan tidak lagi berangkat dari sekat masing-masing.

Kerjasama program menjadi kunci ditengah banyak dari kementerian dan lembaga yang memiliki program sosial serupa dalam pengembangan UMKM. Beberapa program utama yang perlu diimplementasikan dalam

menjawab beragam tantangan pada industri kreatif diantaranya: (i) mendorong riset yang dapat menghasilkan produk kreatif serta memfasilitasi akses pasar domestik dan internasional, (ii) untuk mengakselerasi pertumbuhan industri kreatif, berbagai faktor penghambat perlu diatasi, seperti tumpang tindih peraturan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses pembiayaan, (iii) mengoptimalkan industri kreatif yang relative sudah berkembang pesat saat ini, seperti fashion, periklanan, dan musik dengan membuka platform komunikasi visual yang lebih luas baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4.4.2. Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM

Peran UMKM dalam ikut serta mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional tidak akan dapat berjalan optimal apabila masih dibayangi persoalan klasiknya yang kesulitan memperoleh permodalan maupun biaya modal yang mahal dari agen keuangan. Meski demikian, pada dasarnya sarana pembiayaan untuk UMKM dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan digital dan integrasi data kependudukan untuk mempermudah pengumpulan informasi yang diperlukan dalam verifikasi. Melalui digitalisasi, proses pendaftaran menjadi lebih mudah sehingga pengisian data dapat dilakukan secara bertahap, tidak harus seluruhnya dilakukan di awal dan membebani dari sisi *entry policy*. Penggunaan digital juga mempermudah koneksi antara Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan para pelaku jasa teknologi finansial.

Dalam hal ini beberapa aspek kebijakan yang diambil antara lain mengubah skema biaya transfer pada nilai tertentu, misalnya bagi transaksi dibawah Rp 10 juta. Biaya transfer pada transaksi mikro dapat menggunakan model persentase, tidak dengan nilai *fixed*. Dengan demikian pembangunan sentra informasi data keuangan juga dibutuhkan agar dapat melengkapi data Dukcapil yang merupakan sentra informasi data kependudukan. Kemudian, kebijakan berikutnya adalah melalui peningkatan peneterasi uang elektronik di kelompok UMKM. Pemahaman yang rendah bagi pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal mengakibatkan lambannya laju inklusi keuangan di sebagian besar merchant. Melalui kebijakan uang elektronik (UE) pemerintah dapat membangun piloting kerjasama dimana UMKM pengguna tidak perlu memiliki rekening bank untuk menggunakan fasilitas UE dalam bertransaksi. Pada saat yang sama, penyelenggara UE juga diatur untuk mengaplikasikan prinsip manajemen dan due dilience yang baik agar tidak menimbulkan risiko yang lebih lanjut terhadap stabilitas sistem keuangan. Tanpa melalui persyaratan yang sulit, UMKM harus bisa didorong untuk masuk kedalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, serta menjembatani proses pemodalannya maupun pembayaran dengan lebih efektif.

Ekosistem tersebut perlu disambut juga dengan integrasi yang baik antara layanan keuangan digital dan perbankan melalui mekanisme *Open API*.<sup>62</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang bertujuan untuk memastikan arus digitalisasi yang berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan secara kondusif. Didalam visi ini sekaligus juga menekankan perbankan sebagai lembaga utama dalam pemanfaatan teknologi dan data dalam bisnis keuangan melalui mekanisme *open-banking*. Melalui digitalisasi para pemangku kebijakan perlu mengidentifikasi solusi yang integratif untuk membawa masuk sekitar 91,3 juta penduduk dewasa unbanked dan 62,9 juta UMKM kedalam akses keuangan formal. Program inklusi keuangan pada saatnya juga perlu diperluas dari sebatas alat pembayaran ataupun rekening bank menjadi akses pasar keuangan dan pasar barang secara utuh serta *sustainable*. *Interlink* antara bank dan fintech perlu diperkuat, termasuk didalamnya dalam kerangka *entry-policy* pengawasan yang diselaraskan dengan aspek digitalisasi.

#### 4.4.3. Penguatan Daya Saing UMKM

Dalam rangka mengambil peran untuk turut memperkuat keberadaan UMKM dalam kancah perekonomian nasional, dan mendukung percepatan pemulihannya di masa transisi adaptasi pola hidup baru (*new normal*), maka Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) melakukan kajian terhadap kondisi UMKM terkini dan memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan sebagai berikut:

- 1) Strategi pertama pengembangan UMKM pasca pandemi dilakukan melalui pendampingan dan pelatihan UMKM dalam penggunaan *platform* online, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta strategi pemasaran online. Pendampingan dan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, *Marketplace provider*, dan perbankan. Khusus untuk mendukung penjualan ekspor produk UMKM diperlukan pendampingan bersama agregator dan memanfaatkan informasi pasar luar negeri dari Kementerian Luar Negeri terkait standarisasi dan kurasi produk agar dapat memenuhi kriteria dan demand di pasar luar negeri. Fasilitas pemerintah diperlukan pula juga dalam hal pendampingan dan pelatihan kepada usaha mikro agar tumbuh menjadi wirausaha. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan kapasitas pendamping yang dapat diterapkan, adalah:

---

<sup>62</sup> API: Application Programming Interface, dikutip dari glosarium Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025

- a. Pemberdayaan tenaga pelatih yang telah dimiliki oleh kementerian desa dengan peningkatan pemahaman terhadap proses bisnis.
  - b. Mencetak lebih banyak tenaga ahli pendamping yang menguasai beberapa standar keahlian tertentu antara lain manajemen produksi, manajemen keuangan dan manajemen risiko.
  - c. Pemberdayaan tenaga PKK yang sudah tersedia di setiap desa dengan melengkapi kapasitas mereka tentang teknologi digital.
  - d. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dapat dilakukan dengan lembaga pengabdian masyarakat atau dengan mahasiswa KKN untuk pendampingan untuk aspek spesifik tertentu misalnya pelatihan kewirausahaan.
- 2) Untuk mendukung pemanfaatan platform digital oleh UMKM di seluruh penjuru daerah di Indonesia, Pemerintah perlu memfasilitasi pembangunan infrastruktur sarana komunikasi dan informasi secara merata di daerah-daerah yang belum terjangkau. Fasilitas infrastruktur ini menjadi prioritas untuk mendukung kebijakan yang bertumpu pada pemanfaatan platform digital.
  - 3) Dukungan dalam rangka perluasan dan penguatan pemasaran produk UMKM, dapat difasilitasi Pemerintah melalui *campaign* secara masif dengan sinergi Pemerintah bersama Badan Usaha, misalnya melalui kebijakan afirmatif Pemerintah untuk memprioritaskan pemakaian produk UMKM dibandingkan produk impor. Disamping itu, Pemerintah juga dapat memfasilitasi pengembangan inovasi produk berdasarkan preferensi pasar di era *new normal*, melalui penyampaian informasi kepada badan usaha pembina UMKM di daerah, serta kerjasama pemerintah dengan *e-commerce* untuk subsidi pemasaran produk UMKM pada platform online.
  - 4) Belajar dari kebijakan yang dikeluarkan negara lain untuk membantu UMKM *survive* dan segera bangkit di era *new normal*, Pemerintah perlu memfasilitasi likuiditas UMKM dengan restrukturisasi pinjaman untuk UMKM yang sudah menjadi debitur bank dan memberi pinjaman jangka pendek bersuku bunga subsidi untuk membantu permodalan bagi usaha mikro atau wirausaha baru, yang sebagian besar merupakan korban PHK dari industri.
  - 5) Dalam rangka perluasan akses keuangan UMKM dengan menggunakan platform digital untuk sisi pembiayaan dan pembayaran, dan untuk mengatasi gap informasi antara perbankan dengan UMKM, Pemerintah perlu membangun database profil UMKM di seluruh

Indonesia yang komprehensif. Database dapat dibangun oleh BPS dan Bank Indonesia untuk penyusunan struktur informasi *nationwide* yang dibutuhkan, kemudian Pemda mengeksekusi pelaksanaan survei bekerjasama dengan Bappeda menggunakan biaya APBD. *Data diupdate* dengan *big data* dalam interval setidaknya 2 tahun sekali (sebagaimana contoh di Provinsi Jawa Timur). Selain untuk keperluan perluasan akses pembiayaan UMKM, database juga bermanfaat untuk perluasan akses pemasaran, misalnya bila terdapat permintaan ekspor, Pemda dapat mengidentifikasi UMKM yang sesuai di database untuk kemudian diberi pelatihan dan dipromosikan. Untuk memperkaya data UMKM, Pemda juga dapat bekerjasama dengan pihak swasta seperti *e-commerce*.

- 6) Secara umum, perlu dilakukan penyesuaian definisi UMKM sesuai perkembangan kondisi terkini, namun untuk fleksibilitas pengaturannya tidak perlu di dalam Undang-undang. Definisi dapat dilakukan dari berbagai aspek, misalnya untuk aspek pembiayaan dapat dikelompokkan menurut *feasibility* dan *bankability* UMKM, sehingga perbankan dapat menselaraskan sumber pembiayaan dengan kategori UMKM tersebut, misalnya untuk usaha mikro:
- *Unfeasible & unbankable* dilakukan melalui metode kemitraan
  - *Feasible & unbankable* dibantu dengan kredit program Pemerintah
  - *Feasible & bankable* mendapat pembiayaan komersial (perbankan)

Akselerasi ekonomi kedepan diharapkan dapat membaik, seiring efektivitas dan kecepatan penyerapan stimulus fiskal. perekonomian domestik Indonesia diproyeksikan akan membangun momentum yang sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan meningkatnya produktivitas. momentum pemulihan ekonomi ini perlu kita dorong dengan memperkuat sinergi untuk membangun optimisme. Termasuk, dalam mendukung program pemulihan UMKM yang berdaya saing dan naik kelas.

## Referensi

- Anderson, H., et al., 2020, Staff Report: The Effect of the Central Bank Liquidity Support during Pandemics: Evidence from the 1918 Influenza Pandemic, New York: Federal Reserve Bank of New York.
- Baldwin, R. (2020). The supply side matters: Guns versus butter, COVID-style, CEPR paper, March.
- Cassim, Z., et al., 2020, McKinsey Public & Social Sector Insight Article “*The \$10 trillion rescue: How governments can deliver impact?*” (5 Juni 2020), McKinsey & Company: <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/the-10-trillion-dollar-rescue-how-governments-can-deliver-impact#>, terakhir diakses 31 Oktober 2020.
- Chen. L. & Spence, M. (2020). Five lessons from tracking the global pandemic economy, CEPR paper, July.
- Consensus Economics, 2020, *Asia Pacific Consensus Forecast (October 2020)*, London: Consensus Economics Inc.
- Epstein, J.M., Parker, J., Cummings, D., dan Hammond, R.A. (2008). Coupled Contagion Dynamics of Fear and Disease: Mathematical and Computational Explorations. *PLoS ONE*, 3(12): e3955.
- IMF, 2020, *World Economic Outlook (October 2020)*, Washington D.C.: IMF.
- Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (2020), Memperkuat Model Pertumbuhan, Mempertajam Strategi Kebijakan guna Mewujudkan Indonesia Maju dan Inklusif. Februari.
- Juhro, S.M. (2020), *Central Bank Policy Mix: Memperkuat Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi, Mengawal Era Kenormalan Baru*, Bahan tayangan *Open Lecture Series*, Bank Indonesia Institute, September
- Warjiyo, P (2020), Sinergi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Kenormalan Baru, Bahan tayangan Diskusi Publik ISEI, Agustus.
- Warjiyo, P. & Juhro, S. M., 2016. *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses*, Ed. 1, Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- World Bank, 2020, *Global Economic Prospect (Juni 2020)*, Washington D.C.: World Bank.



## **IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA**

### **Gedung Kantor Pusat ISEI**

Jl. Daksa IV No.9, Jakarta 12110

Telp. : (021) 720 8130

Fax. : (021) 720 1812

Email : [isei.pusat@gmail.com](mailto:isei.pusat@gmail.com)

[www.isei.or.id](http://www.isei.or.id)

ISBN 978-602-14722-9-3

